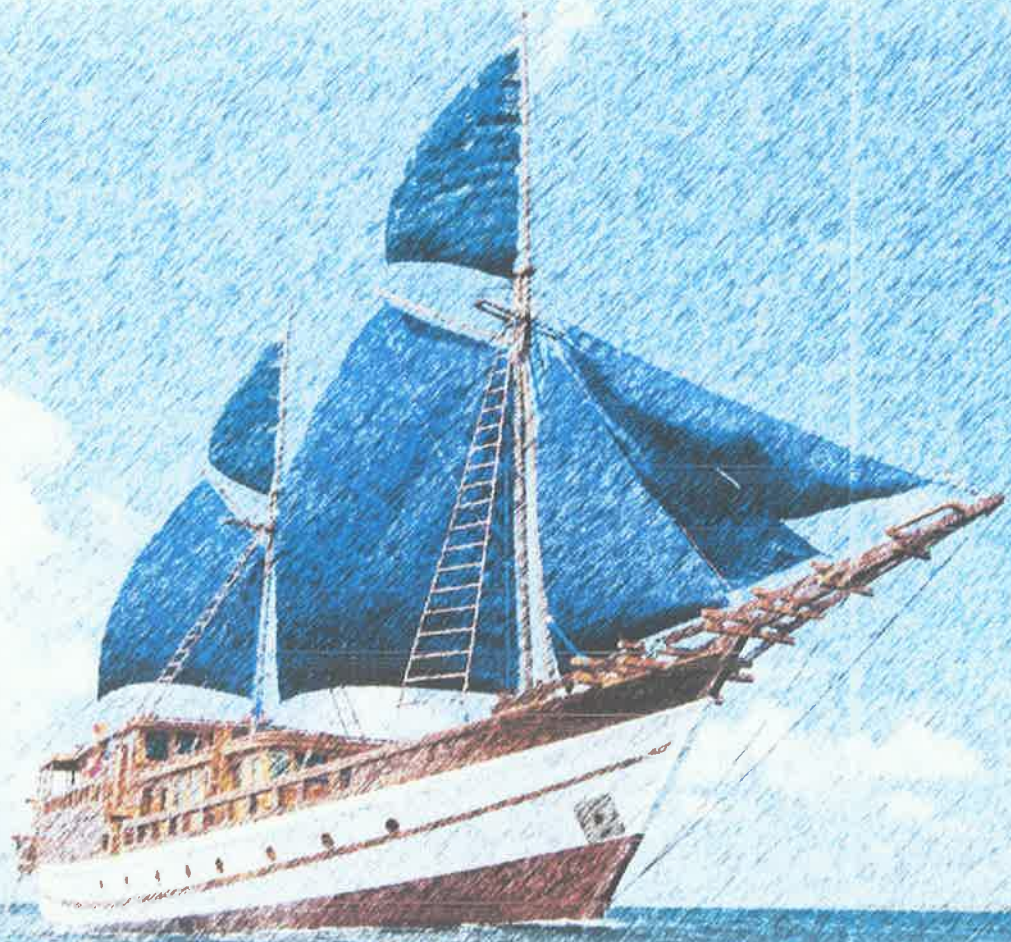




SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN
TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2019 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas kinerja pencapaian visi dan misi Deputy Bidang Kemaritiman. Dalam pencapaian visi dan misi tersebut, Deputy Bidang Kemaritiman telah menetapkan tujuan "Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman" dengan sasaran strategis yaitu "Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman".

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut dimaksudkan untuk mendukung tugas Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang mana Deputy Bidang Kemaritiman memiliki kewajiban mendukung tugas Sekretaris Kabinet tersebut melalui pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi tentang perencanaan kinerja dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Kemaritiman tahun 2019. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian setiap IKU tersebut dipaparkan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di periode selanjutnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Sehubungan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja khususnya di Kedeputian Bidang Kemaritiman dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Maret 2020
Deputy Bidang Kemaritiman


Agustina Murbaningsih

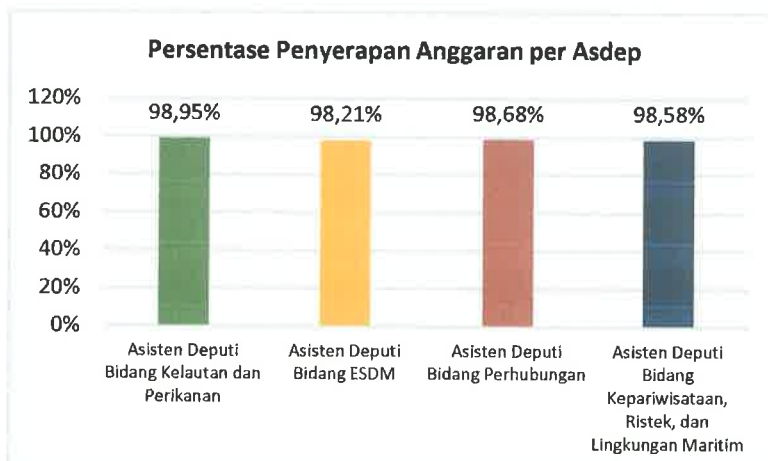
IKHTISAR EKSEKUTIF

Selama tahun 2019, Deputi Bidang Kemaritiman telah mencapai target yang diperjanjikan yaitu capaian mencapai target 100%. Dengan menggunakan indikator “disetujui oleh Sekretaris Kabinet”, Deputi Bidang Kemaritiman menghasilkan **output** sebesar **291** rekomendasi dan aku nyoba print **outcome** 291 rekomendasi. Hal ini berarti seluruh rekomendasi Deputi Bidang Kemaritiman disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Makna disetujui berpedoman pada dokumen Manual Indikator Kedeputian Bidang Kemaritiman tahun 2019 yang berarti **Sekretaris Kabinet menyetujui/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/ merespon memorandum/memanfaatkan rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman.**

Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp 5.900.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 5.810.619.263

(penyerapan anggaran sebesar **98,48%**). Adapun

realisasi tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan *debottlenecking* yang menunjang pencapaian sasaran strategis yaitu penyelenggaraan rapat koordinasi dengan K/L, pemantauan terkait kebijakan dan program pemerintah, sosialisasi, *Forum Group Discussion*, hadir dalam undangan rapat koordinasi yang diselenggarakan K/L, forum nasional dan internasional serta turut berperan aktif dalam tim dan panitia antar kementerian.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Kemaritiman juga berperan aktif dalam melakukan *monitoring* terkait arahan Presiden bidang kemaritiman melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak

Lanjut Arahan Presiden (SITAP) guna memastikan bahwa semua arahan yang diberikan oleh Presiden benar-benar ditindaklanjuti oleh K/L terkait. Pada tahun 2019 terdapat 50 laporan tindak lanjut Arahan Presiden yang disampaikan dalam 50 sidang kabinet paripurna atau Rapat Terbatas di bidang kemaritiman. Berdasarkan hasil *monitoring* diperoleh hasil 34 kegiatan sudah berprogress atau selesai.



Deputi Bidang Kemaritiman sebagaimana Kepseskab Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola *E-Government* Sekretariat Kabinet Tahun 2018 bertindak sebagai anggota pengarah Tim Pengelola *E-Government* Sekretariat Kabinet, telah mengusulkan rancangan SOP SITAP di lingkungan Sekretariat Kabinet yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman juga telah mengadakan rapat koordinasi dalam rangka mengawal pengembangan aplikasi SITAP seperti menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator untuk membahas tindak lanjut pengisian SITAP dan menampung masukan para Kemenko untuk mengembangkan SITAP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PROFIL ORGANISASI	2
B.1. STRUKTUR ORGANISASI	2
B.2. KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS	5
PERENCANAAN KINERJA	8
A. GAMBARAN UMUM	8
A.1. RENCANA STRATEGIS	8
A.2. PERJANJIAN KINERJA	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	14
A.1. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PER IKU TAHUN 2015-2019	17
A.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA BEBERAPA TAHUN TERAKHIR SESUAI DENGAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2015-2019	22
A.3. GAMBARAN CAPAIAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN	24
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN	87
B.1. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA SESUAI DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ...	87
B.2. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA	88
C. SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN	89
C.1. REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGARAAN PEMERTINTAHAN DI BIDANG KEMARITIMAN	91
C.2. REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEMARITIMAN	92
C.3. REKOMENDASI MATERI SIDANG KABINET, RAPAT, ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI BIDANG KEMARITIMAN	95
C.4. SARAN PERBAIKAN DARI PENGGUNA LAYANAN	97

D. SISTEM INFORMASI TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN (SITAP)	103
PENUTUP	106
A. KESIMPULAN	106
B. REKOMENDASI	107
LAMPIRAN	109
1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2019	109
2. Matriks Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman	111
3. Rincian Realisasi Anggaran Deputy Bidang Kemaritiman TA 2019	183
4. Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja	188
4.1. Formulir checklist muatan substansi LKj sesuai Surat edaran Deputy Bidang Administrasi Nomor 4 tahun 2018	188
4.2. Formulir checklist muatan substansi LKj sesuai memorandum Deputy Bidang Administrasi Nomor: M.513/Adm/11/2019 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat kabinet, Eselon I, dan Eselon II Tahun 2019	189

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Capaian Sasaran Strategis	15
Tabel 2: Capaian Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2019.....	16
Tabel 3: Perundang-undangan yang dihasilkan Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2019	20
Tabel 4: Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015 - 2019	23
Tabel 5: pagu Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2019	87
Tabel 6: Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2019	88
Tabel 7: Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman periode tahun 2015 - 2019	88
Tabel 8: Persentase Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Jabatan Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2019	4
Gambar 2: Analisis SWOT Deputy Bidang Kemaritiman	6
Gambar 3: Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman	9
Gambar 4: Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2019	10
Gambar 5: Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kemaritiman	11
Gambar 6: Manual Indikator Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman	13
Gambar 7: Rumus perhitungan capaian sasaran strategis	15
Gambar 8: Dashboard SIKT Deputy Bidang Kemaritiman	16
Gambar 9: Kontribusi setiap Asdep pada capaian Deputy Bidang Kemaritiman	17
Gambar 10: Perbandingan capaian IKK 1 tahun 2015 - 2019	18
Gambar 11 : Perbandingan capaian IKK 2 Tahun 2015 – 2019	19
Gambar 12: Perbandingan capaian IKK 3 Tahun 2015 -2019	21
Gambar 13: Rapat CITES tanggal 9 Mei 2019 dan 17 Mei 2019	25
Gambar 14: Pemantauan tentang sistem logistik ikan nasional ke Muara Angke	26
Gambar 15: FGD rekomendasi atas kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia	27
Gambar 16: Rapat Kebijakan Satu Peta	30
Gambar 17: Rapat Percepatan Pembangunan/Pengembangan Kilang Minyak dan Proyek Petrokimia, Kantor Sekretariat Kabinet	33
Gambar 18: Kunjungan lokasi ke Proyek GRR Tuban, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban	33
Gambar 19: Rapat dukungan percepatan pembangunan GRR Tuban di Fave Hotel Kabupaten Tuban	34
Gambar 20: Suasana rapat identifikasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang di bawah RoW transmisi dan Jarak Bebas Minimum transmisi tanggal 28 Agustus 2019 di Jakarta	36
Gambar 21: Suasana rapat Klarifikasi Tindak lanjut Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-0333 yang dilaksanakan di Sekretariat Kabinet tanggal 25 November 2019 di Jakarta	40
Gambar 22: Plt Asdep Bidang ESDM (belakang paling kanan) bersama Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono (tengah depan) menghadiri Forkom Litbang ke-30 TA 2019 dengan tema “Pemanfaatan Thorium sebagai alternatif Sumber Energi untuk Kepentingan Pertahanan Negara”	42
Gambar 23: Foto bersama Narasumber dan Kepala Daerah regional Sumatera dalam acara sosialisasi Perpres 9 Tahun 2019 di Padang, Sumatera Barat tanggal 24 April 2019	46
Gambar 24: Kondisi Gunung Botak, Kab. Buru, Provinsi Maluku yang sudah ditinggalkan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI)	50
Gambar 25: Deputy Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur	60
Gambar 26: Deputy Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas 15 Juli 2019 Terkait Pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo	61

Gambar 27: Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim memimpin Rapat Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika dan Labuan Bajo.....	63
Gambar 28: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Pariwisata memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kawasan Pariwisata Danau Toba	65
Gambar 29: Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Tanggal 5 Juli 2019 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Pariwisata di Sulawesi Utara	67
Gambar 30: Wakil Sekretaris Kabinet bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pariwisata, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur Sumatera.....	69
Gambar 31: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Memberikan Keterangan Pers pada Acara Puncak Hari Nusantara 2019	70
Gambar 32: Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Pembahasan Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas RPerpres Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru tanggal 2 April 2019	79
Gambar 33: Suasana Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan untuk Percepatan Pembangunan PLTSa Kota Surabaya di TPA Benowo tanggal 15 November 2019	84
Gambar 34: Presiden menerima anugerah penghargaan sebagai Bapak Pariwisata Nasional, yang diserahkan pada Gala Dinner Peringatan HUT ke-50, di Hotel Grand Sahid Jaya.....	87
Gambar 35: Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019	89
Gambar 36: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2019	102

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan karakteristik *good governance*, reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya. Salah satu perwujudan reformasi dan birokrasi yaitu adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur atau dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Kemaritiman ini sebagai salah satu bentuk perwujudan kewajiban yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan di dalam APBN, APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan di pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet bahwa Sekretariat Kabinet memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretaris Kabinet menyelenggarakan fungsi manajemen kabinet dengan dibantu oleh para Deputy sesuai bidang tugasnya. Salah satunya adalah Deputy Bidang Kemaritiman yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan kepada Presiden dalam Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, LKj Deputy Bidang Kemaritiman menyajikan laporan kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Selain itu, Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan informasi perbandingan capaian kinerja Deputy Bidang Kemaritiman tahun 2015-2019. Analisis atas capaian kinerja ini dapat digunakan sebagai identifikasi celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan kontribusi pencapaian kinerja masukan dari laporan kinerja unit eselon II secara berjenjang

sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Deputi Bidang Kemaritiman sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi dalam memberi dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasinya.

B. PROFIL ORGANISASI

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Pada tahun 2015, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi dimana Deputi Bidang Kemaritiman merupakan unit kerja Eselon I baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

B.1. STRUKTUR ORGANISASI

Deputi Bidang Kemaritiman dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung 4 (empat) unit Eselon II yakni:

1. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan (Maritim-1);
2. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Maritim-2);
3. Asisten Deputi Bidang Perhubungan (Maritim-3) dan;
4. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim (maritim-4).

Setiap keasdepan tersebut membawahi 3 (tiga) bidang dan 6 (enam) subbidang kecuali Asisten Deputi Bidang Energi Sumber Daya dan Mineral yang membawahi 4 (empat) bidang dan 8 (delapan) subbidang karena Asdep tersebut juga membawahi bidang pendukung yaitu Bidang Fasilitasi Operasional.

Adapun rincian bidang pada setiap keasdepan sebagaimana berikut:

1. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan membawahi:
 - a. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - c. Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan.
2. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral membawahi:
 - a. Bidang Minyak dan Gas;

- b. Bidang Geologi, Mineral dan Batubara;
 - c. Bidang Energi Baru dan Terbarukan Ketenagalistrikan; dan
 - d. Bidang Fasilitas Operasional.
3. Asisten Deputi Bidang Perhubungan membawahi:
- a. Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
 - b. Bidang Perhubungan Laut;
 - c. Bidang Perhubungan Udara.
4. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim membawahi:
- a. Bidang Pariwisata;
 - b. Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;
 - c. Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

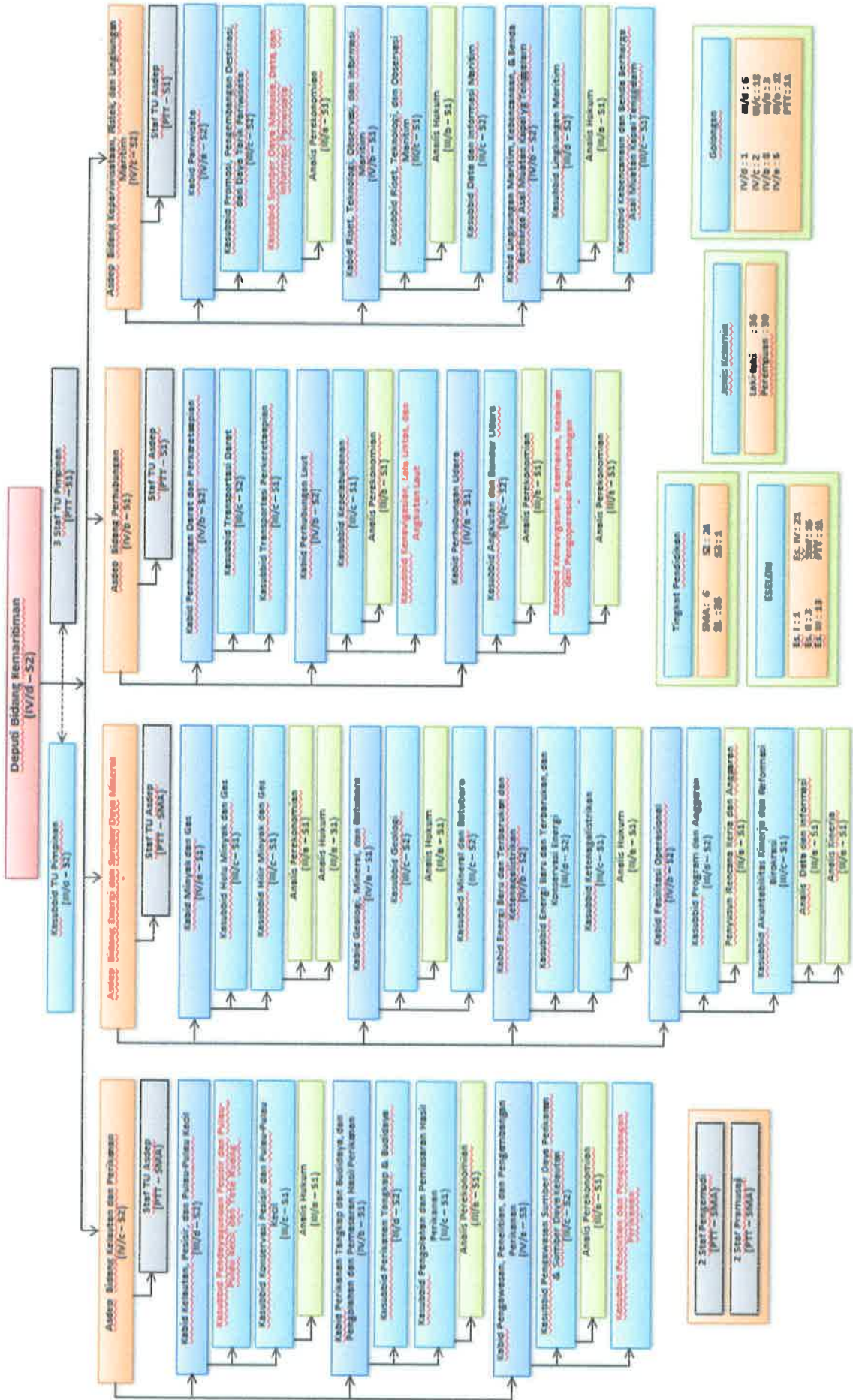
Adapun tugas dan fungsi Asisten Deputi, Bidang dan Subbidang sama dengan Deputi Bidang Kemaritiman namun menyesuaikan dengan bidang masing-masing dan garis koordinasi level di atasnya.

B.2. KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Selama tahun 2019, di Kedeputian Bidang Kemaritiman mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi, dari level eselon II sampai level staf. Pada bulan Februari 2019, Asdep Perhubungan yang sebelumnya kosong dan dijabat oleh Bapak Syafruddin sebagai Plt. Asdep Perhubungan digantikan oleh Ibu Hennie Ambar Susilowati untuk mengisi jabatan Asdep Perhubungan.

Adapun kekuatan sumber daya manusia per 31 Desember 2019 yakni terdiri dari 66 orang 38 orang pejabat struktural, 16 staf dan 9 PTT serta 1 pejabat perbantuan dari Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang bertugas sebagai Tata Usaha Pimpinan.

Selanjutnya untuk Asisten Deputi Bidang Energi Sumber Daya dan Mineral hingga saat ini belum diduduki oleh pejabat definitif. Sementara ini, Bapak Banyu Alam Badru selaku Kepala Bidang Minyak dan Gas merangkap menjadi pelaksana tugas (Plt.) dari Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun Peta Jabatan Kedeputian Bidang Kemaritiman seperti gambar 1



Tingkat Pendidikan

SMA : 6 S1 : 24
 S2 : 36 S3 : 1

ESKORUM

Es. I : 1 Es. IV : 21
 Es. II : 3 Es. V : 26
 Es. III : 3 Es. VI : 26

2 Staf Pengemudi (PTT-50A)

2 Staf Pramuniaga (PTT-50A)

Joni Komara

Laki-laki
 Perencanaan : 30

Goongie

IV/B : 1
 IV/C : 2
 IV/A : 3
 IV/B : 2
 PTT : 11

Gambar 1: Peta Jabatan Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2019

C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS

Dalam sistem presidensial, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, dalam menjalankan roda pemerintahan memerlukan dukungan, baik bersifat teknis, administratif dan pemikiran. Deputy Bidang Kemaritiman sebagai salah satu Eselon I yang berada dibawah Sekretaris Kabinet berperan membantu Sekretaris Kabinet untuk mengelola manajemen kabinet di bidang Kemaritiman dimana memberi dukungan baik bersifat teknis, administratif dan pemikiran tersebut. Sesuai dengan fungsi dari Deputy Kemaritiman, Deputy Bidang Kemaritiman berperan untuk mengendalikan dan memastikan bahwa program-program pemerintah di bidang Kemaritiman berjalan, tercapai dan *ter-delivered* sesuai dengan target program yang telah ditetapkan.

Keterlibatan aktif Deputy Bidang Kemaritiman dalam mewujudkan Sekretariat Kabinet yang andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden ini diwujudkan dengan keterlibatan aktif perumusan rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman, rekomendasi atas izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman selain itu juga upaya pembentukan *omnibus law* sesuai dengan janji Presiden untuk deregulasi peraturan-peraturan yang menghambat. Selain itu, Deputy Kemaritiman juga memberikan dukungan dalam perumusan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman.

Agar tetap mampu mengikuti dinamika dalam pemerintahan baik di lingkungan internal maupun eksternal, Deputy Bidang Kemaritiman berupaya untuk menggali isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang mampu mempengaruhi kinerja organisasi melalui analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, weakness, opportunities, threats*) sebagai berikut:



Gambar 2: Analisis SWOT Deputy Bidang Kemaritiman

Dari hasil analisis SWOT tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja serta menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Deputy Bidang Kemaritiman menentukan langkah-langkah untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan baik dengan cara:

1. Memperluas dan memperkuat *networking* yang efektif dengan para *stakeholder* yakni K/L, pemerintah pusat dan daerah, BUMN, swasta, para pelaku usaha atau pun pihak lain yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah;
2. Melakukan koordinasi, sinergi guna *debottlenecking* dengan para *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui pemantauan, pengamatan langsung, rapat koordinasi, *focus group discussion* dan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah;
3. Pengembangan aplikasi SITAP secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan aplikasi ini merupakan *database* yang mencakup seluruh arahan dan janji Presiden serta digunakan sebagai media *monitoring* tindak lanjut Arahan Presiden dan Janji Presiden di seluruh kementerian dan lembaga;

4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM guna menghasilkan analisis dan usulan rekomendasi kebijakan yang komprehensif melalui diklat/*workshop*/seminar/FGD antara lain analisis kebijakan (RIA, CBA, dll), *legal drafting*, geospasial, serta analisis dan visualisasi data;
5. Penambahan SDM dengan kualifikasi tertentu atau realokasi SDM sesuai dengan analisis beban kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet;
6. Mengusulkan pembangunan dan pengembangan sistem *database* berbasis TI guna menampung data-data hasil *monitoring* dan evaluasi, rapat koordinasi, pemantauan dsb terhadap isu-isu strategis, program prioritas, pelaksanaan Arahannya Presiden dan janji Presiden, serta implementasi RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7. Melakukan *monitoring* capaian kinerja melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) dari level eselon I hingga IV setiap tiga bulan sekali. Pelaksanaan *monitoring* ini sebagai salah satu bentuk perwujudan reformasi birokrasi yang ada di Kedeputian Bidang Kemaritiman. Tata cara *monitoring* tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pekerjaan perhitungan capaian kinerja yang ada di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman sebagaimana yang akan dijelaskan lebih rinci pada Bab III.

PERENCANAAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM

Terwujudnya tujuan organisasi didasari adanya manajemen kinerja yang baik. Manajemen kinerja merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi tepat sasaran, mulai dari perencanaan kinerja, *monitoring* kinerja, penilaian dan evaluasi kinerja.

Perencanaan kinerja berisi mengenai sasaran, indikator sasaran, program/Kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Perencanaan kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Kemaritiman tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Deputy Bidang Kemaritiman selama jangka waktu tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra Deputy Bidang Kemaritiman melalui Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dengan Surat Keputusan Nomor: SK.01/MARITIM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, yang bertugas menyusun Renstra Deputy dan Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman.

A.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Kemaritiman tahun 2015-2019 disusun dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengelolaan manajemen kabinet dalam mendukung keberhasilan pencapaian 7 (tujuh) misi pembangunan dan agenda prioritas Kabinet Kerja yang dikenal dengan NAWACITA. Dimana visi Sekretariat Kabinet yaitu menjadikan Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintah, dan misinya yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, berikut perencanaan kinerja yang ditetapkan pada Deputy Bidang Kemaritiman pada Renstra:



Gambar 3: Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman

A.2. PERJANJIAN KINERJA

Target kinerja tahunan yang dituangkan pada Rencana Strategis, kemudian menjadi acuan untuk menyusun Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman setiap tahun.

Perjanjian Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Perjanjian kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan

kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target 100 persen.

Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang terdiri dari sasaran program/kegiatan, indikator kinerja utama (IKU) dan target dimana indikator kinerja tersebut telah diselaraskan dengan IKU Sekretariat Kabinet. Perjanjian Kinerja tersebut disusun melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Adapun Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen

Gambar 4: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2019

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Perjanjian Kinerja dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Kabinet terdapat perubahan pada makna penilaian *outcome* yaitu dietujui. Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan, baik sasaran strategis maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 yang tertuang pada Perseskab nomor 1 tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018, Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diselaraskan dengan IKU Sekretariat

Kabinet yang sebelumnya “ditindaklanjuti” menjadi “disetujui”. Adapun sasaran strategis dan IKU tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pereskab Nomor 1 tahun 2017 gambar 5 berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dalam persiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; persiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pemantauan, pengamatan, serta penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman.</p> <p>Disetujui berarti: Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman dengan mengajukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$</p>
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disetujui Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dalam persiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RPUU) di bidang kemaritiman.</p> <p>Disetujui berarti: Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum Deputi Bidang Kemaritiman terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU, dengan mengajukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p>

Gambar 5: Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang kemaritiman yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet</p>
		<p>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dalam penyusunan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mengajukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi penghitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet.</p>

Lanjutan Gambar Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kemaritiman

Dari 3 (tiga) IKU tersebut, dijabarkan secara rinci melalui indikator sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja, yang diukur melalui indikator yaitu “disetujui. Sesuai dengan IKU tersebut, disetujui bermakna Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman. Namun pada tahun 2019 ini, ada perubahan pengertian “disetujui”. Perubahan ini dituangkan pada dokumen Manual Indikator Deputi Bidang Kemaritiman. Pengertian tersebut menjadi **Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/memanfaatkan memorandum rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman.**

Perubahan ini dibuat sesuai dengan saran Menteri PANRB melalui surat Nomor B/646/M.AA.05/2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang disampaikan oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi kepada setiap unit kerja di lingkungan

Sekretariat Kabinet melalui memorandum Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi nomor M.536/Adm-3/09/2018 tanggal 21 September 2018. Masukan tersebut dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di Sekretariat Kabinet, adapun saran tersebut yaitu Sekretariat Kabinet perlu melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja mulai dari level instansi/pimpinan/kepala unit kerja sampai dengan indikator kinerja di level individu pegawai dengan memperhatikan proses bisnis yang ada.

Adanya *cascade down* tersebut, Sekretariat Kabinet sekaligus dianjurkan membuat rumusan indikator pada level Eselon III ke bawah yang bersifat *outcome* yang dituangkan dalam dokumen Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya dokumen manual indikator kinerja tersebut digunakan sebagai dasar dalam menghitung capaian masing-masing pejabat pegawai sampai level staf. Pada dokumen manual indikator kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target sesuai yang tertuang pada perjanjian kinerja, definisi “disetujui”, sumber data, cara menghitung, dan satuan perhitungan. Berikut Manual Indikator Deputy Bidang Kemaritiman tahun 2019.

Penanggung Jawab: Deputy Bidang Kemaritiman

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Terdapatnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
Definisi		
IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pemantauan, pengamatan, serta penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di Bidang Kemaritiman. Disetujui berarti: Sekretaris Kabinet menyetujui/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/merespon memorandum/ memanfaatkan rekomendasi kebijakan Deputy Bidang Kemaritiman dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kemaritiman, dengan mengajukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau KL.		
Sumber Data		
Kedeputan Bidang Kemaritiman (Rekapitulasi memorandum Deputy Bidang Kemaritiman)		
Cara Menghitung		
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman yang disampaikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$		
Satuan		
Persen		

Gambar 6: Manual Indikator Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang diukur dengan membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman adalah “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman”. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Deputi Bidang Kemaritiman menggunakan indikator kinerja yang telah dijelaskan seperti pada bab II yaitu “disetujui oleh Sekretaris Kabinet” yang terbagi menjadi 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman;
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman;
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman.

Secara garis besar, pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan, berikut penjelasannya:

- a. **Top down** artinya diukur mulai adanya disposisi/arahan Sekretaris Kabinet sampai dengan diteruskannya saran kebijakan kepada *stakeholders*.
- b. **Bottom up** artinya diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diteruskannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholders*.

Perhitungan capaian sasaran strategis untuk “disetujui” dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Gambar 7: Rumus perhitungan capaian sasaran strategis

*Definisi disetujui sesuai dengan makna disetujui yang tertuang dalam dokumen manual indikator kinerja dan sesuai dengan kesepakatan Rapat di dalam kantor di luar Jam Kerja (RDK) 5 Desember 2018.

Adapun kesepakatan RDK 5 Desember 2018 yang dipimpin oleh Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan *output* dan *outcome* sebagai berikut:

1. *Output* Deputi
 - a. Memorandum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet yang berisi rekomendasi
 - b. Surat Deputi kepada Kementerian/Lembaga
2. *Outcome* Deputi
 - a. Memorandum yang berisi rekomendasi Sekretaris Kabinet kepada Presiden
 - b. Surat Sekretaris Kabinet kepada Kementerian/Lembaga
 - c. Surat Deputi kepada Kementerian/Lembaga
3. Undangan dan memorandum bersifat administrasi tidak dihitung sebagai *output*

Tabel 1: Capaian Sasaran Strategis

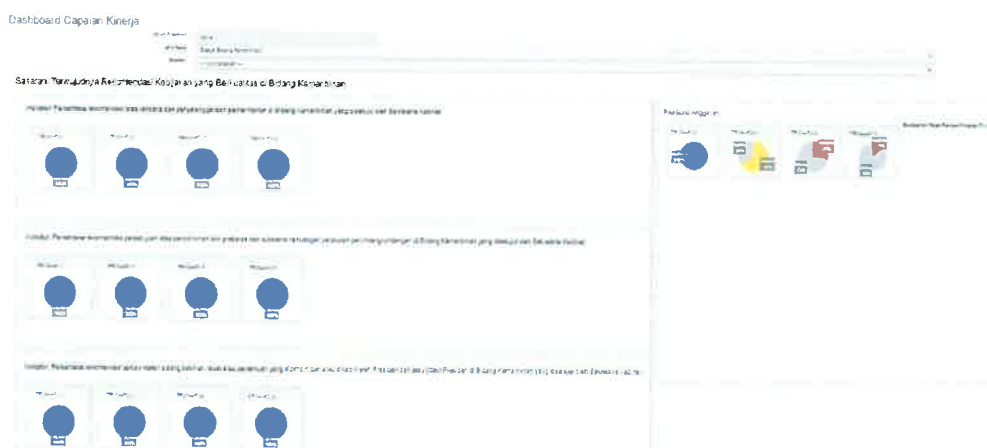
Indikator sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Kemaritiman telah menghasilkan *output* 291 berkas rekomendasi. Dari 291 berkas rekomendasi tersebut, terdapat 291 berkas rekomendasi juga yang menjadi *outcome*. Berikut rincian perbandingan target dan realisasi 2019:

Tabel 2: Capaian Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2019

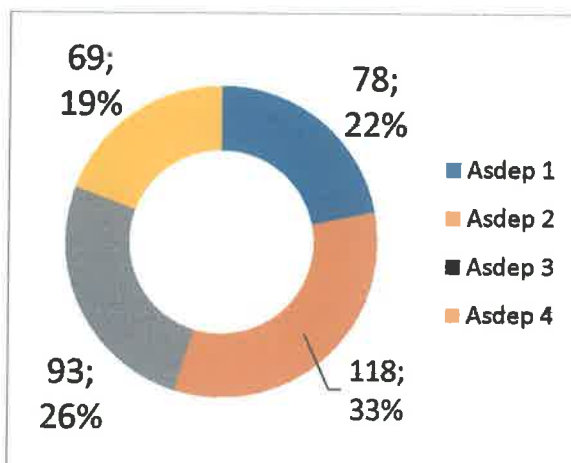
Indikator Kinerja Utama	Target sesuai di		Realisasi	
	Perjanjian Kinerja	Jumlah output	Jumlah outcome	Capaian %
Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman	100%	199	199	100%
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman	100%	15	15	100%
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman	100%	77	77	100%
Total		291	291	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu Januari – Desember 2019 terdapat 291 berkas yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet artinya 291 berkas rekomendasi tersebut 100% telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau telah disampaikan kepada pihak lain (Deputi lain, Kementerian dan Lembaga, dan *stakeholder* lain) serta telah disetujui, direspon, dan dimanfaatkan. Capaian tersebut selalu dimonitor melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) secara triwulanan. Berikut dashboard SIKT Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2019 :



Gambar 8: Dashboard SIKT Deputi Bidang Kemaritiman

Adapun capaian Deputy Bidang Kemaritiman tersebut merupakan kontribusi dari setiap keasdepan sebagaimana tergambar di bawah ini:



Gambar 9: Kontribusi setiap Asdep pada capaian Deputy Bidang Kemaritiman

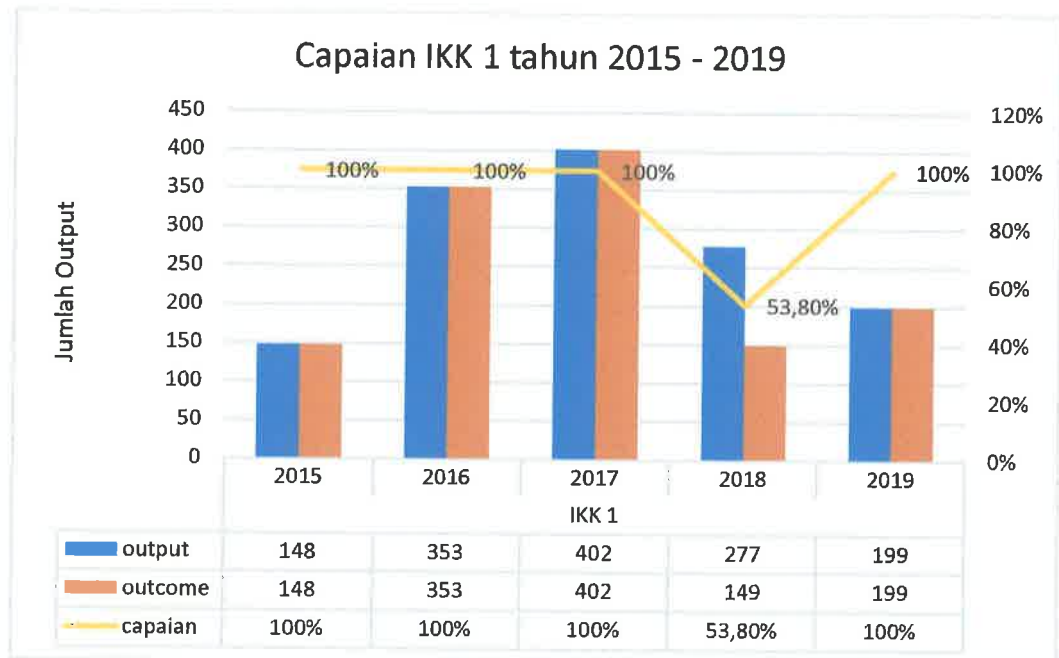
Dari grafik di atas menunjukkan bahwa total kontribusi setiap Asdep bukan total jumlah rekomendasi yang dihasilkan Deputy Bidang Kemaritiman. Hal tersebut dikarenakan bahwa 1 (satu) rekomendasi yang dihasilkan oleh Deputy Bidang Kemaritiman belum tentu hanya kontribusi dari 1 keasdepan saja. Namun, sangat mungkin 1 rekomendasi tersebut merupakan kontribusi dari keempat Asisten Deputi dan yang mengompilasi hanya salah satu keasdepan.

A.1. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PER IKU TAHUN 2015-2019

A.1.1. PERBANDINGAN CAPAIAN REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan hasil analisis, pemantauan, evaluasi atas rencana pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman. Rekomendasi yang disampaikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Sekretaris Kabinet berarti kinerja Deputy Bidang Kemaritiman semakin tinggi. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan rekomendasi kepada *stakeholder*, dalam hal ini Presiden,

Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator dalam Sasaran Strategis berbunyi “Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet ”, dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet. Berikut perbandingan capaian *output* dan *outcome* IKK 1 Deputy Bidang Kemaritiman dari tahun 2015-2019 :

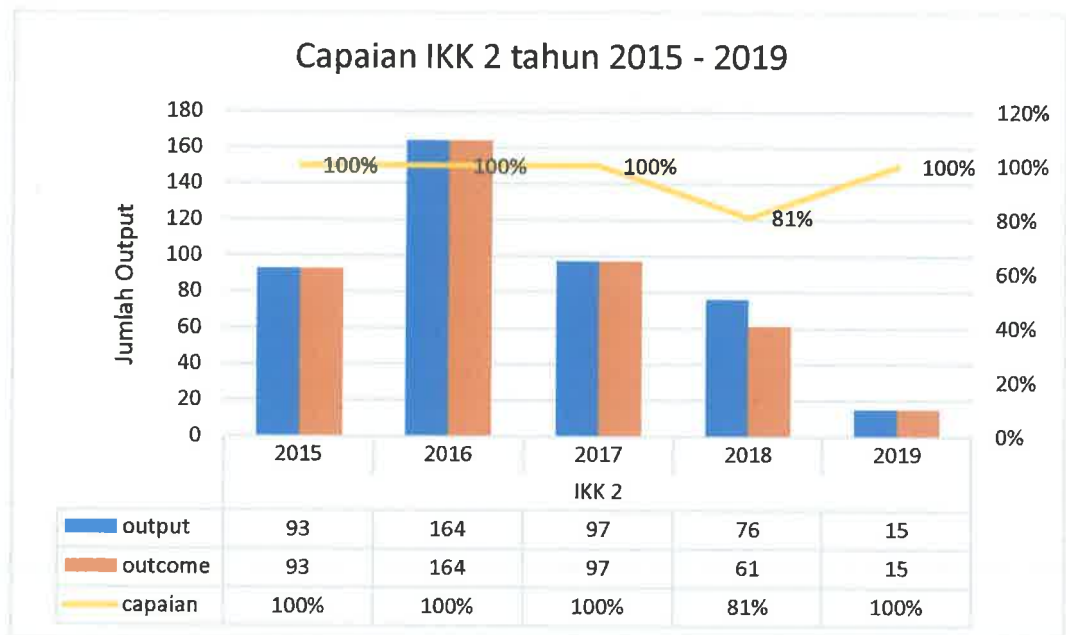


Gambar 10: Perbandingan capaian IKK 1 tahun 2015 - 2019

Dari grafik di atas, terlihat terdapat naik turun jumlah *output* dan *outcome* selama tahun 2015-2019. Pada tahun 2015-2017 Sekretariat Kabinet banyak menangani permasalahan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 34 provinsi sehingga pada tahun 2015 ke tahun 2017 banyak menyelenggarakan pra Rapat Terbatas. Pada tahun 2018-2019 tidak sebanyak 3 tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2018 dan 2019 mulai berfokus melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan di berbagai sektor khususnya di bidang kemaritiman. Selain itu penurunan juga disebabkan pada bulan Agustus tahun 2018 telah memasuki tahun politik yaitu dibukanya pendaftaran Capres/Cawapres dan di tahun 2019 pemerintah. Selain itu pada tahun 2018 dan 2019 juga terdapat perbedaan metode perhitungan *outcome* yang mana pada tahun 2018 dan 2019 sudah menekankan pada hasil.

A.1.2. PERBANDINGAN CAPAIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PUU

Indikator persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Berikut perbandingan capaian *output* dan *outcome* IKK 2 Deputi Bidang Kemaritiman dari tahun 2015 – 2019 dan rincian produk perundang-undangan yang dihasilkan Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2019:

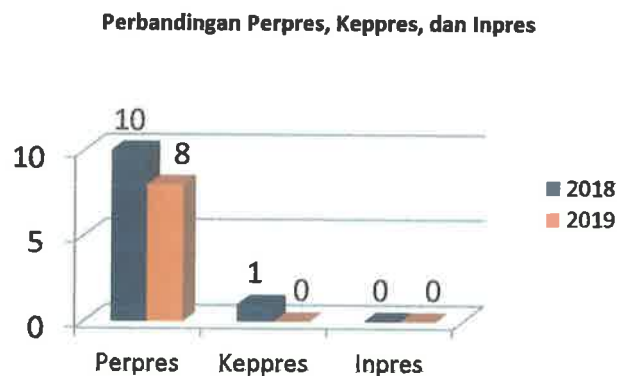


Gambar 11 : Perbandingan capaian IKK 2 Tahun 2015 – 2019

Tabel 3: Perundang-undangan yang dihasilkan Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2019

No	Nomor	Perihal	Keterangan
1	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019	Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>)	Penetapan 25 Januari 2019
2	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019	Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	Penetapan 23 Januari 2019
3	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019	Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Penetapan 22 April 2019
4	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019	Peta Panduan (<i>Road Map</i>) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021	Penetapan 20 Mei 2019
5	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019	Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran	Penetapan 12 Juni 2019
6	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019	Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) Untuk Transportasi Jalan	Penetapan 8 Agustus 2019
7	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019	Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025	Penetapan 14 Agustus 2019
8	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019	Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang	Penetapan 20 November 2019

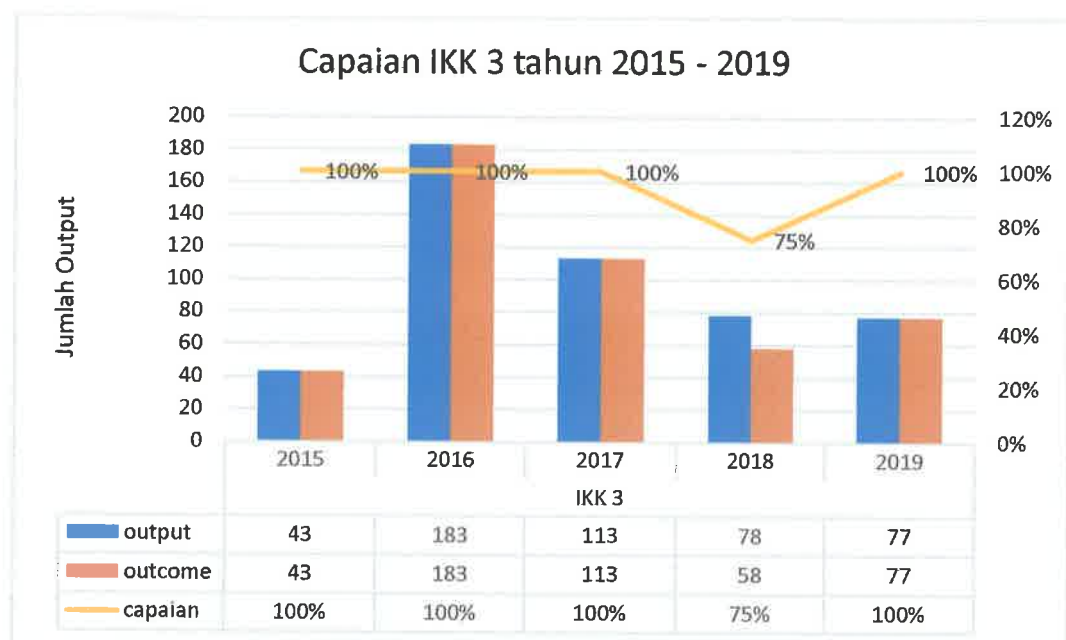
Berikut perbandingan jumlah produk Perpres, Keppres, dan Inpres Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2018 dan 2019:



Dari hasil capaian dan jumlah produk izin prakarsa yang dihasilkan pada tahun 2019, menunjukkan produk yang dihasilkan Deputi Bidang Kemaritiman mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terbitnya Perpres Nomor 24 Tahun 2015 tentang 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang menunjukkan terdapatnya dinamika proses peraturan perundang-undangan secara berangsur beralih penanganannya di Kementerian Sekretariat Negara.

A.1.3. PERBANDINGAN CAPAIAN TERKAIT MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Indikator persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi materi sidang kabinet yang akan digunakan untuk Rapat Terbatas, rapat internal, atau pertemuan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam audiensi, kunjungan kenegaraan, forum internasional, dan forum nasional. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja utama ketiga selama tahun 2015 – 2019 :



Gambar 12: Perbandingan capaian IKK 3 Tahun 2015 -2019

Tabel 4: Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2015 - 2019

UNIT	SASARAN	INDIKATOR*	2019			2018			2017			2016**			2015**		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
DEPUTI	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang Maritim	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan Pemerintah dibidang Maritim yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Maritim yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%	100%	100%	100%	53,80%	53,80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat, pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Maritim yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari grafik diatas terlihat terdapat penurunan jumlah *output* dan *outcome* pada 2 (dua) tahun terakhir dibanding 3 tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 dan 2019 mulai masuk tahun politik yaitu pendaftaran kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, pada tahun 2019, Presiden juga fokus untuk melakukan kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2020 – 2024. Sedangkan pada 3 (tiga) tahun pertama Presiden sering mengadakan pra Ratas terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.


A.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA BEBERAPA TAHUN TERAKHIR SESUAI DENGAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2015-2019


Sebagaimana target *output* pada Renstra Deputy Bidang Kemaritiman tahun 2015 – 2019, pada tahun 2015-2017 capaian Deputy Bidang Kemaritiman masih menekankan pada target *output*. Dan mulai tahun 2018 dan 2019 sudah berubah menjadi target hasil (*outcome*). Berikut perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Deputy Bidang Kemaritiman:

A.3. GAMBARAN CAPAIAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN

A.3.1. REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGARAAN PEMERTINTAHAN DI BIDANG KEMARITIMAN

No	Isu	Rekomendasi
Bidang Kelautan dan Perikanan		
1	<p>Penetapan Otoritas Pengelola Biota Akuatik <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman turut aktif dalam penyelesaian permasalahan penentuan pengelola otorita CITES Perairan karena belum adanya kesepakatan instansi pengelola biota akuatik yang diatur dalam oleh CITES. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur bahwa otoritas pengelola CITES di Indonesia adalah Menteri Kehutanan. Sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan mengatur bahwa Otoritas Pengelola Konservasi Sumber Daya Ikan adalah kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan. 2. Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 9 dan 17 Mei 2019 dan disepakati untuk meminta masukan dari LIPI selaku Otoritas Keilmuan CITES perihal definisi dan jenis biota akuatik. 3. Berdasarkan masukan LIPI, Sekretariat Kabinet merekomendasikan kepada Kemenko Bidang Kemaritiman bahwa perlu penyempurnaan substansi PP Nomor 7 Tahun 1999 dan PP Nomor 8 Tahun 1999, dengan memasukkan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Otoritas Pengelola selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga kedua PP tersebut dapat menjembatani pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kemenko Kemaritiman dengan


No	Isu	Rekomendasi
		<p>rencana penyelenggaraan Rakortas.</p>  <p><i>Gambar 13: Rapat CITES tanggal 9 Mei 2019 dan 17 Mei 2019</i></p>
2	<p>Sistem Logistik Ikan Nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Kabinet melalui Deputy Bidang Kemaritiman melaksanakan kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah dan penguatan Sistem Logistik Perikanan dalam bentuk pemantauan ke pelabuhan perikanan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku, dan Sulawesi Selatan. 2. Dari hasil pemantauan tersebut, disusun rekomendasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. perlunya simplifikasi perizinan sektor perikanan tangkap, dengan mengintegrasikan sektor-sektor terkait; b. adanya kebijakan bersama antar kementerian serta pemerintah daerah, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang perizinan usaha perikanan tangkap; c. pengembangan tata kelola pelabuhan perikanan yang

No	Isu	Rekomendasi
		<p>terintegrasi, sehingga dapat setara dengan tata kelola pelabuhan umum (Pelindo) yang sudah lebih tertata; dan</p> <p>d. perlunya perubahan pengelolaan UPT Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh KKP/Pemda agar menjadi pelabuhan yang lebih profesional.</p>  <p><i>Gambar 14: Pemantauan tentang sistem logistik ikan nasional ke Muara Angke</i></p>
3	<p>Monev Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka <i>monitoring</i> dan evaluasi kebijakan, Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan diskusi dengan para akademisi untuk mendapatkan masukan terhadap kebijakan eksisting dan penyusunan kebijakan di masa mendatang. Kegiatan diskusi tersebut terselenggara melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) ke beberapa Universitas yang <i>concern</i> terhadap isu perikanan, diantaranya Institut Pertanian Bogor, Universitas Pattimura-Ambon, Universitas Diponegoro-Semarang, dan Universitas Hasanuddin-Makassar. 2. Dari hasil FGD tersebut, disusun rekomendasi diantaranya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu adanya integrasi konektivitas antar pelabuhan dan pembentukan strata pelabuhan (utama, pengumpul, dan pengumpan) agar sistem logistik perikanan lebih efektif; b. Perlu adanya keselarasan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pelabuhan;

No	Isu	Rekomendasi
		<p>c. Dibutuhkan penambahan <i>cold storage</i>, karena yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menampung stok ikan, terutama saat musim penangkapan ikan. Hal tersebut mengakibatkan harga ikan di pasar menjadi fluktuatif (ikan membusuk, tidak tertangani dengan baik, dll);</p> <p>d. Dibutuhkan diseminasi informasi yang lengkap secara <i>realtime</i>, yang meliputi <i>data supply and demand</i> produksi perikanan dalam rangka menunjang distribusi/pemasaran (volume, harga, lokasi, ketepatan waktu, dan jaminan mutu);</p> <p>e. Masih dibutuhkan industri galangan kapal perikanan yang tersebar secara nasional untuk memenuhi kebutuhan kapal perikanan nasional. Kondisi saat ini, pelaku usaha yang berasal dari Ambon harus memesan kapal di Makassar, sehingga berdampak pada biaya operasional yang tinggi dan kurang efisien ketika terjadi kerusakan kapal yang membutuhkan perbaikan;</p> <p>f. Prosedur perizinan agar dapat terlaksana sesuai dengan SOP pada Permen KP usaha perikanan tangkap, khususnya terkait jangka waktu prosedur;</p> <p>g. Perlu adanya pendampingan atau pengawasan dari PSDKP pada saat proses pendaratan ikan (bongkar muat hasil perikanan dari kapal penangkap ikan), mengingat selama ini pengusaha menghitung sendiri (ditimbang secara konvensional) hasil tangkapannya. Hal tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memanipulasi data, yang berdampak pada kurang validnya <i>database</i> produksi ikan nasional;</p> <p>h. Perlunya money bantuan KUR Nelayan.</p>



No	Isu	Rekomendasi
		
4	<p>Kelangkaan BBM Bersubsidi Bagi Nelayan Kecil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan evaluasi lainnya dilakukan terhadap penyaluran BBM Subsidi di Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan fakta di lapangan adanya kekurangan stok BBM subsidi untuk nelayan, diantaranya disebabkan panjangnya antrian pembelian Solar Bersubsidi di daerah nelayan <i>one day fishing</i>, adanya pungutan liar oleh oknum petugas terhadap nelayan yang membeli Solar Bersubsidi menggunakan transportasi darat, dan keluhan sulitnya nelayan harus menempuh jarak yang jauh dari remote area untuk mengurus surat rekomendasi pembelian Solar Bersubsidi di DKP Kabupaten/Kota, serta adanya peredaran BBM ilegal yang harganya lebih murah sehingga mengurangi minat nelayan membeli BBM resmi dari Pertamina. 2. Untuk menyelesaikan tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman secara aktif mendorong PT Pertamina (Persero) untuk bersedia mendukung pembangunan SPBN di daerah komunitas nelayan. Hal tersebut telah ditindaklanjuti PT Pertamina (Persero) dengan mendukung komunitas nelayan di Tambak Lorok dan Pemerintah Kota Semarang untuk membangun SPBN seperti beberapa SPBN di Jawa Tengah yang dibangun dan dioperasikan oleh Koperasi Unit Desa. 3. Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Aparat Penegak Hukum akan


No	Isu	Rekomendasi
		<p>bekerjasama untuk menertibkan peredaran BBM ilegal di Tambak Lorok dan mengoordinasikan rekomendasi pembangunan SPBN yang akan diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.</p> <p>4. Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat nomor B.0125/Seskab/ Maritim/03/2019 kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas agar mengatur penyediaan dan pendistribusian BBM kepada nelayan kecil di PPI Tambak Lorok, Jawa Tengah.</p>
5	<p>Pengendalian Impor Garam</p>	<p>Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, pada awal tahun 2019 Deputi Bidang Kemaritiman turut serta dalam pemantauan lapangan sebagai langkah kegiatan evaluasi hasil verifikasi data stok garam nasional akhir 2018/awal 2019 pada tanggal 22-25 Januari 2019 ke beberapa sentra produksi garam, serta industri pengolah dan pengguna garam di Demak, Pati, dan Rembang. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, diketahui bahwa para petambak garam sedang berupaya memenuhi kebutuhan garam industri untuk menggantikan kebutuhan garam impor, namun masih terkendala mahal nya biaya produksi dalam upaya pemenuhan kebutuhan.</p>
6	<p>Kebijakan Satu Peta Bidang Kemaritiman</p>	<p>1. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, disusun Peta Tematik Bidang Kemaritiman sebagai dasar perencanaan dan/atau pelaksanaan program/kegiatan dari masing-masing kementerian/lembaga, diselaraskan dengan Peta Tematik untuk matra darat.</p> <p>2. Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman telah terlibat secara aktif dalam berbagai agenda</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>pembahasan untuk mengupayakan agar penyusunan Peta Tematik Bidang Kemaritiman dapat diintegrasikan dalam Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta melalui perubahan atas Perpres Satu Peta (Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor B-0152/Seskab/ Maritim/04/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Untuk peta Tematik Bidang Kemaritiman).</p>  <p><i>Gambar 16: Rapat Kebijakan Satu Peta</i></p>
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Perkembangan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan BBM nasional serta mengurangi ketergantungan impor BBM, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri melalui Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015. Melalui penugasan kepada PT Pertamina, pemerintah menargetkan pembangunan 2 (dua) kilang minyak/<i>Grass Root Refinery (GRR)</i> yaitu GRR Tuban dan GRR Bontang dan peningkatan kapasitas 4 (empat) kilang minyak lama/<i>Refinery Development Masterplan (RDMP)</i> yaitu RDMP Dumai, RDMP Balongan, RDMP Cilacap, dan RDMP Balikpapan. 2. Dalam pelaksanaannya pembangunan kilang minyak tidak mudah dilakukan, mengingat kebutuhan biaya investasi yang cukup tinggi dengan pengembalian

No	Isu	Rekomendasi
		<p>investasi yang cukup panjang, sulit untuk mencari investor. Beberapa permasalahan yang dialami dalam pembangunan dan pengembangan kilang minyak antara lain: perbedaan valuasi aset antara PT Pertamina dan Saudi Aramco dalam proyek RDMP Cilacap; ketidaksesuaian Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), AMDAL, dan adanya permasalahan dalam proses pengadaan lahan pada proyek pembangunan GRR Tuban.</p> <p>3. Guna percepatannya Presiden kerap kali memberikan arahan dalam Rapat Terbatas yang intinya agar pembangunan kilang minyak segera terwujud, untuk itu kementerian/lembaga membantu PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan dalam membangun kilang minyak di dalam negeri. Namun, sampai dengan akhir periode Kabinet Kerja belum ada satu pun kilang yang dibangun oleh PT Pertamina (Persero).</p> <p>4. Guna percepatan penyelesaian permasalahan-permasalahan di atas, dan dalam menjalankan amanat Inpres 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian/Negaran dan Lembaga Pemerintah, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden. Atas dasar tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman beberapa kali menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. Rapat Realisasi Kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi pada proyek RDMP Kilang Cilacap dengan mengundang kementerian/lembaga terkait dan PT Pertamina (Persero) yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2019. Rapat ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden yang</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>menyampaikan bahwa permasalahan perbedaan valuasi aset kilang pada proyek RDMP Cilacap agar dapat diselesaikan dan jika tidak ada kesepakatan maka diberikan opsi kerja sama di sektor lain. Hasil dari rapat bahwa PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan bentuk kerja sama lain dengan Saudi Aramco yaitu dengan menawarkan skema bisnis menjadi <i>tolling no-spin-off</i> atau <i>merchant no-spin-off</i>,</p> <p>b. Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pembangunan Kilang Minyak dengan mengundang Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), yang diselenggarakan pada Kamis, 5 September 2019. Rapat tersebut dimaksudkan untuk memonitor progres pembangunan RDMP Balikpapan dan kesiapan Rencana Peresmian Proyek Langit Biru Cilacap;</p> <p>c. Rapat Percepatan Pembangunan/Pengembangan Kilang Minyak dan Proyek Petrokimia dengan mengundang kementerian/lembaga terkait, yang diselenggarakan pada Jum'at, 6 Desember 2019. Rapat menyepakati aksi-aksi yang perlu dilakukan oleh kementerian/lembaga guna percepatan pembangunan/pengembangan kilang minyak dan proyek petrokimia;</p> <p>d. Rapat dan Peninjauan Lapangan Guna Dukungan Percepatan Pembangunan GRR Tuban dengan mengundang kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, yang diselenggarakan pada Selasa, 17 Desember 2019. Hasil dari kegiatan</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>tersebut disepakatinya aksi-aksi yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terkait serta PT Pertamina (Persero) guna percepatan pembangunan <i>Grass Root Refinery</i> (GRR) Tuban, antara lain percepatan revisi Perda RTRW Kabupaten Tuban.</p>  <p><i>Gambar 17: Rapat Percepatan Pembangunan/Pengembangan Kilang Minyak dan Proyek Petrokimia, Kantor Sekretariat Kabinet</i></p>  <p><i>Gambar 18: Kunjungan lokasi ke Proyek GRR Tuban, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban</i></p>

No	Isu	Rekomendasi
		 <p data-bbox="592 696 1461 768"><i>Gambar 19: Rapat dukungan percepatan pembangunan GRR Tuban di Fave Hotel Kabupaten Tuban</i></p>
2	<p data-bbox="304 815 504 1173">Dukungan terhadap peningkatan kehandalan Penyediaan Listrik Jawa-Bali</p>	<p data-bbox="592 815 1461 1402">1. Tanggal 4 Agustus 2019, terjadi pemadaman listrik total (<i>black out</i>) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Pemadaman listrik terjadi sejak pukul 11.45 WIB dan mengakibatkan semua kegiatan yang bergantung pada listrik menjadi lumpuh. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah layanan publik, transportasi, perbelanjaan hingga perbankan. Akibat pemadaman listrik tersebut, Presiden mengadakan Inspeksi yang disertai Rapat Internal bersama jajaran Direksi PT PLN (Persero) pada 5 Agustus 2019, dan memberikan arahan agar PT PLN (Persero) dapat:</p> <ol data-bbox="632 1420 1461 1850" style="list-style-type: none"> a. Menghitung dan mengkalkulasi potensi resiko yang muncul akibat padamnya listrik; b. Secepatnya memperbaiki kerusakan infrastruktur pembangkit listrik dan memastikan agar semua wilayah yang sebelumnya terdampak listrik padam dapat menjadi normal; dan c. Memastikan hal-hal menjadi penyebab peristiwa besar padamnya listrik di wilayah tidak terulang kembali. <p data-bbox="616 1868 1461 2074">Deputi Bidang Kemaritiman – Sekretariat Kabinet kemudian menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut dengan melakukan kunjungan ke kantor PT PLN (Persero) bersama Kementerian BUMN pada tanggal 15</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>Agustus 2019, guna meminta penjelasan PT PLN (Persero) mengenai tindak lanjut Arahan Presiden. Dalam kunjungan tersebut, PT PLN (Persero) telah menyampaikan usulan perbaikan ke depan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PT PLN (Persero) agar dapat melakukan pemotongan pohon yang mendekati ruang Bebas Jaringan Transmisi (<i>Right of Way/RoW</i>) b. Mengubah Peraturan Menteri ESDM menjadi Peraturan Presiden yang memberikan kemudahan PT PLN (Persero) untuk melakukan pemotongan pohon tersebut. <p>Menindaklanjuti usulan perbaikan tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan pengkajian pengaturan RoW yang saat ini diatur dalam Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2015 jo. Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTAS untuk Penyaluran Tenaga Listrik. Permen ESDM tersebut kurang efektif dan perlu dilakukan integrasi aturan Permen ESDM ke dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, guna mengakomodir pemanfaatan ruang di bawah RoW transmisi selain tapak.</p> <p>2. Pada tanggal 28 Agustus 2019, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang di bawah RoW transmisi dan Jarak Bebas Minimum transmisi, yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT PLN (Persero).</p>  <p><i>Gambar 20: Suasana rapat identifikasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang di bawah RoW transmisi dan Jarak Bebas Minimum transmisi tanggal 28 Agustus 2019 di Jakarta</i></p> <p>3. Dalam rapat tersebut, diperoleh beberapa kesepakatan yang telah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait melalui Surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0333 tanggal 11 September 2019. Kesepakatan rapat dimaksud adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Diperlukan kebijakan guna pengamanan transmisi existing dari tanaman, bangunan, dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu beroperasinya transmisi melalui penambahan pengaturan Peraturan Zonasi pada RoW dalam RTR Wilayah, untuk itu kiranya segera ditindaklanjuti:</p> <p>1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN</p> <p>a) merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>Strategis Nasional;</p> <p>b) dalam proses persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) memastikan terdapat pengaturan tentang Peraturan Zonasi pada wilayah RoW khususnya bagi daerah yang dilintasi jaringan transmisi.</p> <p>2) Menteri Dalam negeri</p> <p>a) berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN menyampaikan kepada Pemerintah Daerah, yang wilayahnya dilintasi transmisi, agar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) wilayahnya memuat pengaturan Peraturan Zonasi pada RoW, dan pada saat evaluasi Raperda RTR Provinsi/Kabupaten/Kota memastikan pengaturan tersebut telah diakomodir;</p> <p>b) menerbitkan surat edaran atau menghimbau Kepala Daerah agar melakukan edukasi kepada masyarakat yang tinggal dan/atau memiliki lahan di wilayah RoW agar turut berpartisipasi dalam pengamanan transmisi, sebelum Peraturan Zonasi ditetapkan dalam RTR Wilayah ataupun RTR Kawasan Strategis Nasional.</p> <p>c) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>a) mengkaji pemberian insentif dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) kepada pemilik lahan pada RoW, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan transmisi;</p> <p>b) apabila terdapat bangunan, tanaman dan/atau bentuk fisik lainnya yang berpotensi mengganggu beroperasinya transmisi, maka perlu dikaji Peraturan Perundang-undangan</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> - yang dapat menugaskan PT PLN (Persero) untuk memberikan kompensasi pada pemilik lahan RoW sebelum ditetapkan RTRW yang mengakomodir Peraturan Zonasi dalam Perda RTRW; - terkait pemberian kompensasi kepada pemilik lahan RoW transmisi <i>existing</i> oleh PT PLN (Persero) selaku pemegang IUPTL, setelah ditetapkannya Perda RTRW (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang telah memuat Peraturan Zonasi RoW. <p>c) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Kepolisian Negara RI dan Pemerintah Daerah secara terus menerus melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Zonasi pada RoW dimaksud.</p> <p>4. Diperlukan dukungan guna percepatan pembangunan jaringan transmisi 500 kV dari Tanjung Jati-Cibatu Baru sepanjang 537 km sebagai back-up transmisi <i>existing</i>, untuk itu kiranya;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Menteri Dalam Negeri membantu penyelesaian masalah pertanahan pembangunan transmisi (antara lain untuk pembangunan tapak <i>tower</i> dan pemanfaatan tidak langsung untuk RoW); b. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan (c.q Panglima TNI) dan memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing. <p>5. Berkaitan dengan surat Sekretaris Kabinet nomor</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>B.0333 tanggal 11 September 2019 tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Oktober 2019 kepada Gubernur di seluruh provinsi di Indonesia agar melakukan edukasi dan pengamanan ruang di bawah RoW Jaringan Transmisi Tenaga listrik melalui pengaturan pemanfaatan ruang di bawah RoW dalam kerangka penataan ruang di daerah masing-masing.</p> <p>6. Dikarenakan belum terdapat tindak lanjut dari kementerian/lembaga lain, Deputi Bidang Kemaritiman kembali menyelenggarakan rapat pada tanggal 25 November 2019 guna meminta klarifikasi terhadap kementerian/lembaga terkait tindaklanjut kesepakatan rapat tanggal 28 Agustus 2019. Didalam rapat diperoleh informasi bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota telah mengakomodir kebutuhan sektor untuk ketentuan pemanfaatan ruang pada zona yang dilewati sistem jaringan sarana prasarana ketenagalistrikan. Selain itu, masih diperlukan berbagai upaya untuk mendorong pengamanan ruang di bawah RoW jaringan transmisi tenaga listrik. Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kesepakatan rapat tersebut melalui surat Nomor B-1016 tanggal 28 November 2019. Kemudian, PT PLN (Persero) menindaklanjuti dengan menyampaikan daftar usulan sarana prasarana ketenagalistrikan sebagai Objek Vital Nasional kepada Kementerian ESDM melalui surat nomor 1734/MNJ.02.02/010000/2019 tanggal 23 Desember 2019.</p>

No	Isu	Rekomendasi
		 <p data-bbox="592 622 1461 696"><i>Gambar 21: Suasana rapat Klarifikasi Tindak lanjut Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-0333 yang dilaksanakan di Sekretariat Kabinet tanggal 25 November 2019 di Jakarta</i></p>
3	Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Thorium	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="592 741 1461 1167">1. Kepala Perwakilan Thorcon International Pte. Ltd dengan surat Nomor: S-010819/ThorConIndonesia/8/2019 tanggal 5 Agustus 2019 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan audiensi. Inti surat adalah ThorCon International Pte. Ltd. adalah berniat mendorong implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) dengan mengajukan proposal untuk menjadikan PLTT sebagai Program Nasional. <li data-bbox="592 1178 1461 2051">2. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan surat Nomor: R-139/Sesjen/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 kepada Presiden juga menyampaikan kajian Optimalisasi Pemanfaatan Energi Thorium Guna Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. Inti surat Sekjen Wantannas adalah: pertama, Mengoptimalkan pemanfaatan energi Thorium dalam mengatasi proyeksi kebutuhan energi nasional yang meningkat di masa datang guna mengurangi dampak kerusakan terhadap tatanan air dan kualitas lingkungan hidup, sekaligus agar ketahanan energi nasional terjaga dengan baik. Selain itu, Indonesia memiliki potensi kandungan thorium 210.000-270.000 ton di Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. Dan kedua, Thorium tergolong nuklir ramah lingkungan sebagai salah satu sumber energi alternatif yang mampu menghidupi

No	Isu	Rekomendasi
		<p>energi Indonesia sampai dengan lebih dari 1000 tahun.</p> <p>3. Menindaklanjuti kedua surat tersebut, Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor: B-0313/Seskab/Maritim/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan agar hal tersebut dikaji lebih lanjut dan kiranya dapat menerima audiensi Thorcon International Pte.Ltd jika diperlukan.</p> <p>4. Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-0313/Seskab/Maritim/9/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tersebut, Kepala P3Tek KEBTKE Kementerian ESDM pada tanggal 17 September 2019 telah menyelenggarakan Rapat Pemaparan Laporan Akhir Kajian PLTT yang dihadiri Kemenko Maritim, Kemenko Ekon, Bappenas, BATAN, BAPETEN, Wantannas, PT PLN, PT PAL, dan Guru Besar FMIPA ITB serta Sekretariat Kabinet. Rapat menyepakati Kementerian ESDM kiranya menyampaikan rencana pembangunan PLTT kepada Bappenas guna dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024 untuk dijadikan proyek PSN atau jika memungkinkan kiranya dapat diterbitkan Perpres tentang Percepatan Pembangunan PLTT. Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua DEN telah menerima audiensi ThorCon International, Pte, Ltd.tanggal 12 November 2019 yang menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia butuh PLTN dan telah disampaikan kepada DPR pada Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM tanggal 27 November 2019.</p> <p>5. Kedeputan Bidang Kemaritiman juga aktif mengikuti isu terkait thorium di antaranya adalah menghadiri undangan Kepala Balitbang Kementerian Pertahanan menyampaikan permohonan sebagai penanggung dalam</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>penyelenggaraan Forkom Litbang ke-30 TA 2019 dengan tema “Pemanfaatan Thorium sebagai alternatif Sumber Energi untuk Kepentingan Pertahanan Negara” tanggal 4 Desember 2019. Hasil dalam Forkom Litbang ke-30 TA 2019 tersebut adalah Balitbang Kemhan berupaya untuk mencari terobosan inovasi Teknologi yang tepat terhadap pengembangan Thorium dengan tujuan untuk memperoleh masukan yang strategis terkait dengan sumber energi alternatif dimasa mendatang mengingat bahan bakar energi yang bersumber dari fosil semakin lama semakin langka dan cenderung habis.</p>  <p><i>Gambar 22: Plt Asdep Bidang ESDM (belakang paling kanan) bersama Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono (tengah depan) menghadiri Forkom Litbang ke-30 TA 2019 dengan tema “Pemanfaatan Thorium sebagai alternatif Sumber Energi untuk Kepentingan Pertahanan Negara”</i></p>
4	<p>Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)</p>	<p>1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>)/Perpres yang telah ditetapkan Presiden tanggal 25 Januari 2019, merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan <i>Geopark</i> melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui kegiatan pariwisata. Hal ini sebagai upaya pencapaian target 20 juta wisatawan</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>mancanegara dan menghasilkan angka devisa US\$7,5 miliar. Pengembangan <i>Geopark</i> melalui pengembangan destinasi pariwisata diharapkan mampu berkontribusi 5% terhadap target kunjungan wisatawan mancanegara.</p> <p>2. Dalam rangka memberikan pemahaman dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, maka Sekretariat Kabinet bekerjasama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyebarluasan Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>), melalui kegiatan sosialisasi untuk regional Sumatera pada tanggal 24 April 2019 di Hotel Grand Mercure Padang, Sumatera Barat (sesuai ketentuan pasal 29 dan 34 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa sosialisasi peraturan dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun bekerjasama).</p> <p>3. Acara sosialisasi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, dan menghadirkan <i>Keynote Speech</i> oleh Prof. Dr. H. Arief Rachman selaku Ketua Harian KNIU serta 5 narasumber yaitu, Deputi Bidang SDM, IPTEK dan Lingkungan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas; Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya, Kementerian Pariwisata dan Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet.</p> <p>4. Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat Kabinet</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>yang telah menyelenggarakan sosialisasi di Padang. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 sangat dibutuhkan daerah yang memiliki potensi <i>Geopark</i> sebagai panduan dalam melakukan pengembangan <i>Geopark</i> khususnya di Sumatera Barat.</p> <p>5. Sosialisasi dihadiri 220 peserta yang terdiri atas Pemerintah Daerah regional Sumatera, diantaranya 10 Bupati/Walikota (Bupati Merangin, Bupati Kerinci, Bupati Belitong Timur, Bupati Karo, Bupati Limah Puluh Kota, Bupati Aceh Tengah, Bupati Aceh Besar, Bupati Sijunjung, Bupati Natuna, dan Walikota Padang), Kepala Dinas ESDM Provinsi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretariat Kabinet.</p> <p>6. Materi yang dibahas narasumber adalah, substansi Perpres secara keseluruhan, perkembangan <i>Geopark</i> Indonesia dan kelembagaan (Komite Nasional <i>Geopark</i> Indonesia), penetapan <i>Geoheritage</i> dan <i>Geopark</i> Nasional, pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata serta rencana aksi <i>Geopark</i> dan pendanaan. Sedangkan, beberapa topik yang dibahas pada sesi diskusi adalah terkait pendanaan kegiatan pengelolaan <i>Geopark</i> serta pengusulan penetapan <i>Geoheritage</i>, <i>Geopark</i> Nasional dan <i>UNESCO Global Geoparks (UGGp)</i>. Kesimpulan sosialisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah sangat antusias mengusulkan penetapan potensi <i>Geosite</i> untuk menjadi <i>Geopark</i> Nasional; b. Kementerian terkait akan segera menindaklanjuti

No	Isu	Rekomendasi
		<p>amanat Perpres, untuk menerbitkan Permen yang dibutuhkan yaitu Permen ESDM terkait penetapan <i>Geoheritage</i> dan penetapan <i>Geopark</i> Nasional, Permen Bappenas terkait rencana aksi nasional pengembangan <i>Geopark</i>, Permen Pariwisata terkait tata kelola <i>Geopark</i> dan Permenko Kemaritiman terkait KNGI;</p> <p>c. Percepatan penetapan <i>Geoheritage</i> terhadap potensi <i>Geoheritage</i> yang telah diinventarisir Badan Geologi, untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengusulkan penetapan <i>Geopark</i> Nasional;</p> <p>d. Selanjutnya sosialisasi akan diselenggarakan oleh Kementerian ESDM bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk regional Jawa dan Kalimantan</p> <p>7. Perpres 9 Tahun 2019 juga mengamanatkan penyusunan pedoman teknis bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan <i>Geopark</i>. Dalam upaya mendorong percepatan penyelesaian Permen ESDM, PPN/Bappenas dan Pariwisata yang akan digunakan sebagai pedoman teknis, Sekretariat Kabinet mengirimkan surat kepada Menteri ESDM, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Pariwisata guna dipercepat penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet (surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0185/Seskab/Maritim/05/2019 tanggal 15 Mei 2019).</p>

No	Isu	Rekomendasi
		 <p data-bbox="592 680 1461 757"><i>Gambar 23: Foto bersama Narasumber dan Kepala Daerah regional Sumatera dalam acara sosialisasi Perpres 9 Tahun 2019 di Padang, Sumatera Barat tanggal 24 April 2019</i></p>
5	Pengelolaan Pertambangan Emas di Gunung Botak	<p data-bbox="592 792 1222 831">1. Kronologi permasalahan Gunung Botak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="632 853 1461 1055">a. 7 Mei 2015: Arahan Presiden RI dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku, agar dilakukan Penutupan dan Penataan Lokasi PETI di Gunung Botak dan Gogrea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. <li data-bbox="632 1077 1461 1603">b. 20 Oktober 2015: Gubernur Provinsi Maluku membentuk Tim Terpadu Penataan Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No.228 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penataan Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Maluku No.265 Tahun 2015, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, TNI, dan Akademisi Universitas Pattimura Ambon. <li data-bbox="632 1626 1461 1883">c. 29 April 2016: Pemerintah Daerah Provinsi Maluku bekerja sama dengan PT Buana Pratama Sejahtera (PT BPS) untuk melakukan penataan lokasi PETI di Gunung Botak berdasarkan Nota Kesepahaman No.540-23 Tahun 2016. <li data-bbox="632 1906 1461 2051">d. 30 Mei 2016: Gubernur Provinsi Maluku membentuk Tim Kajian Penyelesaian Permasalahan PETI di Gunung Botak berdasarkan Keputusan Gubernur

No	Isu	Rekomendasi
		<p>Maluku No.225.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Kajian Penyelesaian Permasalahan di Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru, yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung RI, dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.</p> <p>e. 28 Juni 2016: Gubernur Provinsi Maluku menetapkan PT BPS sebagai pelaksana Kegiatan Penataan dan Pemulihan Lingkungan di Lokasi Bekas PETI di Gunung Botak berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No.268 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemulihan Lingkungan Lokasi Bekas Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Maluku No.382 Tahun 2016, dengan memberikan Izin Penataan dan Pemulihan Lingkungan pada areal yang telah ditetapkan Gubernur Provinsi Maluku.</p> <p>f. 23 November 2016: Gubernur Provinsi Maluku memberikan kewenangan kepada PT BPS untuk melaksanakan pemanfaatan dan pengolahan hasil penataan dan pemulihan lingkungan di lokasi bekas PETI berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No.383 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penataan dan Pemulihan Lingkungan Pada Lokasi Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru Provinsi Maluku oleh PT BPS.</p> <p>g. 30 Desember 2016: Gubernur Provinsi Maluku memberikan IUPK Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral Emas kepada PT BPS berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 467 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Pertambangan</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral Emas kepada PT BPS dan memberikan IUPK Operasi Produksi Khusus untuk Penjualan Mineral Emas kepada PT BPS berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 468 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan Mineral Emas kepada PT BPS.</p> <p>2. Pandangan Kementerian/Lembaga terkait permasalahan Gunung Botak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Status hukum perizinan wilayah Gunung Botak adalah bebas dari segala kepemilikan, sehingga proses pemberian izin kepada PT Timah dan PT Antam menggunakan mekanisme WIUPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Tidak menggunakan mekanisme WPR sebab terdapat kesulitan apabila dilakukan negosiasi kepada PT yang memiliki izin di kawasan Gunung Botak; b. Penugasan khusus kepada BUMN dalam hal ini dilakukan penunjukan oleh Pemprov Maluku dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Oleh sebab itu perlu adanya payung hukum khusus terkait dengan percepatan penanganan dan pengelolaan kawasan pertambangan emas di gunung botak; c. Kementerian LHK sedang fokus melakukan pemulihan lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten agar menjadi pola untuk diterapkan pada kasus Gunung Botak. KLHK juga telah melakukan kajian tentang penataan kawasan gunung botak berdasarkan aspek ekonomi, hukum, social dan lingkungan. KLHK merekomendasikan agar dibuat tanggul disekitar area pertambangan agar air yang

No	Isu	Rekomendasi
		<p>mengalir dari hasil kegiatan pertambangan tidak meluas dan terkait dengan pemulihan lingkungan, KLHK menyampaikan bahwa perlu adanya analisis risiko terlebih dahulu tentang adanya lokasi yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat sebelum pemerintah (KLHK) melakukan kegiatan pemulihan lingkungan;</p> <p>d. Situasi dan kondisi Gunung Botak saat ini dalam keadaan kosong dan bersih dari aktifitas PETI serta tenda-tenda bekas penambang Gunung Botak dijaga secara permanen/ tetap oleh Personil Polda Maluku dan Polres Pulau Buru. Polda Maluku mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera cari investor yang kompeten untuk mengelola tambang emas Gunung Botak dengan profesional dengan memerhatikan kelestarian lingkungan;</p> <p>e. PT ANTAM Sudah siap untuk ditugaskan dengan penunjukan khusus oleh pemerintah dan meminta data potensi keuntungan di Gunung Botak dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) dalam waktu dekat.</p> <p>3. Sehubungan permasalahan Gunung Botak tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi:</p> <p>a. Mencari Pengelola/Investor/Badan Usaha yang berkompeten untuk mengelola kawasan Gunung Botak memerhatikan unsur lingkungan,keamanan,dan ekonomi masyarakat sekitar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan;</p> <p>b. Akan melanjutkan proses lelang WIUPK dengan Gubernur Maluku mengeluarkan rekomendasi untuk segera ditetapkannya WIUPK;</p> <p>c. Kementerian LHK akan melakukan kegiatan</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>pemulihan lingkungan di Lebak, Banten agar menjadi pola contoh pada kasus Gunung Botak. (<i>pilot project</i>);</p> <p>d. Membentuk tim revisi regulasi hukum yang saling bertentangan apabila diterapkan untuk pengelolaan kasus Gunung Botak jangka panjang</p>  <p><i>Gambar 24: Kondisi Gunung Botak, Kab. Buru, Provinsi Maluku yang sudah ditinggalkan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI)</i></p>
Bidang Perhubungan		
1	Pengelolaan transportasi Jabodetabek	<p>1. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan terhadap pengelolaan transportasi di Jabodetabek, pada tanggal 8 Januari 2019 diselenggarakan Rapat Terbatas mengenai Pengelolaan Transportasi Jabodetabek. Dalam Rapat Terbatas tersebut, Presiden memberikan arahan antara lain agar segera dilakukan penyederhanaan manajemen pengelolaan transportasi dengan melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Menindaklanjuti Rapat Terbatas tersebut, Gubernur DKI Jakarta melalui surat nomor: 156/-1.811 tanggal 28 Februari 2019, menyampaikan tindaklanjut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap hasil Rapat Terbatas tanggal 8 Januari 2019 (Dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor: M.0106/Maritim/03/2019 hal laporan perkembangan</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>tindak lanjut Rapat Terbatas tentang pengelolaan transportasi Jabodetabek). Guna melakukan pembahasan lebih lanjut, Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 13 Maret 2019, kesepakatan rapat tanggal 13 Maret 2019, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian BUMN agar segera melakukan kajian rencana pembelian saham mayoritas PT. KCI oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; b. Kementerian Perhubungan akan segera menyelesaikan kajian skema pendanaan pembangunan MRT Koridor Timur-Barat. <p>2. Kembali diselenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 19 Maret 2019 tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk melakukan kajian terhadap PUU yang dapat mendukung percepatan pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Sehubungan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 19 Maret 2019 tersebut, guna mendorong percepatan penyelesaian pengelolaan transportasi Jabodetabek, Arahan Presiden disampaikan kepada Menteri Perhubungan dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk tindak lanjutnya serta Kementerian Hukum dan HAM (tembusan) agar terinformasi apabila nanti perlu ada aturan hukum. (Dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor: M.0161/Maritim/04/2019 hal tindak lanjut integrasi transportasi Jabodetabek).</p>
2	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan	1. Program Tol Laut yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun, belum didukung dengan pengadaan dan alokasi anggaran kontrak tahun jamak/ <i>multiyears contract</i> . Kontinuitas anggaran tahun jamak (<i>multiyears</i>) dinilai

No	Isu	Rekomendasi
	Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan	<p>menjamin operasional layanan publik angkutan laut, yang dapat dilaksanakan mulai awal tahun secara berkelanjutan. Program Tol Laut perlu didukung pengawasan dan pengendalian terhadap petugas kapal dan pengusaha yang menggunakan jasa kapal tol laut dalam hal pengiriman dan penerimaan barang.</p> <p>2. Keterbatasan jenis bahan pokok dan penting (berdasarkan Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting) dinilai menyebabkan terbatasnya jumlah muatan kapal. Kementerian Perdagangan akan menetapkan lebih lanjut jenis barang dengan memperhatikan masukan dari Menteri Perhubungan dan Pemda, dalam rangka evaluasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 (Perpres Program Tol Laut),</p> <p>3. Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 2 Mei 2019. Rapat menyepakati: Efektivitas program Tol Laut perlu didukung optimalisasi konektivitas multimoda lain yaitu Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Udara sehingga perlu dukungan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di darat melalui penugasan Perum Damri, sebagaimana telah diamanatkan dalam Perpres No. 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (hasil rapat telah disampaikan melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman nomor:</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>B.0412/Maritim/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 hal penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan program Tol Laut). Surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan beberapa kali rapat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman guna pembahasan perubahan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017.</p>
3	Peningkatan Keselamatan Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenyamanan dan keamanan transportasi umum patut ditunjang dengan keselamatan dan keamanan transportasi yang tinggi. Keselamatan dan keamanan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Saat ini tingkat rata-rata korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 3-4 orang meninggal setiap jamnya. 2. Dalam Rapat Terbatas tentang Perlindungan Konsumen (21 Maret 2017) Presiden memberi arahan kepada Menteri Perhubungan agar memastikan kegiatan pengecekan untuk sektor transportasi darat, laut, dan udara dilakukan secara rutin dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, dalam Rapat Terbatas tentang Persiapan Natal dan Tahun Baru (18 Desember 2017) Presiden kembali memberi arahan bahwa Pemerintah harus memastikan layanan transportasi mudah di akses oleh Masyarakat, aman, dan nyaman. Utamakan keselamatan warga dalam menggunakan sarana transportasi baik darat, laut, maupun udara. 3. Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan serangkaian pemantauan dan rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet, diperoleh beberapa rekomendasi yang sampai saat ini masih dilakukan kajian oleh Sekretariat Kabinet.

No	Isu	Rekomendasi
		<p>Kegiatan rapat koordinasi tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor: M.0409/Maritim/11/2019 hal Penyelenggaraan kegiatan mengenai Peningkatan Keselamatan Transportasi dengan mengoptimalkan implementasi regulasi dari budaya keselamatan transportasi.</p>
4	<p>Kenaikan tarif angkutan penumpang udara kelas ekonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Perekonomian melalui memorandum nomor: M.0275/Ekon/4/2019 tanggal 9 April 2019 hal pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan regulasi mengenai penerapan tarif batas atas tiket pesawat, menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahwa kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menyumbang 0,10 % terhadap inflasi bulan Maret 2019. Tarif angkutan udara menjadi komoditas penyumbang inflasi dengan kontribusi sebesar 0,03 %. 2. Menindaklanjuti memorandum tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan rapat koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pada 26 April 2019. Dalam rapat koordinasi tersebut diperoleh informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 25-26 Maret 2019 yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan, perwakilan maskapai, perwakilan <i>Online Travel Agent</i> (OTA), dan INACA, dalam rapat tersebut disampaikan meminta maskapai untuk melakukan penyesuaian tarif penerbangan dengan melakukan diskon, namun dengan tetap memperhatikan <i>cost and benefit</i> dari usahanya; b. Dalam rapat diperoleh kesepakatan mengingat permasalahan tarif angkutan penumpang udara merupakan isu yang strategis dan berdampak nasional maka penanganannya diserahkan kepada

No	Isu	Rekomendasi
		<p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor: M.0171/Maritim/05/2019 hal laporan rakor tarif angkutan udara yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor: B.0167/Seskab/Maritim/05/2019 hal rapat koordinasi tarif angkutan penumpang udara).</p> <p>3. Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengkoordinasikan dan menghasilkan kesepakatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah bersama dengan maskapai Garuda Indonesia Group, Lion Air Group, PT. Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pura II, Pertamina, Perum LPPNP secara bersama menyediakan penerbangan murah bagi masyarakat; b. Penerbangan murah disediakan untuk keberangkatan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 10.00-14.00 WIB (waktu setempat) untuk penerbangan <i>no frills</i> (<i>Low Cost Carrier/LCC</i>) domestik tipe pesawat jet dengan penurunan tarif 50% dari TBA LCC, untuk 30% dari total kapasitas pesawat; c. Kebijakan penerbangan murah mulai berlaku efektif 11 Juli 2019, dengan rute penerbangan akan mengikuti mekanisme izin rute dari Kementerian Perhubungan; d. Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian BUMN dan Kemenko Bidang Perekonomian akan melakukan <i>monitoring</i> melalui rapat secara berkala.

No	Isu	Rekomendasi
5	Operasionalisasi Bandar Udara Internasional Yogyakarta	<p>1. Guna meningkatkan pelayanan transportasi dan konektivitas khususnya di Provinsi DI Yogyakarta perlu dilakukan percepatan pembangunan PSN bandar udara baru di Kulon Progo. Pembangunan bandar udara baru di Yogyakarta, tidak dapat ditunda mengingat kapasitas bandar udara eksisting yang sudah melebihi kapasitas dan tidak mungkin untuk dilakukan pengembangan. Rencana pengoperasian bandar udara sempat terkendala adanya wilayah latihan tempur TNI yang berbahaya bagi penerbangan, yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 19 Februari 2019. Dalam rapat disimpulkan antara lain perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait area latihan tempur antara TNI, Kementerian Perhubungan, AirNav, dan PT. Angkasa Pura I (Persero) (telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor: M.0107/Maritim/03/2019 hal laporan hasil rapat koordinasi ruang udara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA)).</p> <p>2. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2017 bahwa bandara baru di Kulon Progo beroperasi minimal pada April 2019. Menteri Perhubungan kepada Presiden melalui surat: UM.201/3/13 Phb 2019 tanggal 24 April 2019 menyampaikan permohonan kegiatan peresmian Bandara Kulon Progo. Menindaklanjuti surat tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman memandang bahwa pelaksanaan <i>soft launching</i> YIA ditunda pelaksanaannya dan perlu mendapat perhatian, mengingat pengoperasian bandar udara perlu memperhatikan berbagai aspek baik dari sisi darat maupun sisi udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, sarana dan</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>prasarana penunjang serta aksesibilitas moda transportasi dari dan ke bandara (telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor: M.0173/Maritim/05/2019 hal usulan kegiatan peresmian Bandar Udara Internasional Yogyakarta).</p> <p>3. Terkait rencana pengoperasionalan secara penuh, perlu dilakukan percepatan kegiatan mitigasi bencana di kawasan sekitar bandara, mengingat bandara tersebut berada di lokasi rawan bencana alam gempa bumi dan tsunami. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 20 Juni 2019 guna menyepakati langkah-langkah percepatan pembangunan mitigasi bencana dimaksud. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi guna melakukan <i>updating</i> progres percepatan pembangunan mitigasi bencana pada tanggal 8 November 2019 (telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor: M.0406/Maritim/11/2019 hal laporan rapat koordinasi percepatan kegiatan mitigasi bencana di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta).</p> <p>4. Terhadap hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kemaritiman, telah disampaikan hasil kesepakatan rapat terbaru melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman nomor: B.1000/Maritim/11/2019 tanggal 26 November 2019 ditujukan kepada para <i>stakeholder</i> terkait. Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Kemaritiman, telah dilakukan rapat koordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 4 Desember 2019 guna melakukan <i>updating</i> terhadap surat Deputi Bidang Kemaritiman sebagaimana</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>dimaksud: Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui surat nomor: B/IPW.2/204/D.VI.M.EKON/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 telah menyampaikan secara resmi <i>updating timeline</i> yang telah disepakati pada rapat koordinasi tanggal 8 November 2019.</p>
Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim		
1	<p>Progress Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 23 April 2019, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan fokus pada 4 (empat) dari 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas yang sudah ditetapkan di tahun 2015. Keempat destinasi tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo, yang diharapkan dapat selesai penataannya di tahun 2020. Di bulan Juli 2019, Presiden melakukan kunjungan ke Likupang, Sulawesi Utara, dan pada Rapat Terbatas yang diadakan di VIP Room Bandara Sam Ratulangi, Presiden memberikan arahan agar Likupang dapat ditetapkan sebagai KEK pariwisata. Kelima destinasi tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas tanggal 15 Juli 2019, dimana pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di lima destinasi tersebut dapat diselesaikan di tahun 2020. 2. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, yang antara lain mengintruksikan bahwa Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas, dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi, Kedeputan Bidang Kemaritiman telah melakukan pengawasan dan mengawal progres pembangunan

No	Isu	Rekomendasi
		<p>infrastruktur di 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas, diantaranya:</p> <p>a. Borobudur</p> <p>Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur pada tanggal 19 Juni 2019 di Semarang, Jawa Tengah. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, dan BOP Borobudur. Rapat membahas dan menyimpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Pariwisata agar mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana amanat Pasal 20 Perpres Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur sebagai dasar K/L dan Pemda dalam penyusunan program/kegiatan 2) Perlu adanya kesesuaian antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Purworejo dengan rencana induk dan rencana detail Kawasan Pariwisata Borobudur 3) Masih terdapat permasalahan sampah yang belum terselesaikan yang ditimbulkan oleh kunjungan wisatawan di Kabupaten Magelang (TPA eksisting sudah tidak dapat menampung sampah)

No	Isu	Rekomendasi
		<p>Hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Seskab nomor M-797 tanggal 30 Agustus 2019 sebagai rekomendasi Sekretariat Kabinet sebelum kunjungan Presiden dan Rapat Terbatas tanggal 30 Agustus 2019 di Magelang, Jawa Tengah.</p>  <p><i>Gambar 25: Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur</i></p> <p>b. Labuan Bajo</p> <p>Menindaklanjuti arahan Presiden dalam kunjungan ke Labuan Bajo tanggal 10-11 Juli 2019 dan pada Rapat Terbatas tanggal 15 Juli 2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 16 Juli 2016. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, dan BOP Labuan Bajo Flores. Rapat membahas dan menyimpulkan:</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>1) Kementerian Pariwisata agar mempercepat penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana amanat Pasal 20 Perpres Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagai dasar K/L dan Pemda dalam penyusunan program/kegiatan;</p> <p>2) Penetapan RPerpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Komodo dan revisi Perda RTRW Provinsi NTT dan Perda RTRW Kabupaten Manggarai;</p> <p>3) Perlu dilakukan kajian mengenai <i>carrying capacity</i>; dan</p> <p>4) Pengembangan destinasi pariwisata potensial.</p> <p>Hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada K/L terkait melalui Surat Seskab nomor B-279/Seskab/Maritim/08/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Dukungan Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo.</p> <div data-bbox="619 1458 1286 1883" data-label="Image"> </div> <p><i>Gambar 26: Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas 15 Juli 2019 Terkait Pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo</i></p>


No	Isu	Rekomendasi
		<p>c. Mandalika</p> <p>Selain menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, Mandalika juga ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan Moto GP 2021, yang pertama kali akan diadakan di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Mandalika perlu segera diselesaikan sebelum pelaksanaan Moto GP 2021, terutama infrastruktur akomodasi dan konektivitas. Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 8 Juli 2019 di Hotel Lombok Raya. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Nusat Tenggara Barat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, dan PT. ITDC selaku pengelola KEK Mandalika. Rapat membahas dan menyimpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian PUPR agar mempercepat pembangunan jalan <i>bypass</i> dari Bandara Internasional Lombok ke KEK Mandalika (sudah dianggarkan tahun 2020) dan mengkaji program/kegiatan pelebaran jalan provinsi dalam kawasan KEK Mandalika (Bundaran Sumbu); 2) Kementerian Kesehatan dan Pemprov NTB, sesuai kewenangannya mempercepat pembangunan Rumah sakit bertaraf internasional; dan 3) Kementerian Perdagangan dan Pemkab Lombok Tengah, sesuai kewenangannya mengkaji

No	Isu	Rekomendasi
		<p>program/kegiatan penataan Pasar Sengkol yang berada pada jalan akses menuju KEK Mandalika. Hasil rapat tersebut menjadi masukan dalam penyiapan bahan Rapat Terbatas untuk Presiden, salah satunya pada Rapat Terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas tanggal 21 November 2019.</p>  <p><i>Gambar 27: Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim memimpin Rapat Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika dan Labuan Bajo</i></p> <p>d. Danau Toba</p> <p>Selama 3 hari (29-31 Juli 2019) Presiden melakukan kunjungan Sumatera Utara, dengan fokus mengunjungi Danau Toba sebagai lokasi wisata unggulan. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pengembangan pariwisata di sekitar Danau Toba dilakukan parallel, antara atraksi, infrastruktur, akomodasi, lingkungan, dan SDM. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengadakan rapat dengan mengundang Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim pada tanggal 6 September 2019 di Institut Teknologi Del, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera</p>


No	Isu	Rekomendasi
		<p>Utara. Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dihadiri oleh Menteri Pariwisata, perwakilan pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN), BOP Danau Toba, perwakilan pemerintah daerah (Bupati Toba Samosir, Bupati Humbang Hasundutan, wakil Bupati Samosir, Bupati Aceh Singkil, Pemda Tapanuli Utara, Kapolres Toba Samosir, Rektor Institut Teknologi Del), dan Konsultan Penyusun <i>Integrated Tourism Masterplan</i> (ITMP) Danau Toba. Rapat membahas dan menyimpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terkait penyelesaian status LZO, Direktur Utama BPO-DT akan menyurati Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK, untuk memberikan klarifikasi tertulis atas status hukum lahan zona otorita dimaksud, sehingga BPN dapat segera melanjutkan proses sertifikasi HPL pada lahan 107 Ha; 2) Terkait rencana pembangunan trase jalan, BPHP Wilayah II Medan akan melakukan survey guna menentukan penerbitan hak akses penebangan pohon pinus, dengan target penerbitan hak akses dimaksud maksimal pada September 2019; 3) Pengembangan KSPN Danau Toba dilaksanakan secara terintegrasi (baik infrastruktur dan pengembangan SDM) untuk dapat meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat; dan 4) Guna kondusifitas di lapangan pada saat pelaksanaan <i>groundbreaking</i>, Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana penanganan dampak sosial.

No	Isu	Rekomendasi
		<p data-bbox="683 248 1461 506">Hasil rapat tersebut menjadi masukan dalam penyiapan bahan Rapat Terbatas untuk Presiden, salah satunya pada Rapat Terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas tanggal 21 November 2019.</p> <div data-bbox="635 689 1337 1093" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="587 1111 1458 1182"><i>Gambar 28: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Pariwisata memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kawasan Pariwisata Danau Toba</i></p> <p data-bbox="632 1279 826 1317">e. Likupang</p> <p data-bbox="676 1335 1458 2033">Pada tanggal 4-5 Juli 2019, Presiden melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Tanjung Pulisan, Likupang. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memimpin Rapat Terbatas di VIP Lounge Bandara Sam Ratulangi Manado dan memberikan arahan kepada K/L untuk membangun pariwisata di Likupang, salah satunya melalui pembentukan KEK. Menindaklanjuti arahan tersebut, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juli 2019. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>Sulawesi Utara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan Sekretariat Dewan Nasional KEK. Rapat membahas dan menyimpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Perhubungan melakukan percepatan pengembangan Bandara Sam Ratulangi, meliputi perpanjangan <i>runway</i>, perluasan terminal, dan perluasan parkir guna mengantisipasi kenaikan jumlah wisatawan (kondisi saat ini panjang <i>runway</i> bandara sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar dan luas terminal sudah dapat menampung 2,5 juta penumpang/tahun, serta rencana perluasan terminal nantinya akan dapat menampung 10 juta penumpang/tahun); 2) Kementerian PUPR melakukan percepatan pembangunan embung di Likupang dan Bunaken sebagai sumber air baku, pembangunan jembatan Bitung-Pulau Lembeh (sedang dilakukan review FS), berkoordinasi dengan pemda terkait proses percepatan pembebasan lahan jalan tol Manado-Bitung di segmen 2, dan pelebaran jalan nasional Bitung-Likupang. <p>Hasil rapat tersebut menjadi masukan dalam penyiapan bahan Rapat Terbatas untuk Presiden, salah satunya pada Rapat Terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas tanggal 21 November 2019.</p>

No	Isu	Rekomendasi
		 <p data-bbox="592 577 1461 696"><i>Gambar 29: Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Tanggal 5 Juli 2019 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Pariwisata di Sulawesi Utara</i></p>
2	Event Pariwisata Nasional	<p data-bbox="592 752 1461 954">Sepanjang tahun 2019 terdapat beberapa event pariwisata, namun ada 2 (dua) event berskala nasional yang melibatkan K/L pusat dan pemerintah daerah, yaitu <i>Sail Nias 2019</i> dan <i>Hari Nusantara 2019</i>.</p> <p data-bbox="592 987 842 1025">1. <i>Sail Nias 2019</i></p> <p data-bbox="632 1043 1461 1910">a) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan surat Permohonan Dukungan Pelaksanaan <i>Sail Nias</i> (B0001 /MENKO /MARITIM /UM.03.00// 2019). Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum kepada Sekretaris Kabinet nomor M-52/Maritim//2019 tanggal 25 Januari 2019 agar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempersiapkan kegiatan <i>sail</i> lebih awal, sejalan dengan arahan Presiden pada <i>Sail Tomini 2015</i> dan <i>Sail Karimata 2016</i>. Arahan tersebut kemudian disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui surat nomor B-44/Seskab/Maritim/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Persiapan Pelaksanaan <i>Sail Nias 2019</i>.</p> <p data-bbox="632 1928 1461 2078">b) Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengeluarkan Keputusan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Panitia</p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p>Nasional Penyelenggara <i>Sail</i> Nias 2019, dimana Deputi Bidang Kemaritiman ditetapkan sebagai Wakil Ketua III untuk Bidang Acara Puncak. Selain itu, Sekretaris Kabinet menjadi anggota Panitia Pengarah, dan Wakil Sekretaris Kabinet sebagai Sekretaris II Panitia Pelaksana Pusat.</p> <p>c) Acara puncak <i>Sail</i> Nias 2019 dilaksanakan pada tanggal 14 September 2019 di Pelabuhan Baru Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (mewakili Presiden). Rangkaian kegiatan pada puncak acara <i>Sail</i> Nias 2019, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Wonderful Nias Expo</i>, di Lapangan Orurusa; 2) <i>Grand Final Surfing Nias Pro 2019</i>, di Pantai Sorake; dan 3) Festival Kopi Nusantara di Taman Ya'ahowu, Kota Gunung Sitoli. <p>Melalui kegiatan <i>Sail</i> Nias 2019, yang bertema “Nias menuju Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia”, pemerintah bertekad untuk memajukan sektor pariwisata di Nias. Terkait hal tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mendukung dan bersinergi terhadap segala upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Nias. Selain itu, menindaklanjuti arahan Presiden terkait pelaksanaan kegiatan <i>Sail</i> (kegiatan <i>sail</i> agar berdampak pada peningkatan perekonomian bagi daerah setempat; kegiatan <i>Sail</i> agar tidak bersifat seremonial semata), dalam pelaksanaan <i>Sail</i> Nias 2019 dilakukan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pembangunan infrastruktur, antara lain pemeliharaan jalan nasional dan jembatan dari Kota Gunung Sitoli menuju Kabupaten Nias Selatan, Penyediaan lampu jalan tenaga surya pada ruas jalan antara Teluk

No	Isu	Rekomendasi
		<p>Dalam dan Pantai Sorake, penataan kawasan Pelabuhan Teluk Dalam (pembangunan toilet, mushola, sistem penyediaan air minum [SPAM], renovasi bangunan ruang tunggu pelabuhan, penataan pelataran panggung utama, pemasangan <i>paving block</i>), dan penataan kawasan Pantai Sorake;</p> <p>b) Renovasi sarana-prasarana, seperti sekolah, rumah ibadah, puskesmas;</p> <p>c) Bakti Kesehatan (pelayanan kesehatan umum dan gigi, sunatan masal, bedah minor, donor darah, pembagian kaca mata baca dan peralatan kebersihan);</p> <p>d) Terciptanya rute baru kunjungan kapal <i>yacht</i> asing, melalui <i>event Nias Yacht Rally</i>;</p> <p>e) Penguatan jaringan internet;</p> <p>f) Pelatihan <i>hospitality</i> bagi masyarakat pelaku pariwisata (hotel, restoran);</p> <p>Laporan pelaksanaan rangkaian kegiatan acara puncak <i>Sail Nias 2019</i> telah disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman pada Wakil Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M-347/Maritim/09/2019 tanggal 25 September 2019.</p>  <p><i>Gambar 30: Wakil Sekretaris Kabinet bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pariwisata, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan</i></p>

No	Isu	Rekomendasi
		<p><i>Gubernur Sumatera</i></p> <p>2. Hari Nusantara 2019</p> <p>Berdasarkan surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 173 Tahun 2019 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim ditunjuk sebagai anggota Bidang Acara Puncak, yang bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan acara puncak Hari Nusantara 2019 tingkat nasional dengan Panitia Pelaksana Pusat dan Panitia Pelaksana Daerah dan melaksanakan kegiatan acara puncak Hari Nusantara 2019 tingkat nasional tanggal 13 Desember 2019 di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Tema peringatan Hari Nusantara tingkat nasional 2019 adalah "<i>Nusantaraku Berdaulat, Indonesiaku Maju</i>", diselenggarakan di Pantai Gandoriah, Kota Pariaman, Sumatera Barat dan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mewakili Presiden RI.</p>  <p><i>Gambar 31: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Memberikan Keterangan Pers pada Acara Puncak Hari Nusantara 2019</i></p>

A.3.2. REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PUU

No	Isu	Rekomendasi
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	<p>Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kerndaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri ESDM kepada Presiden melalui surat tanggal 19 Juni 2017 mengusulkan pelaksanaan program energi bersih melalui pemanfaatan jenis dan teknologi energi bersih untuk kegiatan transportasi jalan melalui peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Program energi bersih ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mewujudkan kota dengan energi bersih. 2. Sekretariat Kabinet kemudian menindaklanjuti usulan Kementerian ESDM tersebut dengan menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 6 Juli 2017 yang menyepakati penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagai payung hukum pelaksanaan program pengembangan moda transportasi dengan energi listrik dan melaporkan hasilnya segera kepada Presiden. 3. Penyusunan RPerpres diperlukan sebagai pedoman dalam pengimplementasian program pengembangan moda transportasi dengan energi listrik tersebut, khususnya untuk mempermudah koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pemberian dukungan dan kemudahan antara lain meliputi dukungan fiskal berupa insentif yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, kemudahan dalam hal perizinan dan pendaftaran/registrasi kendaraan. 4. Dalam perjalanan penyusunannya, RPerpres mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak sehingga proses penyusunannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pada tanggal 14 Januari 2019, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas membahas

		<p>Program Kendaraan Bermotor Listrik dan memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden merupakan hal yang dibutuhkan saat ini untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik; b. Peraturan Presiden diperlukan untuk menyatukan semua kementerian/lembaga (k/l), sehingga tidak bekerja secara sendiri-sendiri; dan c. Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pimpinan k/l terkait agar memperhatikan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. <p>5. Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet terus terlibat aktif melakukan pembahasan substansi RPerpres baik dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun di kementerian/lembaga terkait guna mendapatkan pengaturan kebijakan yang tepat mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, terakhir pada tanggal 2 Mei 2019 di Kementerian Sekretariat Negara.</p> <p>6. Kemudian akhirnya, pada saat Presiden mengadakan Rapat secara internal dengan Menteri terkait percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan pada tanggal 8 Agustus 2019, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan yang pada intinya mengatur penggunaan KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai dalam negeri; b. Pemberian Insentif;
--	--	--

		<p>c. Penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL berbasis baterai;</p> <p>d. Pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL berbasis baterai;</p> <p>e. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.</p>
2	<p>Otentifikasi dan distribusi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)</p>	<p>1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyampaikan permohonan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet untuk menetapkan RPerpres tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) melalui surat nomor B-1950/MENKO/MARITIM/ UM.001/IX/2018 tanggal 19 September 2018</p> <p>2. Menindaklanjuti pengajuan RPerpres tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat koordinasi di Sekretariat Kabinet pada tanggal 1 Oktober 2018 dan 1 November 2018 dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bapennas dan Badan Ekonomi Kreatif dengan kesepakatan menyetujui substansi dan konsep RPerpres</p> <p>3. Berdasarkan hasil kesepakatan rapat, Sekretaris Kabinet meminta paraf persetujuan RPerpres kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Pariwisata (surat Seskab Nomor B-545/Seskab/Maritim/ 11/2018 tanggal 8 November 2019). Setelah mendapatkan paraf persetujuan keempat menteri, selanjutnya Sekretaris Kabinet mengajukan permohonan penetapan RPerpres kepada Presiden (Memorandum Nomor M-1368 Tanggal 29 November 2018) dan pada tanggal 25 Januari 2019 Presiden menetapkan Peraturan Presiden</p>

		<p>Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>), dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 31 Januari 2019 (surat Deputi Bidang Kemaritiman kepada Menteri Hukum HAM nomor B-82/Maritim/01/2019 tanggal 31 Januari 2019).</p> <p>4. Tahap selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman melakukan otentifikasi Perpres 9 Tahun 2019 dan mendistribusikan kepada 21 Kementerian/Lembaga, 14 Gubernur dan 19 Pengelola <i>Geopark</i> (surat Deputi Bidang Kemaritiman Nomor B-112/Maritim/02/2019 tanggal 11 Februari 2019).</p>
2	<p>Otentifikasi dan distribusi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RPerpres RAN-PPM)</p>	<p>1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RPerpres RAN-PPM) melalui surat nomor: S.268/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2018 tanggal 9 Agustus 2018</p> <p>2. RPerpres diajukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 9 Maret 2017 dan pelaksanaan komitmen Pemerintah pada UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata, sebagai upaya pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri yang diprioritaskan pada bidang pertambangan emas skala kecil, energi, kesehatan, dan manufaktur</p> <p>3. RPerpres telah mendapatkan paraf persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan dan Menteri Perindustrian. Setelah mendapat persetujuan dari Presiden, selanjutnya RPerpres Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 26 April 2019</p> <p>4. Tahap selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman</p>

		melakukan otentifikasi Perpres 21 Tahun 2019 dan mendistribusikan kepada 24 Kementerian/Lembaga, Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku (surat Deputi Bidang Kemaritiman Nomor B-335/Maritim/05/2019 tanggal 2 Mei 2019).
Bidang Perhubungan		
1	Peraturan perundang-undangan terkait pelayaran rakyat	<p>1. Untuk mempertahankan eksistensi pelayaran rakyat sebagai aset budaya bahari, diperlukan terobosan melalui pemberdayaan usaha Pelra di bidang wisata bahari dan/atau optimalisasi pemanfaatan rute tol laut yang tidak dapat dilalui kapal kontainer karena kedalaman alur pelayaran. Guna mendorong kebijakan perluasan usaha Pelra sebagai wisata bahari, dan kebijakan pemberdayaan Pelra yang terintegrasi dengan program Tol Laut, diusulkan pengaturan/payung hukum setingkat Peraturan Presiden mandiri. Penyusunan RPerpres merupakan suatu kebijakan afirmatif terhadap Kapal Pelayaran-Rakyat Untuk mempertahankan warisan budaya dan mendorong kemajuan, kemakmuran, serta memberikan kesejahteraan yang adil dan merata, perlu adanya kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan pelayaran rakyat melalui;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan standardisasi, sertifikasi, dan pembaruan teknologi kapal dan pengoperasian kapal, dengan dukungan kepastian tersedianya kayu tertentu bahan baku kapal; b. Pengaturan untuk memberikan kepastian adanya muatan terutama angkutan barang-barang pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD; c. Pengaturan untuk pembangunan sarana dan prasana pendukung termasuk pelabuhan; d. Pengaturan untuk memprogramkan pembangunan kapal <i>prototype</i> dengan pembiayaan dari APBN/APBD dan Bank/lembaga keuangan bukan bank dengan fasilitasi dan

		<p>insentif fiskal;</p> <p>e. Pengaturan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas pengelolaan usaha;</p> <p>f. Pengaturan untuk menerapkan regulasi yang sama dalam penegakan hukum bagi Pelayaran-Rakyat yang ditetapkan bersama antar instansi penegak hukum.</p> <p>Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman telah menyampaikan memorandum dan surat:</p> <p>a. M.0172/Maritim/05/2019 hal Permohonan Izin Prakarsa Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat;</p> <p>b. M.0215/Maritim/06/2019 hal Laporan Rapat Pembahasan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat (PELRA);</p> <p>c. B-168/Seskab/Maritim/05/2019 hal Sekretariat Kabinet mendorong agar diterbitkan Izin Prakarsa Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat yang telah ditindaklanjuti dengan persetujuan prakarsa oleh Presiden. Deputi Bidang Kemaritiman telah ikut serta dalam pembahasasn RPerpres yang telah masuk pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.</p>
2	Peraturan perundang-undangan terkait percepatan pembangunan Jawa Tengah	<p>1. Presiden dalam pengantar Rapat Terbatas tanggal 9 Juli 2019 tentang Percepatan Pembangunan Jawa Tengah menyampaikan, Indonesia membutuhkan dorongan ekonomi yang besar dan Jawa Tengah dapat memberikan dorongan yang dibutuhkan. Oleh karena hal tersebut, pemerintah pusat ingin mem-<i>back up</i> agar percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah betul-betul riil.</p> <p>Menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi menentukan</p>

		<p>program/kegiatan yang dapat mendorong perekonomian.</p> <p>2. Deputi Bidang Kemaritiman melaporkan kepada Sekretaris Kabinet bahwa pada rapat koordinasi awal terdapat ± 500 program/kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dikarenakan jumlah yang masih terlalu besar perlu dilakukan identifikasi sektor dan komoditas unggulan masing-masing wilayah, FGD dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk mendapatkan masukan program/kegiatan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Tengah, serta penajaman program/kegiatan (telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor: M.0339/Maritim/09/2019 hal laporan rapat koordinasi kompilasi, validasi, dan pemutakhiran usulan program/kegiatan prioritas dalam rangka penyiapan <i>master list</i> percepatan pembangunan Jawa Tengah).Setelah dilakukan berbagai rapat koordinasi dan penajaman, telah dipilih dan diputuskan 270 program/kegiatan yang diharapkan dapat memberikan dorongan perekonomian dengan skema pembiayaan APBN, APBD, BUMN/BUMD/Swasta, dan KPBU.</p> <p>3. Telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemasang. Guna memastikan pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 sesuai dengan <i>timeline</i>, dibutuhkan pembentukan PMO yang dapat melakukan persiapan pelaksanaan program/kegiatan (telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor : M.0464/Maritim/12/2019 hal</p>
--	--	---

		laporan sosialisasi percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019).
Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim		
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	<p>1. Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 16 November 2017 di Istana Bogor tentang Pengembangan 10 Bali Baru (10 Destinasi Pariwisata Prioritas) memberikan arahan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk melakukan percepatan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, termasuk di dalamnya pengembangan destinasi wisata Bromo-Tengger-Semeru</p> <p>2. Sebagaimana arahan Presiden agar pengelolaan destinasi pariwisata menerapkan prinsip <i>Single Destination Single Management</i>, destinasi Bromo-Tengger-Semeru sedang dalam proses pembentukan Badan Otorita Pariwisata selaku pengelola destinasi. Rancangan Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukan BOP telah disiapkan sejak akhir tahun 2018 dan harmonisasinya berlanjut di tahun 2019. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru tanggal 23 Januari 2019. Rapat tersebut diadakan untuk membahas finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang BOP Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, dan Tim Percepatan DPP. RPerpres yang dibahas pada rapat tersebut kemudian disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Pariwisata, Menteri LHK, Menteri ATR/BPN, dan Menteri PAN-RB perihal Permohonan Paraf Persetujuan atas Rancangan Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan</p>

		<p>Pariwisata Bromo Tengger Semeru (surat nomor B-39/Seskab/maritim/01/2019 tanggal 29 Januari 2019).</p> <p>3. Menanggapi surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan surat Nomor S.148/Menlhk/Setjen/KSA.3/3/2019 tanggal 20 Maret 2019. Menindaklanjuti tanggapan Menteri LHK, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan Rapat Pembahasan Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas RPerpres Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru tanggal 2 April 2019. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.</p>  <p><i>Gambar 32: Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Pembahasan Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas RPerpres Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru tanggal 2 April 2019</i></p>
2	<p>Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola</p>	<p>1. Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Destinasi Prioritas Danau Toba tanggal 2 Februari 2016 menyampaikan arahan agar pengelolaan destinasi pariwisata menerapkan prinsip <i>Single Destination Single Management</i>. Salah satu destinasi yang akan dibentuk kelembagaannya adalah Wakatobi.</p> <p>2. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Sekretaris</p>

<p>Kawasan Pariwisata Wakatobi</p>	<p>Kabinet menyampaikan surat Permohonan Paraf Persetujuan atas Rancangan Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi (nomor B-40/Seskab/maritim/01/2019 tanggal 29 Januari 2019) kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Pariwisata, Menteri LHK, Menteri ATR/BPN, dan Menteri PAN-RB.</p> <p>3. Menanggapi surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan surat nomor HK.02.01/484-100/IV/2019 tanggal 1 April 2019 untuk menyampaikan masukan berupa usulan perubahan maupun penambahan materi atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi. Usulan tersebut kemudian dikaji oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dan diputuskan dapat diakomodir dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi. Namun demikian, terkait pengelolaan SDM BOP Wakatobi, sebagaimana BOP Bromo-Tengger-Semeru, terdapat masukan dari Kementerian PAN-RB (surat nomor Nomor B/1029/M.KT.01/2019 tanggal 18 Oktober 2019). Oleh karena itu, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan rapat dengan mengundang perwakilan Kementerian PAN-RB pada tanggal 1 November 2019 untuk membahas hal tersebut. Kesepakatan rapat kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru untuk dimintakan paraf ulang, sebagaimana disampaikan dalam surat Deputi</p>
---	--

		Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kementerian PAN-RB (surat nomor B.929/Maritim/11/2019 tanggal 7 November 2019).
--	--	---

A.3.3. REKOMENDASI MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

No	Isu	Rekomendasi
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa di 12 Provinsi/Kota	<p>1. Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada tanggal 12 April 2018. Dalam pelaksanaan Perpres dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman mewakili Sekretariat Kabinet menjadi anggota Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa. Selama ini aktif dalam rapat koordinasi dan turut memantau penyelesaian permasalahan pembangunan PLTSa di 12 Provinsi/Kota. Secara garis besar Perpres Nomor 35 Tahun 2018 mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penunjukan 12 Kota menjadi lokasi percepatan pembangunan PLTSa yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Palembang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Manado, dan Kota Makassar; b. Dalam melakukan pembangunan PLTSa, Pemerintah Provinsi/Kota tersebut dapat menugaskan badan usaha milik daerah atau melakukan kompetisi badan usaha; c. Menteri ESDM menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari Pengembang PLTSa; d. Sumber pendanaan pembangunan PLTSa berasal dari APBD, dan dapat didukung oleh APBN, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		<p>e. Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan biaya pengolahan sampah kepada Pemerintah Daerah dengan besaran paling tinggi Rp 500.000,- per ton sampah;</p> <p>f. menteri/kepala lembaga, dan Gubernur terkait melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>g. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa (Tim Koordinasi) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua serta menteri/pimpinan lembaga terkait sebagai anggota.</p> <p>2. Namun dalam perjalanannya, masih banyak kendala yang menghambat pelaksanaan pembangunan PLTSa antara lain;</p> <p>a. Lambatnya penerbitan Surat Penugasan pembelian listrik oleh Menteri ESDM;</p> <p>b. Belum tersedianya pendanaan proyek PLTSa;</p> <p>c. Lambatnya proses Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) antara PT PLN (Persero) dan pengembang PLTSa;</p> <p>d. Belum adanya regulasi mengenai Biaya Layanan Pengolahan Sampah (<i>Tipping Fee</i>);</p> <p>e. Lambatnya penentuan skema pelaksanaan proyek</p> <p>3. Pada tanggal 16 Juli 2019, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas terkait pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa. Dalam Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi Arahan kepada Presiden untuk mengatasi kendala pelaksanaan PLTSa tersebut antara lain perlunya percepatan proses penerbitan Surat Penugasan pembelian listrik oleh Menteri ESDM antara lain untuk PLTSa Surabaya dan PLTSa Palembang, perlunya koordinasi oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memfasilitasi alternatif pendanaan PLTSa di luar penggunaan APBN/APBD,</p>
--	--	--

perlunya pengkajian besaran insentif dan tarif listrik oleh Kementerian ESDM, dan lain sebagainya. Hingga Desember Tahun 2019, pembangunan PLTSa di beberapa Provinsi/Kota telah mengalami kemajuan pesat, antara lain:

- a. Kota Surabaya dan Kota Surakarta telah mendapatkan persetujuan pembelian listrik oleh PT PLN (Persero) dari Menteri ESDM, dan saat ini sedang tahap konstruksi. PLTSa Kota Surabaya ditargetkan dapat beroperasi secara komersial pada 16 Maret 2020 dengan progres konstruksi mencapai 92%.
- b. Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Jakarta sudah memiliki mitra investor;
- c. Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Bandung/Regional Jawa Barat sedang proses Lelang Calon Investor;
- d. Kota Denpasar (Sarbagita) membangun PLTSa dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- e. Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Manado sedang dalam tahap Penyusunan dokumen *Pra-Feasibility Study*.



Gambar 33: Suasana Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan untuk Percepatan Pembangunan PLTSa Kota Surabaya di TPA Benowo tanggal 15 November 2019

Bidang Perhubungan		
1	Rapat Terbatas menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M	<p>1. Guna membahas persiapan seluruh sektor dan <i>stakeholder</i> dalam mengantisipasi hambatan, gangguan, dan permasalahan pada saat Hari Raya Idul Fitri 2019 pada tanggal 3 Mei 2019 telah diselenggarakan Rapat Terbatas tentang persiapan menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M (telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet memorandum nomor: M.0174/Maritim/05/2019 hal <i>briefing sheet</i> dan infografis Rapat Terbatas persiapan menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M).</p> <p>2. Menindaklanjuti Arahan Presiden Rapat Terbatas menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M tanggal 3 Mei 2019, Deputi Bidang Kemaritiman berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan selaku Koordinator Pelaksana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Nasional Tahun 2019 (1440 H) dan operator transportasi melaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor: M.0198/Maritim/05/2019 hal laporan tindak lanjut Rapat Terbatas tentang persiapan menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M. Hasil koordinasi dengan rekomendasi:</p> <p>a. Guna memastikan angkutan lebaran dapat berjalan dan menekan angka kecelakaan serta mengurangi kepadatan lalu lintas, masih diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), sebagai berikut:</p> <p>1) Penertiban terhadap perlintasan sebidang yang tidak resmi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi seluruh rambu-rambu lalu lintas dan menjaga keberadaan rambu-rambu lalu lintas;</p>

		<p>2) Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan laut guna memastikan keselamatan transportasi;</p> <p>3) Pengendalian dan penertiban pasar tumpah yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas;</p> <p>4) Penyediaan transportasi lanjutan dari dan menuju simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara;</p> <p>5) Antisipasi kejadian bencana dan cuaca ekstrem.</p> <p>b. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan angkutan lebaran dan memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah perlu diteruskan kepada Kemendagri untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah.</p>
Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim		
1	<p>Penyiapan Bahan Rapat Terbatas di Bidang Pariwisata</p>	<p>1. Pariwisata menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan konektivitas. Sepanjang tahun 2019, telah diadakan 4 (empat) kali Rapat Terbatas/Sidang Kabinet yang secara spesifik membahas isu pariwisata, yaitu:</p> <p>a. Rapat Terbatas tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Pariwisata di Sulawesi Utara (tanggal 5 Juli 2019 di VIP Room Bandara Sam Ratulangi Sulawesi Utara);</p> <p>b. Rapat Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (tanggal 15 Juli 2019 di Kantor Presiden, Jakarta);</p> <p>c. Rapat Terbatas tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Borobudur (tanggal 30 Agustus 2019 di Hotel Plataran, Magelang, Jawa Tengah); dan</p> <p>d. Rapat Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (21 November 2019 di Kantor Presiden, Jakarta).</p> <p>Selain keempat Rapat Terbatas diatas, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</p>

juga ikut menyiapkan bahan untuk Rapat Terbatas/Sidang Kabinet yang membahas isu yang lebih luas, namun masih berkaitan dengan bidang pariwisata, diantaranya:

- a. Rapat Terbatas tentang Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana (tanggal 14 Januari 2019 di Kantor Presiden, Jakarta);
- b. Sidang Kabinet Parpurna tentang Program dan Kegiatan Tahun 2019 (tanggal 7 Januari 2019 di Istana Negara); dan
- c. Rapat Terbatas tentang Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Presiden RI ke Saudi Arabia (tanggal 18 April 2019 di Istana Merdeka)

Sesuai tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim melakukan penyiapan analisis dan pengolahan materi untuk pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, diantaranya:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tanggal 9 Februari 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya;
- b. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) tanggal 8 April 2019 di Gedung Sapta Pesona (diwakili oleh Menteri Pariwisata);
- c. Pertemuan Presiden dengan Direktur Utama PT ITDC (Persero) tanggal 7 Agustus 2019 di Kantor Presiden (didampingi oleh Sekretaris Kabinet);
- d. Festival Tabut 2019 tanggal 31 Agustus 2019 di Bengkulu (diwakili oleh Menteri Pariwisata);
- e. Acara Puncak *Sail* Nias 2019, tanggal 14 September 2019 di Kabupaten Nias, Sumatera Utara (diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman); dan

f. Hari Nusantara 2019, tanggal 13 Desember 2019 di Kota Pariaman, Sumatera Barat (diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian).



Gambar 34: Presiden menerima anugerah penghargaan sebagai Bapak Pariwisata Nasional, yang diserahkan pada Gala Dinner Peringatan HUT ke-50, di Hotel Grand Sahid Jaya

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN

B.1. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA SESUAI DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mencapai kinerja Deputy Bidang Kemaritiman tahun 2019 sesuai yang telah diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019, anggaran Deputy Bidang Keamritiman berjumlah Rp. 5.900.000 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5: pagu Anggaran Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2019

No	Bidang	Jumlah Anggaran
1	Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 1.050.000.000
2	Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 2.750.000.000
3	Asisten Deputy Bidang Perhubungan	Rp 1.050.000.000
4	Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	Rp 1.050.000.000
Total		Rp 5.900.000.000

Realisasi dari total pagu anggaran Deputy Bidang Kemaritiman tahun 2019 sebesar Rp 5.810.619.263 (98,48%) dari total pagu anggaran sebesar

Rp 5.900.000.000. Berikut realisasi penyerapan masing-masing Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman:

Tabel 6: Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2019

No	Bidang	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 1.050.000.000	Rp 1.039.069.551	98,95 %
2	Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 2.750.000.000	Rp 2.700.779.402	98,21%
3	Asisten Deputi Bidang Perhubungan	Rp 1.050.000.000	Rp 1.036.206.765	98,68%
4	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	Rp 1.050.000.000	Rp 1.034.563.545	98,52%
Total		Rp 5.900.000.000	Rp 5.810.619.263	98,48%

B.2. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

B.2.1 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN

Berikut perbandingan realisasi anggaran Deputi Kemaritiman dari tahun 2015-2019:

Tabel 7: Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman periode tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	2015	Rp2.300.000.000	Rp2.218.021.791	96,44%
2	2016	Rp3.150.000.000	Rp2.982.075.980	94,71%
3	2017	Rp4.497.609.000	Rp4.342.408.932	96,55%
4	2018	Rp2.419.200.000	Rp2.388.261.344	98,72%
5	2019	Rp5.900.000.000	Rp5.810.619.263	98,48%



Gambar 35: Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019

B.2.2 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 8: Persentase Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	Rp5.900.000.000	Rp5.810.619.263	98,48%	100%

Efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan. Pencapaian kinerja dari aspek program dan kegiatan dilakukan efisien apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Melihat tabel di atas, persentase realisasi anggaran Deputy Bidang Kemaritiman lebih kecil anggaran yang ditargetkan dan lebih kecil dari persentase capaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Deputy Bidang Kemaritiman sudah efisien.

C. SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Permenpan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Deputy Bidang

Kemaritiman telah melakukan survei untuk meningkatkan kualitas pelayanan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Kementerian/Lembaga.

Responden terdiri dari 67 responden dari Kementerian/Lembaga mitra Deputi Bidang Kemaritiman, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah (Pemda) baik dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, izin prakarsa RPUU maupun terkait fasilitasi sidang kabinet. Kuisisioner terdiri dari pertanyaan tertutup (pilihan) dan pertanyaan terbuka.

Pertanyaan tertutup dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap tiga bentuk layanan utama Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet yaitu:

Survei dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan berupa rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan pelayanan kepada Kementerian/Lembaga terkait meliputi: pertama, pelayanan dalam pemberian fasilitas penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah. Kedua, penyiapan RPerpres, RKeppres, maupun RInpres. Dan, ketiga, koordinasi penyiapan bahan sidang kabinet/rapat terbatas/pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden.

Tingkat kepuasan pengguna layanan dibagi menjadi dua kategori besar yaitu memuaskan dan tidak memuaskan. Kategori memuaskan dibagi menjadi 3 subkategori yaitu sangat puas, puas dan cukup puas, kategori tidak memuaskan dibagi menjadi 2 subkategori menjadi kurang puas dan tidak puas.

Jawaban sangat puas dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan pelayanan sebesar 100%, jawaban puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas menggambarkan tingkat pelayanan Sekretariat Kabinet masih di bawah 100% secara berjenjang ke bawah. Terhadap pelayanan yang masih kurang dari 100% memberikan ruang kepada Sekretariat Kabinet untuk melakukan perbaikan pelayanan guna mencapai tingkat keberhasilan 100%. Berikut hasil survei kepuasan pengguna layanan Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2019:

C.1. REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGARAAN PEMERTINTAHAN DI BIDANG KEMARITIMAN

No	Kategori	Tidak memuaskan					Memuaskan					responden memuaskan/total responden (67)	Kesimpulan	
		0	1	2	3	4	5							
1	Apakah Kementerian/Lembaga anda pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan pemerintah?	Ya = 66 Tidak =1										98,51%	98,51% responden pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan pemerintah	
2	Bagaimanakah tingkat kepuasan anda terhadap fasilitas penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud dalam angka 1?	0	0	2	5	40	20						97,01%	97,01% responden merasa puas terhadap fasilitas penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet
Jumlah Responden		2		65										
3	Bagaimanakah kecepatan pelayanan fasilitas Sekretariat Kabinet terkait permasalahan kebijakan pemerintah?	0	0	1	10	40	16						98,51%	98,51% responden menilai pelayanan Sekretariat Kabinet terkait permasalahan kebijakan pemerintah sudah cepat
Jumlah Responden		1		66										
4	Bagaimanakah ketepatan materi dalam pelayanan fasilitas Sekretariat Kabinet terkait permasalahan kebijakan pemerintah?	0	0	1	8	42	16						98,51%	98,51% responden menilai materi dalam pelayanan fasilitas Sekretariat Kabinet terkait permasalahan kebijakan pemerintah sudah

No	Kategori	Tidak memuaskan					Memuaskan					responden memuaskan/total responden (67)	Kesimpulan	
		0	1	2	3	4	5							
	Jumlah Responden	1					66						tepat	
5	Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan kebijakan pemerintah?	0	0	2	6	32	27						97,01%	97,01% responden menilai kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan pemerintah sudah baik
	Jumlah Responden	2					65							
6	Bagaimanakah manfaat surat Sekretaris Kabinet hasil fasilitasi membantu penyelesaian terkait permasalahan kebijakan pemerintah?	0	0	2	10	34	21						97,01%	97,01% responden menilai surat Sekretaris Kabinet hasil fasilitasi bermanfaat guna penyelesaian terkait permasalahan kebijakan pemerintah
	Jumlah Responden	2					65							

C.2. REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEMARITIMAN

No	Kategori	Tidak memuaskan					Memuaskan					responden memuaskan/total Responden	Kesimpulan
		0	1	2	3	4	5						
1	Apakah Kementerian/Lembaga Anda pernah mengajukan	Ya = 56 Tidak = 11					83,58%					83,58% responden pernah mengajukan Rancangan Peraturan	

No	Kategori	Tidak memuaskan					Memuaskan					responden memuaskan/total Responden	Kesimpulan	
		0	1	2	3	4	5							
	Pertanyaan													
	Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden atau Rancangan Instruksi Presiden kepada Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ?													Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, atau Rancangan Instruksi Presiden kepada Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
2	Bagaimanakah tingkat kepuasan anda atas pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penyiapan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, atau Rancangan Instruksi Presiden dalam pertanyaan nomor 1?	1	0	2	10	41	13					95,52%	95,52% responden merasa puas atas pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penyiapan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, atau Rancangan Instruksi Presiden	
	Jumlah Responden		3				64							
3	Bagaimanakah kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, atau Rancangan Instruksi Presiden?	1	0	2	11	42	11					95,52%	95,52% responden menilai pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, atau Rancangan Instruksi Presiden sudah cepat	
	Jumlah Responden		3				64							

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan					Memuaskan			responden memuaskan/total Responden	Kesimpulan
		0	1	2	3	4	5				
4	Bagaimanakah kesesuaian substansi Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden yang disiapkan oleh Sekretariat Kabinet dengan yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga anda?	1	0	1	12	42	11			97,01%	97,01% responden menilai substansi Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Sekretariat Kabinet sudah sesuai dengan pengajuan Kementerian/Lembaga
Jumlah Responden		2					65				
5	Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, atau Rancangan Instruksi Presiden?	1	0	1	11	35	19			97,01%	97,01% responden menilai kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, atau Rancangan Instruksi Presiden sudah baik
Jumlah Responden		2					65				

C.3. REKOMENDASI MATERI SIDANG KABINET, RAPAT, ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
DI BIDANG KEMARITIMAN

No	Kategori	Tidak memuaskan					Memuaskan					responden memuaskan/total Responden	Kesimpulan
		0	1	2	3	4	5						
1	Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	1	10	38	18	98,51%	98,51% responden menilai koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sudah baik				
	Jumlah Responden	1					66						
2	Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap fasilitas penyelesaian masalah terkait penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	2	11	41	13	97,01%	97,01% responden merasa puas terhadap fasilitas penyelesaian masalah terkait penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden				
	Jumlah Responden	2					65						
3	Bagaimanakah tingkat kecepatan pelayanan fasilitas Sekretariat Kabinet terkait permasalahan penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	1	10	41	15	98,51%	98,51% responden menilai pelayanan fasilitas Sekretariat Kabinet terkait permasalahan penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sudah cepat				
	Jumlah Responden	1					66						

No	Kategori	Tidak memuaskan					Memuaskan					responden memuaskan/total Responden	Kesimpulan	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4	Pertanyaan Bagaimanakah ketepatan materi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan penyiapan bahan Sidang Terbatas/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	1	12	37	17						98,51%	98,51% responden menilai pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sudah tepat
	Jumlah Responden		1									66		
5	Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	1	10	42	14						98,51%	98,51% responden menilai kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sudah baik
	Jumlah Responden		1									66		
6	Bagaimana penyampaian informasi mengenai Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas kepada Saudara?	0	0	1	10	41	15						98,51%	98,51% responden menilai penyampaian informasi mengenai Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas sudah memadai
	Jumlah Responden		1									66		

No	Kategori	Tidak memuaskan					Memuaskan					responden memuaskan/total Responden	Kesimpulan
		0	1	2	3	4	5						
7	Pertanyaan Bagaimanakah kecukupan waktu penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	1	17	34	15	98,51%	98,51% responden menilai kecukupan waktu penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sudah memadai				
Jumlah Responden		1					66						

C.4. SARAN PERBAIKAN DARI PENGGUNA LAYANAN

Institusi	Saran untuk peningkatan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritim	Saran untuk peningkatan rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritim	Saran untuk peningkatan rekomendasi materi sidang kabinet rapat/ pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritim
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritim	<p>1. Pertahankan yang sudah baik dan jangan cepat puas diri</p> <p>2. Koordinasi untuk melakukan perubahan terhadap kekurangan yang terjadi</p> <p>3. Perlu diadakan koordinasi yang lebih erat dan intens dalam bentuk rapat koordinasi, ataupun</p>	<p>1. Sinkronisasi</p> <p>2. Perlu penguatan dan penajaman substansi serta urgensi kebutuhan regulasi bagi penyelesaian masalah/pemenuhan ketentuan agar presisi dan proporsional</p>	<p>1. Dilakukan inovasi, dan mudah dipahami bahan yang disampaikan</p> <p>2. Informasi mengenai jadwal rapat terbatas kabinet ataupun jadwal rapat intern kiranya dapat disampaikan satu minggu sebelum pelaksanaan</p>

Institusi	Saran untuk peningkatan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman	Saran untuk peningkatan rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman	Saran untuk peningkatan rekomendasi materi sidang kabinet rapat/ pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman
	FGD, guna mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya		ratas kabinet atau rapat intern, sehingga dapat disiapkan bahan ratas kabinet yang lebih baik kementerian/lembaga.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu nya fasilitasi untuk penyederhanaan prosedur hibah aset ke daerah (terkait proyek yang didanai APBN/lainnya di daerah) 2. Percepat Birokrasi 3. Semakin baik jika sudah mengadopsi IT 4. Agar senantiasa meningkatkan komunikasi antar K/L 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kembali peran serta masyarakat luas dalam penyempurnaan substansi rancangan peraturan perundang-undangan bidang kemaritiman 2. Percepat Birokrasi 3. Semakin baik jika mengaplikasikan dalam IT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penyampaian hasil sidang kabinet 2. Lebih sering menjadwalkan rapat antar K/L terkait arahan/Instruksi Presiden 3. Arahan Presiden selama ini hanya diberikan kepada Menteri dan Sesmenko. Perlu dipikirkan agar Arahan Presiden bisa kepada seluruh pegawai dengan tetap menjaga rahasia 4. Saat ini sudah baik hanya ketepatan dan kecepatan nya saja ditingkatkan

Institusi	Saran untuk peningkatan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman	Saran untuk peningkatan rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman	Saran untuk peningkatan rekomendasi materi sidang kabinet rapat/ pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman
Kementerian Kelautan dan Perikanan	<p>Kegiatan penyelesaian permasalahan yang di fasilitasi Setkab agar dapat didorong seefektif mungkin hingga tahap pengambilan keputusan, sehingga Rakor-Rakor yang diadakan di Setkab menjadi langkah solutif dan bukan hanya memperpanjang proses birokrasi</p> <p>2. Membantu dan mendukung percepatan kebijakan kelautan dan perikanan yang bersifat strategis lintas sektor, misalnya peraturan presiden tentang perencanaan ruang laut kawasan strategis nasional. dll</p>	Bila dapat cukup prosun, sudah merupakan izin prakarsa, sehingga mempercepat proses	Komunikasi dengan PIC dan/atau <i>contact person</i> pada <i>middle manager</i> untuk lebih mempercepat proses
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>1. Agar penyampaian undangan atau permintaan bahan dari Setkab bisa dikirim tidak terlalu dekat waktunya</p> <p>2. SLA</p> <p>3. Lebih sering untuk dilakukan koordinasi terkait permasalahan</p>	Sudah baik	<p>1. Agar ada periode yang pasti (misal tiap satu bulan sekali) terhadap konfirmasi atas arahan presiden yang perlu ditindaklanjuti</p> <p>2. Agar lebih sering diangkat isu tumpang tindih aturan antarK/L</p>

Institusi	Saran untuk peningkatan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman	Saran untuk peningkatan rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman	Saran untuk peningkatan rekomendasi materi sidang kabinet rapat/ pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman
	yang dihadapi sektor dan dapat memfasilitasi penyelesaian antara K/L maupun daerah		sehingga dapat diharmonisasikan
Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan Kualitas Kerja 2. Untuk ditingkatkan lagi koordinasi dengan Kementerian Perhubungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ditingkatkan koordinasi langsung setelah proses administrasi/surat menyurat 2. Perlunya pemahaman terkait substansinya 3. Tingkatkan Kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu diberikan interval waktu yang cukup dalam menyiapkan bahan rapat/sidang/pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden/Wakil Presiden 2. Perlu waktu yang cukup utk menyiapkan materi
Kementerian Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme koordinasi sdh bagus dan mohon terus ditingkatkan. Usul dibentuk <i>Dashboard</i> layanan Setkab yg memperlihatkan status dan progres layanan kemudahan pelaksanaan tindak lanjut dan koordinasi 2. Harus terus eksis dan sesuai Tupoksi 3. Pertahankan koordinasi yang telah dilakukan ini, agar lebih kuat kendalanya oleh Sekab di Bidang Kemaritiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Lintas sektor antar KL terkait dalam memperkaya substansi sesuai tulusi KL 2. Rapat intensif terus dilakukan yang dihadiri oleh pengambil keputusan 3. Mohon apabila ada kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi kami dapat disertakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah baik dan memenuhi kebutuhan 2. Materi terkait antar KL segera dikordinasikan agar dapat segera tindak lanjut 3. Tingkatkan sesuai dengan jadwal materi tersebut

<p>Institusi</p>	<p>Saran untuk peningkatan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman</p>	<p>Saran untuk peningkatan rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman</p>	<p>Saran untuk peningkatan rekomendasi materi sidang kabinet rapat/ pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman</p>
<p>Badan Usaha Milik Negara</p>	<p>Tetap dipertahankan komunikasi baik yang sudah terbentuk</p>		
<p>Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab /Kota)</p>	<p>Updating Informasi Ke Pemda Tentang Suatu Kebijakan Harus Lebih Intensif</p>	<p>Semoga lebih baik</p>	

SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN KEMARITIMAN 2019

Dalam rangka:

1. Memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

16 Des 2019 - 3 Jan 2020

Link : <http://bit.ly/surveimaritim2019>

67 Responden

16	Kemenkomarvest	7	KKP
9	Kemenkoekon	7	Pemda
9	KemenESDM	6	Kemenhub
9	Kemenparekraf	4	BUMN



Pelayanan dalam pemberian fasilitas penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah



Tingkat kepuasan, manfaat surat Sekretaris Kabinet, kualitas komunikasi, dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitas penyelesaian terkait permasalahan kebijakan pemerintah adalah sebesar 97%, masuk dalam kategori AA (sangat memuaskan)



Tingkat kecepatan pelayanan, ketepatan materi dalam pelayanan membantu penyelesaian permasalahan kebijakan pemerintah adalah sebesar 99%, masuk dalam kategori AA (sangat memuaskan)

Pelayanan penyajian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, maupun Rancangan Instruksi Presiden



Tingkat kepuasan dan kecepatan sebesar 96%, masuk dalam kategori AA (sangat memuaskan)



Tingkat kesesuaian dan kualitas komunikasi dan/atau koordinasi sebesar 97%, masuk dalam kategori AA (sangat memuaskan)

Pelayanan penyajian bahan sidang Kabinet/rapas Terbatas/ Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden



Tingkat koordinasi, kecepatan, ketepatan, kualitas komunikasi, penyempulan informasi, secukupnya waktu sebesar 96%, masuk dalam kategori AA (sangat memuaskan)



Tingkat kepuasan adalah sebesar 97%, masuk dalam kategori AA (sangat memuaskan)

Tidak terajut Hasil Survei, Deputi Bidang Kemaritiman akan:

- ✓ meningkatkan intensitas pertemuan formal (Fakor, FGD);
- ✓ kerja sama dengan Kemenko untuk mengawal permasalahan lintas sektor;
- ✓ meningkatkan money bekerja sama dengan K/L terkait;
- ✓ mengawal pengembangan SITAP

Gambar 36: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2019

D. SISTEM INFORMASI TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN (SITAP)

Deputi Bidang Kemaritiman sebagai anggota pengarah Tim Pengelola *E-Government* Sekretariat Kabinet, selama tahun 2019 telah melakukan langkah-langkah pengembangan aplikasi SITAP, diantaranya:

1. Pada tanggal 14 Januari 2019, Deputi Bidang Kemaritiman mengadakan rapat koordinasi perkembangan tindak lanjut arahan Presiden dengan mengundang 4 Sekretaris Kementerian Koordinator dan perwakilan dari setiap ke deputian di lingkungan Sekretariat Kabinet. Rapat membahas perkembangan pelaporan tindak lanjut arahan Presiden. Hasil rapat yang perlu ditindaklanjuti segera yaitu:
 - a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tindak lanjut arahan Presiden pada Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP);
 - b. Tindak lanjut penyelesaian hambatan teknis pada aplikasi SITAP.
2. Pada tanggal 6 Februari 2019, Deputi Bidang Kemaritiman mengadakan rapat Pembahasan Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dengan mengundang perwakilan dari setiap ke deputian di lingkungan Sekretariat Kabinet, perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan tim dari PT Telkom. Hasil rapat terkait pengembangan sistem yaitu:
 - a. Penambahan kolom *chat* tindak lanjut untuk menginformasikan kepada Kemenko apabila ada laporan yang belum selesai atau tidak sesuai;
 - b. Penambahan kolom catatan untuk mengisi informasi perkembangan tindak lanjut yang dimiliki oleh Setkab;
 - c. Penambahan fitur tombol *request* pada Deputi Substansi lainnya yang belum mendapatkan disposisi dari Wakil Sekretaris Kabinet, untuk meminta kepada Deputi Substansi Utama *sharing* arahan Presiden pada Ratas yang secara substansi menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Penambahan fitur persentase perkembangan laporan tindak lanjut dari Kemenko sebagai indikator tindak lanjut arahan Presiden telah selesai (warna hijau), sedang ditindaklanjuti (warna kuning), dan belum ditindaklanjuti (warna merah).
3. Pada tanggal 18 April 2019, Deputi Bidang Kemaritiman mengadakan rapat pembahasan RKepsekab tentang SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan

Presiden melalui SITAP di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing kedeputian, Biro SDM Ortala dan Pusat Data dan Teknologi Informasi;

4. Pada tanggal 7 Mei 2019, Deputi Bidang Kemaritiman mengirimkan memorandum Paraf Persetujuan RKepreskab tentang SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui SITAP di Lingkungan Sekretariat Kabinet kepada Deputi Bidang Administrasi untuk kemudian disahkan;
5. Pada tanggal 14 Juni 2019, Sekretaris Kabinet menetapkan RKepreskab Nomor 40 Tahun 2019 tentang SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui SITAP di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
6. Pada tanggal 12 Juli 2019, Deputi Bidang Kemaritiman mengirimkan memorandum perihal Undangan Rapat Pembahasan Perkembangan Pengisian Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) kepada Deputi Bidang Polhukam, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang PMK, Deputi Bidang DKK, dan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. Kegiatan dilakukan pada tanggal 12, 15, dan 16 Juli 2019 yang difokuskan untuk pengisian tindak lanjut arahan Presiden;
7. Pada tanggal 6 Agustus 2019, Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0702/Seskab/08/2019 menyampaikan Laporan Progres Tindak lanjut Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Periode Kabinet Kerja (Oktober 2014-Juni 2019) kepada Presiden. Memorandum juga melampirkan *Briefing sheet*, infografis, dan matriks rekapitulasi tindak lanjut Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet;
8. Pada tanggal 15 Oktober 2019, Deputi Bidang Kemaritiman menyampaikan langsung Buku laporan tindak lanjut arahan Presiden periode 2014-2019 kepada Sekretaris Kabinet dalam acara Rapat Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019;
9. Pada tanggal 26 Desember 2019, Deputi Bidang Kemaritiman mengadakan rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang dihadiri oleh perwakilan dari Kedeputian Bidang Kemaritiman, Kedeputian Bidang DKK, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi. Rapat membahas terkait bisnis proses SITAP yang sudah mengakomodasi pengisian laporan tindak lanjut langsung dari Kementerian Teknis dan membahas terkait tampilan SITAP ke depannya.

Selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman juga aktif melakukan *monitoring* terkait tindak lanjut Arahan Presiden di bidang kemaritiman melalui aplikasi SITAP Kedeputan Bidang Kemaritiman. Berikut jumlah rekapitulasi tindak lanjut Arahan Presiden di Kedeputan Bidang Kemaritiman selama periode 2014 - 2019 :

TAHUN	JUMLAH RATAS/SKP	KEGIATAN TINDAK LANJUT	LAPORAN TINDAK LANJUT	INDIKATOR TINDAK LANJUT		
				MERAH	KUNING	HIJAU
2014	8	10	10	1	1	8
2015	25	34	34	0	5	29
2016	23	27	27	1	3	23
2017	45	58	58	0	26	32
2018	17	17	17	0	9	8
2019	25	79	50	0	16	34
JUMLAH	143	225	196	2	60	134

Penjelasan makna merah, kuning dan hijau pada tabel di atas yakni sebagai berikut:

Merah : Sulit terwujud

Kuning : Perlu kerja keras

Hijau : Sudah berprogress atau selesai



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Deputi Bidang Kemaritiman telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj ini sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada tahun 2019. Pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2019 secara keseluruhan dapat dikategorikan “sangat baik” yang mana pencapaian kinerja dari setiap indikator kinerja utama mencapai 100%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian yang baik ini antara lain:

- a. Posisi dan peran Deputi Bidang Kemaritiman yang turut serta dalam pembahasan program dan kebijakan pemerintah yang dibahas pada Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, Audiensi Sekretaris Kabinet,
- b. Aktifnya Deputi Bidang Kemaritiman melakukan *debottlenecking* dengan Kementerian/Lembaga dan para *stakeholder* terkait melalui rapat koordinasi, sosialisasi dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dan isu-isu penting bidang kemaritiman.

- c. Aktifnya Deputi Bidang Kemaritiman melakukan pemantauan ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan terkait program kebijakan pemerintah dan mengadakan tanya jawab langsung dengan para pelaku usaha serta pihak terkait.
- d. *Monitoring* dan evaluasi secara berkala terkait Arahan Presiden melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dan dilaporkan oleh Kementerian Koordinator kepada Sekretariat Kabinet.
- e. Keterlibatan Deputi Bidang Kemaritiman sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan, atau Kelompok Kerja tingkat Nasional dan Internasional terkait evaluasi dan analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman.

Meskipun pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman sudah sangat baik, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya:

- a. Realisasi kegiatan belum sesuai dengan perencanaan, seperti adanya perubahan jadwal pelaksanaan dan perubahan lokasi kunjungan. Hal ini disebabkan karena sering kali terdapat penugasan mendadak dan *urgent* yang bersamaan dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan.
- b. Belum adanya dukungan sistem *database* yang terintegrasi untuk mengumpulkan seluruh data dan informasi terkait substansi pekerjaan. Saat ini data dan informasi masih terpusat di masing-masing bidang saja.
- c. Belum optimalnya dukungan Sumber Daya Manusia secara kuantitas maupun kompetensi SDM.

B. REKOMENDASI

Untuk tetap mempertahankan pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan dengan tetap berupaya untuk mengatasi berbagai kelemahan dan tantangan, Deputi Bidang Kemaritiman akan melakukan upaya antara lain:

- a. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman melalui peningkatan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
- b. Pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dengan mengkomodir dokumen SRS (*Software Requirement Specification*) yang telah disusun, sehingga diharapkan SITAP menjadi aplikasi *monitoring*

Arahan dan Janji Presiden yang kredibel dan akuntabilitas serta dapat diakses oleh seluruh kementerian/lembaga.

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dari masukan responden survei kepuasan pengguna layanan diantaranya akan menjaga komunikasi baik formal maupun informal, meningkatkan *debottlenecking* dengan para *stakeholder* dan melakukan pemantauan terkait permasalahan program dan kebijakan di bidang kemaritiman.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2019



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Deputy Bidang Kemaritiman

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.1.050.000.000,-
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.2.750.000.000,-
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan	Rp.1.050.000.000,-
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.1.050.000.000,-
Total Anggaran	Rp.5.900.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

2. Matriks Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman

Sasaran Program	: Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman					
	Kinerja			Alokasi Anggaran		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 %	100 %	100 %	Rp 5.900.000.000	Rp 5.810.619.263	98,48%
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan POU di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 %	100 %	100 %			
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 %	100 %	100 %			

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
CAPAIAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN BULAN JANUARI TAHUN 2019											
1	Program Kemaritiman yang siap di luncurkan dan menarik bagi masyarakat	1.(2019)	02/01/2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan	Deputi-Seskab
2	perubahan rancangan peraturan presiden tentang peta panduan (road map) pengembangan industri rumput laut nasional tahun 2018 2021	3.(2019)	03/01/2019	Sekretaris Kabinet	tindaklanjuti	B-9/Maritim/1/2019	'7 Januari 2019	Sesmenk 0	OUTCOME IKK 2	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan	Deputi-Seskab
3	penyampaian hasil rapat pengembangan sipat	4.(2019)	03/01/2019	Eselon I Setkab, Kapusdatin	-	-	-	-	PELAKSANAAN RB	Dimanfaatkan Deputi Administrasi dalam pengambilan keputusan	Deputi-Deputi
4	Laporan Perjalanan Dinas menteri ESDM ke Italia 6-11 November 2018	6.(2019)	04/01/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Proses lbh lanjut	M-06	07/01/2019	Presiden	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden
5	Penyampaian bahan dan briefing sheet audiensi chevron dengan seskab	7.(2019)	07/01/2019	Sekretaris Kabinet	Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan	Deputi-Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
6	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna tentang Program dan Kegiatan Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 di Istana Negara	8.(2019)	07/01/2019	Sekretaris Kabinet	Noted - Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK 3	Direspon dan Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan	Deputi-Seskab
7	Briefing Sheet Bahan Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	9.(2019)	07/01/2019	Seskab, Presiden cc Waseskab, Dep DKK	Proses lbh lanjut	M-20	08/01/2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	OUTCOME IKK 3	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden
8	Perkembangan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Kilang Minyak Tuban	11.(2019)	08/01/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan	Deputi-Seskab
9	Laporan Rapat Pembahasan Mengenai Permohonan Kehadiran Presiden pada Acara Pengoperasian Utilitas dan Groundbreaking Pembangunan Beberapa Fasilitas Tenant di Kawasan Industri Jorong	12.(2019)	08/01/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Proses lbh lanjut	M-49 dan B-15/Seskab/Mari tim/01/2019 dan B-16/Seskab/Mari tim/01/2019	11/01/2019 dan 15/01/2019	Presiden dan Menteri Perhubungan dan Ketua KPPIP	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
10	permohonan audiensi terkait perkembangan pemenuhan hak korban kasus kecelakaan pesawat lion air jt-610	13.(2019)	10/01/2019	Sekretaris Kabinet dan Kementerian Perhubungan	Proses lbh lanjut	B-13/Seskab/Manti m/1/2019	14/01/2019	Menteri Perhubungan	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan Diteruskan ke KemenHub	Deputi-Seskab-Instansi Lain
11	Permohonan Penugasan Kepada PT Pelindo I (Persero) di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Batu Ampar, Batam	14.(2019)	10/01/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B-12/Seskab/Manti m/1/2019	14/01/2019	Menko Perekonomian	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan	Deputi-Seskab-Instansi Lain
12	Usulan pelaksanaan ratas membahas ruu tentang minyak dan gas bumi pada rentang waktu tanggal 21-24 januari 2019	15.(2019)	11/01/2019	Seskab, Presiden cc Waseskab, Dep DKK	Proses lbh lanjut	M-41	11/01/2019	Presiden	OUTCOME IKK 3	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden
13	Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Indonesia Ocean Day di COP 24 Katowice Polandia	16.(2019)	11/01/2019	Seskab cc Waseskab	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan	Deputi-Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
14	Permintaan Anggota Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN)	17.(2019)	11/01/2019	Deputi Bidang Perencanaan	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan oleh Deputi Perencanaan sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Deputi
15	Penyampaian Bahan Ratas tentang Peningkatan Kesiagaan menghadapi bencana	18.(2019)	14/01/2019	Deputi Bidang PMK	Proses lbh lanjut	M-62	07/02/2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	OUTCOME IKK 3	Bahan diserahkan kepada PMK sebagai kompilator untuk diserahkan ke Seskab	Deputi-Deputi
16	Briefing Sheet Ratas tentang Percepatan Program kendaraan bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan	19.(2019)	14/01/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Proses lbh lanjut	M-59	14/01/2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	OUTCOME IKK 3	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden
17	Penyampaian Masukan terkait usulan Gubernur Bali untuk mengubah Perpres Nomor 51 Tahun 2014 (Perpres Rencana Tata Ruang Sarbagita)	23.(2019)	15/01/2019	Deputi Bidang Perencanaan	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan oleh Deputi Perencanaan sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Deputi

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
18	permohonan kunjungan kehormatan menteri pertanian dan perikanan timor leste di manado, 31 oktober -2 november 2018	25.(2019)	15/01/2019	Sekretaris Kabinet	Noted - Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
19	Permohonan Audiensi Stephen Kozicki (Konsep Surat Seskab Ke KemenKP)	26.(2019)	16/01/2019	Seskab, KKP, cc waseskab	Proses lbh lanjut	B-22/Seskab/Mantim/01/2019	17/01/2019	Menteri KKP	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan ditindaklanjuti dengan Surat Seskab	Deputi-Seskab-Instansi Lain
20	Laporan Rapat perubahan Rperpres tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Rumpun Laut Nasional Tahun 2018-2021 (konsep surat seskab ke Menko ekon)	27.(2019)	16/01/2019	Seskab, Menko ekon, cc waseskab	Proses lbh lanjut	B-24/Seskab/Mantim/01/2019	21/01/2019	Menko Perencanaan	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan ditindaklanjuti dengan Surat Seskab	Deputi-Seskab-Instansi Lain
21	Permohonan Izin Pemanfaatan Pangkalan Udara Angkatan Darat Gatot Subroto Way Tuba Kab. Way Kanan menjadi Bandara Penerbangan Sipil (konsep surat seskab kementerian)	29.(2019)	17/01/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B-26/Seskab/Mantim/01/2019	21/01/2019	Menteri Perhubungan	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan ditindaklanjuti dengan Surat Seskab	Deputi-Seskab-Instansi Lain

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
22	Laporan FGD tentang Penguatan Sistem Logistik Perikanan	32.(2019)	17/01/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan	Deputi-Seskab
23	Laporan Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2019	33.(2019)	18/01/2019	Sekretaris Kabinet	Noted - Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan	Deputi-Seskab
24	Penyampaian Data Politik Kebijakan Triwulan I Tahun 2019 Kedeputian Bidang Kemaritiman	34.(2019)	21/01/2019	Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Proses lbh lanjut	M-85	24/01/2019	Presiden	OUTCOME IKK 1	Bahan dikirimkan ke Deputi Polhukum untuk dikompilasi dan diajukan ke Seskab	Deputi-Deputi
25	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas Membahas Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi	35.(2019)	23/01/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Proses lbh lanjut	M-82	23/01/2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	OUTCOME IKK 3	Direspon oleh Seskab, dinaikkan ke Presiden dan dimanfaatkan Presiden sebagai Bahan Ratas	Deputi-Seskab- Presiden
26	Pelaksanaan Peringatan 500 Tahun Magelhaens dan Sail Tidore 2021 (konsep surat seskab ke kemenkomar)	36.(2019)	23/01/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Proses lbh lanjut	M-89 dan B-41/Seskab/Mari tim/01/2019	24/01/2019 dan 29/01/2019	Presiden dan Menkomar	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab, Dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presid en- Instansi Lain
27	Laporan Rapat Koordinasi Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden	37.(2019)	24/01/2019	Waseskab	-	-	-	-	PELAKSANAAN RB	Dimanfaatkan oleh Waseskab untuk bahan pertimbangan	Deputi-Deputi

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	SITAP									dalam pengambilan keputusan	
28	Permohonan Pelaksanaan Red Bull Air Race World Championship 2020 (surat nomor : 69.CE.XXI.2018, tanggal 12 Desember 2018)	38.(2019)	24/01/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B-42/Seskab/Maritim/01/2019	29/01/2019	Menpar	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
29	Koordinasi Penyelesaian Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk Peta Dasar dan Peta Tematik Bidang Kemaritiman	39.(2019)	24/01/2019	Deputi Bidang Perekonomian	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi-Deputi
30	Penyampaian Rencana Kegiatan Kementerian Pariwisata yang Dihadiri Presiden	42.(2019)	24/01/2019	Seskab cc Waseskab, Dep DKK	Noted - Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK 3	Direspon dan dimanfaatkan oleh Seskab untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
31	Laporan hasil survei kepuasan pengguna layanan sekretariat kabinet bidang kemaritiman tahun 2018	43.(2019)	24/01/2019	Seskab cc Waseskab, Dep Admin	Saran.2 -> ditindaklanjuti	-	-	-	PELAKSANAAN RB	Direspon dan dimanfaatkan oleh Seskab untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi-Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
32	Laporan Rapat Perkembangan Kegiatan Pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Blok Rokan Riau	45.(2019)	25/01/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon dan dimanfaatkan oleh Seskab untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
33	Monitoring dan Evaluasi Percepatan PSN Sektor Perhubungan (Pelabuhan, Bandar Udara dan Kereta Api)	46.(2019)	25/01/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor dan tindaklanjuti	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon dan dimanfaatkan oleh Seskab untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
34	Permohonan Paraf persetujuan terhadap Rperpres tentang BOP Kawasan Pariwisata Wakatobi (kosep surat seskab ke Menkomar, menLHK, MenATR, MenpanRB)	47.(2019)	25/01/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B-40/Seskab/maritim/01/2019	29/01/2019	Menkomar, Menpar. KLHK, Menteri Agraria, Menpan RB	OUTCOME IKK 2	Direspon oleh Seskab dan ditindaklanjuti dengan Surat ke K/L	Deputi-Seskab
35	Permohonan Paraf persetujuan terhadap Rperpres tentang BOP Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru (kosep	48.(2019)	25/01/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B-39/Seskab/maritim/01/2019	29/01/2019	Menkomar, Menpar. KLHK, Menteri Agraria, Menpan RB	OUTCOME IKK 2	Direspon oleh Seskab dan ditindaklanjuti dengan Surat ke K/L	Deputi-Seskab-Instansi Lain

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	surat seskab ke Menkomar, menLHK, MenATR, MenpanRB)										
36	Penyampaian Laporan Kinerja Deputy Bidang Kemanitman Tahun 2018	49.(2019)	25/01/2019	Deputi Bidang Administrasi	-	-	-	-	PELAKSANAAN RB	Dimanfaatkan Deputy Bidang Administrasi sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Deputi
37	Usulan Topik Sidang Kabinet	50.(2019)	25/01/2019	Sekretaris Kabinet	Deputi DKK, Pilih yg prioritas	-	-	-	OUTCOME IKK 3	Dimanfaatkan Deputi Dukungan Kerja Kabinet sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
38	Briefing Sheet bahan rapat tentang transportasi jabodetabek	51.(2019)	25/01/2019	Sekretaris Kabinet	Atsip	-	-	-	OUTCOME IKK 3	Direspon dan Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan	Deputi-Seskab
39	Penyelenggaraan Sail Nias 2019 (konsep surat seskab ke Menkomar)	52.(2019)	25/01/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B-44/Seskab/Maritim/1/2019	30/01/2019	Menkomar	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan diindaklanjuti dengan Surat ke K/L	Deputi-Seskab
40	Briefing Sheet Rapat Internal Terkait Energi	54.(2019)	28/01/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Proses lbh lanjut	M-101	28/01/2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	OUTCOME IKK 3	Direspon dan dimanfaatkan oleh Presiden	Deputi-Seskab-Présiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
41	Briefing Sheet Rapat Internal Terkait Sumber Daya Alam	55.(2019)	28/01/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Proses lbh lanjut	M-99	28/01/2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	OUTCOME IKK 3	Direspon dan dimanfaatkan oleh Presiden	Deputi-Seskab Presiden
42	Penyampaian Bahan Rapat tentang Infrastruktur di Bidang Kemaritiman	56.(2019)	29/01/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M-115	29/01/2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	OUTCOME IKK 3	Direspon dan dimanfaatkan oleh Presiden	Deputi-Seskab
43	laporan satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) tahun 2017 dan semester 1 tahun 2018	57.(2019)	29/01/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M-116	29/01/2019	Presiden	OUTCOME IKK 1	Direspon dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab
44	Penyampaian Data Politik kebijakan Triwulan I Tahun 2019 Kementerian Perhubungan	58.(2019)	30/01/2019	Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan Deputi Bidang Administrasi sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
CAPAIAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2019											
1	Ringkasan Eksekutif Laporan Keuangan Gabungan KKKS dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kuartal Iij Tahun 2018	59.(2019)	01/02/2019	Sekretaris Kabinet	Noted - Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan oleh Seskab sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
2	Laporan Rapat Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Satu Kebijakan Satu Peta untuk Peta Dasar Tematik Bidang Kelautan dan Kemaritiman, tanggal 25 Januari 2019 di Setkab	60.(2019)	01/02/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjuthnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan oleh Seskab sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
3	Permohonan Bantuan Peberangan Solar Home System dan Penerangan Jalan Umum (konsep surat seskab ke menpar)	61.(2019)	01/02/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B-50/Seskab/Martim/02/2019	06/02/2019	Menteri pariwisata	OUTCOME IKK 1	Direspon dan ditindaklanjuti dengan Surat Seskab	Deputi-Seskab-Instan si Lain
4	Penyampaian Minat Perugasan untuk Melakukan Pengambilalihan Saham Divestasi PT Vale Indonesia	62.(2019)	01/02/2019	Seskab, Menko Ekon cc Waseskab	Proses lbh lanjut	B-49/Seskab/Martim/02/2019	06/02/2019	Menko Perkonomian	OUTCOME IKK 1	Direspon dan ditindaklanjuti dengan Surat Seskab	Deputi-Seskab-Instan si Lain
5	Laporan Kunker Menteri Kelautan dan Perikanan ke Monako, Polandia, dan Vatikan	63.(2019)	01/02/2019	Seskab cc Waseskab	Monitor tindaklanjuthnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon dan dimanfaatkan oleh Seskab	Deputi-Seskab
6	Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan	64.(2019)	01/02/2019	Seskab cc Waseskab	Monitor tindaklanjuthnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon dan dimanfaatkan oleh Seskab	Deputi-Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SSKAB	NO TU SSKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	Kriteria Sub Urusan Perikanan Tangkap										
7	Surat Mr. Oualid Belaidi tentang Pencarian Pesawat MH370 (konsep surat seskab ke Menhub)	65.(2019)	01/02/2019	Seskab, Menhub cc Waseskab	Proses lbh lanjut	B-51/Seskab/Maritim/02/2019	06/02/2019	Menteri Perhubungan	OUTCOME IKK 1	Direspon dan ditindaklanjuti dengan Surat Seskab	Deputi-Seskab-Instansi Lain
8	Penyampaian Rencana Acara/Kegiatan Bidang Kemanitman Tahun 2019 yang memerlukan Kehadiran Presiden	66.(2019)	01/02/2019	Sekretaris Kabinet	Sampaikan laporan ke Presiden dan Tembusan Kasetspres	-	-	-	OUTCOME IKK 3	Direspon dan dimanfaatkan oleh Seskab	Deputi-Seskab
9	Laporan Peresmian Asosiasi Restoran Indonesia (ARI) di Sydney (konsep surat seskab ke menlu)	70.(2019)	08/02/2019	Sekretaris Kabinet	Setuju	B-62/Seskab/Maritim/02/2019	13/02/2019	Menteri Luar Negeri	OUTCOME IKK 1	Direspon dan ditindaklanjuti dengan Surat Seskab	Deputi-Seskab-Instansi Lain
10	Penyampaian Rencana Acara/Kegiatan Bidang Kemanitman Tahun 2019 yang memerlukan Kehadiran Presiden	71.(2019)	08/02/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Proses lbh lanjut	M-151	11/02/2019	Presiden	OUTCOME IKK 3	Direspon dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab-Présiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
11	Laporan Kunjungan Menteri ESDM ke Kamboja Tanggal 14-16 Januari 2019	72.(2019)	08/02/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon dan dimanfaatkan oleh Seskab	Deputi-Seskab
12	Tindak Lanjut Rapat Sidang Kabinet Paripurna tanggal 7 Januari 2019	73.(2019)	08/02/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon dan dimanfaatkan oleh Seskab	Deputi-Seskab
13	Penyampaian Briefing Sheet Rakornas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)	74.(2019)	74.(2019)	Sekretaris Kabinet	Noted - Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK 3	Direspon dan dimanfaatkan oleh Seskab	Deputi-Seskab
14	Briefing Sheet Bahan Ratas terkait Tarif Transportasi Udara dan Bagasi	76.(2019)	12/02/2019	Seskab, Presiden, cc Waseskab, Dep DKK	Proses lbh lanjut	M-161	13/02/2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	OUTCOME IKK 3	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden
15	Pengaduan Ethiopian Airlines kepada Pemerintah Indonesia	77.(2019)	12/02/2019	Seskab cc Waseskab	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon dan dimanfaatkan oleh Seskab	Deputi-Seskab
16	Penyampaian Briefing Sheet terkait Kebijakan Tarif Trenasportasi Udara dan Penyesuaian Tarif Listrik	78.(2019)	13/02/2019	Seskab- Presiden	Proses lbh lanjut	M-163	13/02/2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	OUTCOME IKK 3	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
17	Bahan masukan terkait permasalahan permasalahannya terhambatnya investasi PT Dizamatra Power Terkait ijin interkoneksi jalur perkeretaapian nasional yang belum terselesaikan	79.(2019)	13/02/2019	Deputi Bidang Perekonomian	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan oleh Deputi Bidang Perekonomian sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Deputi
18	permohonan peresmian pitu cilacap ekspansi tahap I (1x 660 MW) dan pelaksanaan komisioning pitu cilacap ekspansi tahap II (1x1000 mw)	80.(2019)	15/02/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B-71/Seskab/Maritim/02/2019	18/02/2019	Menteri ESDM	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan oleh Seskab sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
19	Penyampaian Dokumen Materi Question and Answer terkait Isu Strategis Bidang Transportasi	81.(2019)	15/02/2019	Seskab, Presiden cc Waseskab	Noted. Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan oleh Seskab sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab-Präsident en
20	Laporan Rapat Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan	82.(2019)	18/02/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan oleh Seskab sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
21	Permohonan Audiensi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	83.(2019)	18/02/2019	Sekretaris Kabinet	Atur Waktunya	-	-	-	OUTCOME IKK ₁	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan oleh Seskab sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
22	Rencana Acara/Kegiatan Peresmian Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Sumatera Utara	85.(2019)	19/02/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M-184	20/02/2019	Presiden	OUTCOME IKK ₃	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab-Présid en
23	Permohonan Persetujuan Mendampingi Kunjungan Kerja Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Sumatera Barat	86.(2019)	20/02/2019	Seskab cc Waseskab	(ditarik/cancel)	-	-	-	OUTCOME IKK ₁	Direspon oleh Seskab dan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
24	Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Rumpun Laut Nasional Tahun 2018-2021	87.(2019)	20/02/2019	Seskab cc Waseskab	Proses lbh lanjut	M-191	21/02/2019	Presiden	OUTCOME IKK ₂	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab-Présid en

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
25	Penyampaian Informasi KUR Nelayan dan Petani Garam terkait Permintaan Waktu Kunker Presiden RI dalam rangka menghadiri Kegiatan Penyaluran KUR Ketahanan Pangan dan Aksi Ekonomi untuk rakyat di Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat	88.(2019)	21/02/2019	Deputi Bidang Perekonomian	-	-	-	-	OUTCOME IKK ₁	Digunakan oleh Deputi Bidang Perekonomian sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Deputi
26	Undangan menghadiri Pameran Pariwisata Internasionalle Tourismus Borse (ITB) di Berlin, Jerman pada tanggal 6-10 Maret 2019	89.(2019)	21/02/2019	Waseskab	-	-	-	-	OUTCOME IKK ₁	Digunakan oleh Waseskab sebagai bahan dalam pengambilan keputusan	Deputi-Deputi
27	Proses atas ucapan Menteri Enggartiasto Lukita (konsep surat seskab kekemendag)	90.(2019)	21/02/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B.0083/Seskab/ Mantim/03/2019	26/03/2019	Menteri Perdagangan	OUTCOME IKK ₁	Direspon oleh Seskab dan ditindaklanjuti dengan Surat Ke K/L	Deputi-Seskab-Instansi Lain

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
28	Tindak Lanjut Penyelesaian Isu Akses Pasar Produk Perikanan pada General Review IJEPA	91.(2019)	22/02/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK ₁	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
29	Laporan Kunker Menteri ESDM ke Roma Tanggal 29-30 Januari 2019	93.(2019)	22/02/2019	Sekretaris Kabinet	Noted Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK ₁	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
30	Laporan Rakor K/L tentang Pembahasan Lanjutan Penyusunan Tanggapan Pemerintah terhadap RUU Migas (Inisiatif DPR), Di Kementerian ESDM, Rabu, 13 Februari 2019	97.(2019)	25/02/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK ₁	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
31	Penyampaian Briefing Sheet Pertemuan antara Seskab dengan gubernur Sulawesi utara, tanggal 26 februari 2019 di setkab	98.(2019)	25/02/2019	Sekretaris Kabinet	Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK ₃	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
32	kunjungan dinas terkait proses bisnis sistem informasi tindak lanjut arahan presiden (sitap) di kementerian koordinator	99.(2019)	26/02/2019	ka pusdatin	-	-	-	-	PELAKSANAAN RB	Dimanfaatkan oleh Pusdatin dalam pengambilan keputusan	Deputi-Asdep
33	Laporan rakor Kawasan Konservasi dan Perlindungan ekosistem pesisir (Zona L3) dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan pengembangan bandar udara internasional I Gusti ngurah Rai Bali, tanggal 7 dan 14 Februari 2019. di Kantor kejaksaan agung RI	103.(2019)	27/02/2019	Waseskab	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan oleh Waseskab sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Deputi
34	Laporan Perkembangan tindak lanjut Ratas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	106.(2019)	28/02/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindak lanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab

CAPAIAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN BULAN MARET TAHUN 2019

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
1	Laporan Hasil Rakor Ruang Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA)	107.(2019)	04/03/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
2	Permohonan Peresmian Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba Sigulatti (konsep surat seskab ke menkomar)	108.(2019)	04/03/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B-93/Seskab/Maritim/03/2019	06/03/2019	Menkomar	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan ditindaklanjuti dengan surat ke K/L	Deputi-Seskab-Instansi Lain
3	Usulan Kegiatan Peresmian Bandar Udara Sialampari Lubuklinggau, Sumatera Selatan	110.(2019)	06/03/2019	Seskab- Presiden	proses lebih lanjut	M-244	07/03/2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	OUTCOME IKK 3	Direspon dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden
4	Tindak Lanjut Hasil FGD dan Raker Deputi Bidang Kemanitman Tahun 2019	112.(2019)	08/03/2019	Asdep- 1,2,3,4	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan oleh para Asdep untuk menindaklanjuti hasil FGD	Deputi-Asdep
5	Permohonan Meresmikan Pasar Ikan Modern Muara Baru	113.(2019)	08/03/2019	Seskab - Presiden	Proses lbh lanjut	M-246	11/03/2019	Presiden	OUTCOME IKK 3	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden
6	Laporan Kegiatan Kunjungan Menteri Pariwisata ke	114.(2019)	13/03/2019	Seskab - Presiden	Proses lbh lanjut	M-263	13/03/2019	Presiden	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	Vietnam dalam rangka menghadiri ASEAN Tourism Forum (ATF) 2019										
7	Penyampaian Notulen Rapat Wakil Presiden tentang Pengembangan Pariwisata Indonesia	115.(2019)	13/03/2019	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan oleh Deputi Dukungan Kerja Kabinet sebagai bahan pengambilan keputusan	Deputi-Deputi
8	Penyampaian Draft SOP tindak lanjut arahan Presiden melalui SITAP	117.(2019)	13/03/2019	Deputi Bidang Administrasi	-	-	-	-	PELAKSANAAN RB	Dimanfaatkan Deputi Administrasi dalam pengambilan keputusan	Deputi-Deputi
9	Tindak Lanjut Arahan Presiden Pada Sidang Kabinet Paripurna/Rapat Terbatas	118.(2019)	15/03/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B.0113/Seskab/ Maritim/03/2019 dan B-238/Maritim/03/2019 (menindaklanjuti Surat Seskab sebelumnya)	19/03/2019 14:44	Para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapoli, Jaks Agung, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab-Instansi Lain

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SSKAB	NO TU SSKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
10	Penyampaian Briefing Sheet Rafas tentang Lanjutan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	119.(2019)	19/03/2019	Seskab- Presiden	Proses lbh lanjut	M-284	19/03/2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	OUTCOME IKK 3	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden
11	Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Integrasi Transportasi Jabodetabek	120.(2019)	19/03/2019	Seskab, Menhub	Proses lbh lanjut	Kosep Surat Seskab ditandatangani namun tidak jadi dikirim karena ada Ratas tgl 19 Maret 2019 terkait TL Integrasi Transportasi Jabodetabek	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon dan dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab- Instansi Lain
12	Penyampaian Bahan Kunjungan ke Lokasi MRT Phase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI	121.(2019)	19/03/2019	Sekretaris Kabinet	Noted - Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK 3	Direspon dan dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
13	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Sekretaris Kabinet dengan Kepala BPH Migas	123.(2019)	20/03/2019	Seskab cc Sahli Polmar	Noted Arsip	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon dan dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab
14	Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna/Rapat Terbatas	124.(2019)	20/03/2019	Dep Polhukam, Dep ekon, Dep PMK	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Kedepuan lain untuk bahan dalam pengambilan keputusan	Deputi-Deputi

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
15	Rperpres tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	125.(2019)	21/03/2019	Seskab- Presiden	Proses lbh lanjut	M-297	22/03/2019	Presiden	OUTCOME IKK 2	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab- Presiden
16	Undangan Pelantikan dan Raker Nasional Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) pada Senin, 1 April 2019 di Lt.1 Gedung Sapta Pesona	126.(2019)	21/03/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B.0119/Seskab/ Maritim/03/2019	25/03/2019	Menteri Pariwisata	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab- Instansi Lain
17	Pembentukan regulasi nasional tentang partisipasi aktif Indonesia di kawasan dasar laut internasional	127.(2019)	21/03/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B.0129/Seskab/ Maritim/03/2019	29/03/2019 10:34	Menteri ESDM, Menkomar, Kumham, KKP	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi-Seskab- Instansi Lain
18	Laporan Kegiatan Pemantauan Sistem Logistik Perikanan serta Pelaksanaan Gerai Percepatan Perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan di	129.(2019)	21/03/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M-301	28/03/2019	Presiden	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Seskab dan dinaikkan ke Presiden	Deputi-Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
20	Provinsi Jawa Tengah Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna/Rapat Terbatas	134.(2019)	26/03/2019	Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Perekonomian, Deputi PMK	-				OUTCOME IKK 1	Digunakan Kedepulian lain untuk bahan dalam pengambilan keputusan	Deputi-Deputi
21	Data Pembangunan Infrastruktur dan Program-Program Kerja di Bidang Kemaritiman Kurun Waktu Oktober 2014 s/d Maret 2019	135.(2019)	26/03/2019	Sekretaris Kabinet	P Emir. Sbg Bahan --> Yg bisa diambil	-			OUTCOME IKK 3	Direspon dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan	Deputi-Seskab
22	Permintaan Trayek Tol Laut ke Kabupaten Halmahera Utara	137.(2019)	27/03/2019	Seskab, Menhub cc Waseskab	Proses lbh lanjut	B.0132/Seskab/ Maritim/03/2019	29/03/2019 11:03	Menteri Perhubungan	OUTCOME IKK 1	Direspon dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan	Deputi-Seskab
23	Data Pembangunan Infrastruktur dan Program-Program Kerja di Bidang Kemaritiman	138.(2019)	27/03/2019	Sekretaris Kabinet	P. Emir Masukan	-			OUTCOME IKK 3	Direspon dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan	Deputi-Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SSKAB	NO TU SSKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	Kurun Waktu Oktober 2014 s/d Maret 2019									keputusan	
24	Permohonan Kunjungan Presiden Ke Kabupaten Mandaling Natal (konsep surat seskab ke MenESDM)	139.(2019)	28/03/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B.0130/Seskab/Manitim/03/2019	29/03/2019 10:34	Menteri ESDM	OUTCOME IKK 3	Direspon Seskab dan ditindaklanjuti dengan surat ke K/L	Deputi-Seskab-Instan si Lain
25	Permohonan pendirian depo bbm di kabupaten kepulauan anambas (konsep surat seskab ke menESDM)	140.(2019)	28/03/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B.0131/Seskab/Manitim/03/2019	29/03/2019 10:34	Menteri ESDM	OUTCOME IKK 1	Direspon Seskab dan ditindaklanjuti dengan surat ke K/L	Deputi-Seskab-Instan si Lain
DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN PERIODE APRIL TAHUN 2019											
1	Inventarisasi Program dan Kegiatan K/L yang mendukung Pembangunan Sumber Daya Manusia	M.0141/M aritim/04/2 019	02/04/2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputi Ekon untuk pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
2	Percepatan Laporan Hasil Tindak Lanjut Arahan Presiden/Kementerian/Le m baga Mitra Kerja Deputi	M.0142/M aritim/04/2 019	02/04/2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputi Ekon untuk pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
3	Usulan Rencana Acara/Kegiatan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 yang Perlu Dihadiri Presiden	M.0146/M aritim/04/2 019	08/04/2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Outcome 3	Digunakan Deputi DKK untuk pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
4	Usulan Kegiatan Peresmian Bandar Udara Tjilik Riwut, Kalimantan Tengah	M.0147/M aritim/04/2 019	08/04/2019	Deputi -> Seskab	Sdh diresmikan	-	-	-	Outcome 3	direspon Seskab	Deputi -> Seskab/Presiden
5	Penyampaian tindak lanjut janji presiden saat kunjungan kerja agustus 2016 s.d desember 2018	M.0148/M aritim/04/2 019	08/04/2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputi DKK untuk pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
6	Penyampaian Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Maret 2019	M.0151/M aritim/04/2 019	11/04/2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputi Ekon untuk pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
7	Penyampaian Tindak Lanjut Janji Presiden Saat Kunjungan Kerja Presiden	M.0152/M aritim/04/2 019	11/04/2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputi DKK untuk pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
8	Laporan Progres tindak lanjut arahan Presiden pada Sidang Kabinet Periode	M.0153/M aritim/04/2 019	12/04/2019	Deputi -> Seskab/Presiden	Proses lbh lanjut	M-342	15/04/2019	Presiden	Outcome 1	Maju Presiden	Deputi -> Seskab/Presiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	Kabinet Kerja (26 Oktober 2014-31 Desember 2018)										
9	Permohonan Walikota Surabaya guna Fasilitas Percepatan Addendum Perjanjian Jual Beli Listrik PLTsa Benowo (konsep surat seskab ke Menkomar)	M.0154/M aritim/04/2019	16/04/2019	Deputi -> Seskab/K/L	Proses lbh lanjut	B.0151/Seskab/ Maritim/05/2019	20-May-2019	Menkomar	Outcome 1	direspon Seskab	Deputi -> Seskab/K/L
10	Percepatan Penetapan RPP Perencanaan Ruang Laut	M.0156/M aritim/04/2019	16/04/2019	Deputi -> Seskab	Setuju -> Usulkan	-	-	-	Outcome 2	Maju Presiden	Deputi -> Seskab
11	Bahan Rapat Terbatas Tentang Tindak Lanjut Kunjungan Presiden ke Arab Saudi	M.0157/M aritim/04/2019	18/04/2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Outcome 3	Digunakan Deputi Ekon untuk pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
12	Laporan Surat Bupati Nabire Terkait Tindak Lanjut Kunker Presiden (konsep surat seskab ke Menhub)	M.0158/M aritim/04/2019	18/04/2019	Deputi -> Seskab/K/L	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 3	direspon Seskab	Deputi -> Seskab/K/L

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SSKAB	NO TU SSKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
13	Usulan Rkeppres tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) (konsep surat seskab ke Mensesneg)	M.0159/M aritim/04/2019	18/04/2019	Deputi -> SSKAB/K/L	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 2	direspons SSKAB	Deputi -> SSKAB/K/L
14	Laporan Rapat Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk Peta Dasar Tematik Bidang Kelautan dan Kemanitman, tanggal 28 maret 2019 di jakarta (konsep surat seskab ke menkomar)	M.0160/M aritim/04/2019	18/04/2019	Deputi -> SSKAB/K/L	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	direspons SSKAB	Deputi-Seskab-Instansi Lain
15	Tindak Lanjut Integrasi Transportasi Jabodetabek (konsep surat seskab ke Gubernur DKI)(konsep surat seskab ke menkeu, MenPUPERA, Menhub, MenPPN/Bappen)	M.0161/M aritim/04/2019	22/04/2019	Deputi -> SSKAB/K/L	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	direspons SSKAB	Deputi-Seskab-Instansi Lain

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
16	as. MenBUMN) Perkembangan Rencana Peningkatan Status Pelabuhan Swarangan/Pelai hari menjadi Pelabuhan Utama	M.0162/M aritim/04/2 019	23/04/2019	Deputi -> Seskab	Monitor Tindaklanj utnya	-	-	-	Outcome 1	direspon Seskab	Deputi -> Seskab
17	Laporan Progres tindak lanjut arahan Presiden pada Sidang Kabinet Periode Kabinet Kerja (26 Oktober 2014-31 Desember 2018)	M.0163/M aritim/04/2 019	26-Apr-2019	Deputi -> Waseskab	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Waseskab sebagai pengambilan keputusan	Deputi -> Waseskab
18	Laporan Rapat Persiapan Penyelenggaraan Sail Nias 2019	M.0164/M aritim/04/2 019	29/04/2019	Deputi -> Waseskab	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Waseskab sebagai pengambilan keputusan	Deputi -> Waseskab
19	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Kunjungan ke Production Plant dan R&D Center Hyundai Motor, Korea Selatan, tanggal 27 Februari - 1 Maret 2019	M.0165/M aritim/04/2 019	29-Apr-2019	Deputi -> Seskab	Monitor tindaklanj utnya	-	-	-	Outcome 1	direspon Seskab	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
20	Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Renaksi KKI) Tahun 2018	M.0166/M aritim/04/2019	29-Apr-2019	Deputi -> Seskab/Presiden	Proses lbh lanjut	M.0382/Seskab/05/2019	02-May-2019	Presiden	Outcome 1	Maju Presiden	Deputi -> Seskab/Presiden
DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN PERIODE MEI TAHUN 2019											
1	Usulan Rapat Terbatas Persiapan Angkatan Lebaran 2019/1440 H	M.0169/M aritim/05/2019	02-May-2019	Deputi -> Seskab/Presiden	Proses lbh lanjut	M.0377/Seskab/05/2019	02-May-2019	Presiden	Outcome 3	Maju Presiden	Deputi -> Seskab/Presiden
2	Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas Percepatan Penetapan RPP Perencanaan Ruang Laut	M.0170/M aritim/05/2019	02-May-2019	Deputi -> Seskab/Presiden	Proses lbh lanjut	M.0385/Seskab/05/2019	02-May-2019	Presiden	Outcome 3	Maju Presiden	Deputi -> Seskab/Presiden
3	Laporan Rakor Tarif Angkutan Udara (konsep surat seskab ke Menko Ekon)	M.0171/M aritim/05/2019	02-May-2019	Deputi- Seskab-Instansi Lain	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	direspon Seskab	Deputi-Seskab-Instansi Lain
4	Permohonan Izin Prakarsa Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat	M.0172/M aritim/05/2019	02-May-2019	Deputi- Seskab-Instansi Lain	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 2	direspon Seskab	Deputi-Seskab-Instansi Lain
5	Usulan Kegiatan Peresmian Bandar Udara Internasional	M.0173/M aritim/05/2019	02-May-2019	Deputi -> Seskab	monitor tindak lanjutnya	-	-	-	Outcome 3	direspon Seskab	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SEKAB	NO TU SEKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
6	Yogyakarta Briefing Sheet dan Infografis Ratas Persiapan menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M	M.0174/M aritim/05/2019	02-May-2019	Deputi -> Sekab/Pr esiden	Proses lbh lanjut	M-395	05-May-2019	Presiden (turun tanpa disposisi)	Outcome 3	Maju Presiden	Deputi -> Sekab/Preside n
7	Bahan Rapat Terkait Tarif Angkutan Penumpang Udara	M.0178/M aritim/05/2019	06-May-2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputi Ekon sebagai pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
8	Aspirasi daerah yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat	M.0179/M aritim/05/2019	06-May-2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Ekon sebagai pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
9	Penyampaian Usulan Ratas terkait Penyelesaian Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali	M.0180/M aritim/05/2019	07-May-2019	Deputi -> Sekab/Pr esiden	Proses lbh lanjut	M.0409/Sekab/05/2019	09-May-2019	Presiden	Outcome 1	Maju Presiden	Deputi -> Sekab/Preside n
10	Tanggapan terhadap surat seskab terkait penyediaan bahan bakar minyak di Pangkalan pendaratan ikan (PPI) Tambak Lorok, Semarang, Jawa	M.0181/M aritim/05/2019	07-May-2019	Deputi -> Sekab/K/L	Monitor tindaklanjutnya	B.0343/Maritim/05/2019	09-May-2019	Dirjen Perikanan Tangkap	Outcome 1	Surat Deputi	Deputi -> Sekab/K/L

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	Tengah (konsep surat deputy ke Dirjen Perikanan Tangkap)										
11	Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata dalam rangka Kegiatan Promosi Pariwisata di Eropa Barat Telaahan Menteri LHK atas Usulan Gubernur DKI Jakarta terkait Pembangunan Ibukota Negara (PTPIN)	M.0182/M aritim/05/2019	07-May-2019	Deputi -> Seskab/Presiden	Proses lbh lanjut	M.0413/Seskab/05/2019	09-May-2019	Presiden	Outcome 1	Maju Presiden	Deputi -> Seskab/Presiden
12	Laporan Rapat Pembahasan Rkepseskab tentang SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui SITAP di Lingkungan Sekretariat Kabinet	M.0183/M aritim/05/2019	07-May-2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Ekon sebagai pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
13	Permohonan Audiensi Managing Director Chevron Indoasia Business Unit dan Presiden	M.0184/M aritim/05/2019	07-May-2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Reformasi Birokrasi	Digunakan Adm sebagai pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
14		M.0185/M aritim/05/2019	08-May-2019	Deputi -> Seskab	Arsip	-	-	-	Outcome 1	direspon Seskab	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESMEN CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	Direktur PT Chevron Pacific Indonesia kepada Sekretaris Kabinet										
15	Hasil Rapat Pembahasan Aspirasi Daerah yang Perlu Mendapatkan Dukungan dari Pemerintah Pusat	M.0186/M aritim/05/2 019	10-May-2019	Deputi -> Seskab	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	Outcome 1	direspons Seskab	Deputi -> Seskab
16	Penyampaian tindak lanjut Pengembangan SITAP	M.0187/M aritim/05/2 019	10-May-2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Reformasi Birokrasi	Digunakan Deputi lain sebagai pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
17	Reaktivasi Kereta Api Semarang-Lasem	M.0188/M aritim/05/2 019	10-May-2019	Deputi -> Seskab	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	Outcome 1	direspons Seskab	Deputi -> Seskab
18	Penyampaian RAB dan KAK Pagu Indikatif dan Pengajuan Tambahan Anggaran 2020 Kedeputian Bidang Kemaritiman	M.0191/M aritim/05/2 019	10-May-2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Program dan Anggaran	Digunakan Deputi Adm sebagai pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
19	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Perpres no 9 tahun 2019 tentang Pengembangan	M.0192/M aritim/05/2 019	14-May-2019	Deputi -> Seskab/K/L	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	direspons Seskab	Deputi -> Seskab/K/L

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SSKAB	NO TU SSKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	Taman Bumi (Geopark) Regional Sumatera di Padang, Sumatera Barat										
20	Laporan Rapat Evaluasi Tindaklanjuti Rekomendasi Pokja IV Satuan Tugas Percepatan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (konsep Msurat deputi ke Pokja)	M.0199/M aritim/05/2 019	24-May-2019	Deputi -> SSKab	tindaklanjuti	-	-	-	Outcome 1	direspons SSKab	Deputi -> SSKab
21	Laporan Rakor tindak lanjut arahan Presiden terkait Pengembangan super prioritas (danau toba, Borobudur, labuan bajo flores, dan mandalika). (Konsep surat seskab ke K/L)	M.0203/M aritim/05/2 019	31-May-2019	Deputi -> SSKab	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	direspons SSKab	Deputi -> SSKab
22	Penyampaian Kebutuhan Anggaran Tahun 2020 Kedeputian Bidang Kemaritiman	M.0194/M aritim/05/2 019	21-May-2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Program dan Anggaran	Digunakan Deputi Adim sebagai pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
23	Laporan Tindak Lanjut Arahkan Presiden pada Ratas tentang Persiapan menghadapi Idul Fitri 1440 H/2019 M (konsep surat deputy ke mendagri)	M.0198/M aritim/05/2 019	24-May-2019	Deputi -> Seskab/K/L	Proses lbh lanjut	M.0465/Seskab/ 05/2019 B.0201/Seskab/ Maritim/05/2019	24-May-2019	Mendagri	Outcome 1	Surat Seskab	Deputi -> Seskab/K/L
24	Laporan Rakor Pembahasan Otoritas Pengelola Appendix CITES Perairan (konsep surat seskab ke Kepala LIPI)	M.0201/M aritim/05/2 019	27-May-2019	Deputi -> Seskab	tindak lanjut	B.0388/Maritim/ 06/2019	17-Jun-2019	Kepala LIPI	Outcome 1	Surat Deputi	Deputi -> Seskab
25	Rencana Siemens dalam Pembangunan Powerhouse Energi Baru (konsep surat seskab ke MenESDM)	M.0204/M aritim/05/2 019	31-May-2019	Deputi -> Seskab/K/L	proses lebih lanjut	-	-	-	Outcome 1	direspons Seskab	Deputi -> Seskab/K/L
26	Penyampaian Catatan dan Infografis mengenai Skema Gross Split dalam kegiatan usaha hulu migas serta perbandingan perhitungan bagi hasil proyek indonesia	M.0205/M aritim/05/2 019	31-May-2019	Deputi -> Seskab	Noted - Arsip	-	-	-	Outcome 1	direspons Seskab	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SSKAB	NO TU SSKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	deepwater Development										
DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN PERIODE JUNI TAHUN 2019											
1	Perkembangan Tindak Lanjut Kerja Sama Indonesia dengan Arab Saudi pada Proyek Refinery Development Mater Plan (RDPM) Kilang Cilacap	M.0209/M aritim/06/2019	12-Jun-2019	Deputi -> SSKAB/Presiden	proses lebih lanjut	M-497	12/06/2019	Seskab - > Presiden	Outcome 1	Maju Presiden	Deputi -> SSKAB/Presiden
2	Penyampaian Penyesuaian KAK dan RAB Pagu Indikatorif Kedeputian Bidang Kemanritiman Tahun Anggaran 2020	M.0210/M aritim/06/2019	12-Jun-2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Program dan Anggaran	Digunakan Deputi Adm sebagai pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
3	Permohonan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Presiden Guna Menghadap Terkait Kelangsungan Lapangan Gas, Blok Corridor, Sumatera Selatan	M.0211/M aritim/06/2019	12-Jun-2019	Deputi -> SSKAB/Presiden	proses lebih lanjut	M-498	12/06/2019	Seskab - > Presiden	Outcome 3	Maju Presiden	Deputi -> SSKAB/Presiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SEKAB	NO TU SEKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
4	Penyampaian bahan rapat intern membahas kerja sama Saudi Aramco dan PT. Pertamina (Persero), Kamis, 13 Juni 2019 pukul 11.30 di Istana Merdeka	M.0212/M aritim/06/2 019	12-Jun-2019	Deputi -> Sekab/Waseskab/Presiden	proses lebih lanjut	M-501	13/06/2019	Sekab - > Presiden	Outcome 3	Maju Presiden	Deputi -> Sekab/Waseskab/Presiden
5	Laporan Rapat Pembahasan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat (PELRA)	M.0215/M aritim/06/2 019	13-Jun-2019	Deputi -> Sekab	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	Outcome 1	direspons Sekab	Deputi -> Sekab
6	Penyampaian KAK dan RAB Pengajuan Tambahan Anggaran 2020 Kedepujian Bidang Kemaritiman	M.0216/M aritim/06/2 019	13-Jun-2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Program dan Anggaran	Digunakan Deputi Adm sebagai pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
7	Percepatan Penyelesaian Peristiwa Tumpahan Minyak Montara	M.0217/M aritim/06/2 019	13-Jun-2019	Deputi -> Sekab	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	Outcome 1	direspons Sekab	Deputi -> Sekab
8	Laporan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Tol Laut	M.0218/M aritim/06/2 019	13-Jun-2019	Deputi -> Sekab	tindaklanjuti	-	-	-	Outcome 1	direspons Sekab	Deputi -> Sekab
9	Laporan Rakor Persiapan Sail	M.0220/M aritim/06/2	13-Jun-2019	Deputi -> Sekab	Monitor tindaklanjut	-	-	-	Outcome 1	direspons Sekab	Deputi -> Sekab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
10	Tidore 2021 Permohonan Audiensi Chief Executive Officer General Electric Indonesia Kepada Sekretariat Kabinet	019 M.0221/M aritim/06/2019	13-Jun-2019	Deputi -> Seskab	Atur Waktunya (sdh dilaksanakan 24/6/19)	-	-	-	Outcome 1	direspons Seskab	Deputi -> Seskab
11	Hasil Rapat Koordinasi Aspirasi Daerah yang Belum Dialokasikan Pembiayaannya pada APBN 2019 dan 2020	M.0223/M aritim/06/2019	17-Jun-2019	Deputi -> Seskab/Pr esiden	Proses lbh lanjut	M-508	17/06/2019	Seskab -> Presiden	Outcome 1	Maju Presiden	Deputi -> Seskab/Preside n
12	Permohonan Sambutan dan Penyerahan Trisakti Tourism Award	M.0225/M aritim/06/2019	17-Jun-2019	Deputi -> Seskab/Pr esiden	Proses lbh lanjut	M-510	17/06/2019	Seskab -> Presiden	Outcome 3	Maju Presiden	Deputi -> Seskab/Preside n
13	Laporan Penyelenggaraan Angkutn Lebaran Tahun 2019 (1440H) periode H-7 s.d. H-2	M.0226/M aritim/06/2019	17-Jun-2019	Deputi -> Seskab/Pr esiden	Proses lbh lanjut	M-509	17/06/2019	Seskab -> Presiden	Outcome 1	Maju Presiden	Deputi -> Seskab/Preside n
14	Permohonan Audiensi Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS)	M.0229/M aritim/06/2019	18-Jun-2019	Deputi -> Seskab/Pr esiden	Proses lbh lanjut	M-519	18/06/2019	Seskab -> Presiden	Outcome 3	Maju Presiden	Deputi -> Seskab/Preside n

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
15	Konsep Surat kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur terkait Penyiapan Bahan Rapat Terbatas Terkait Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Produksi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur	M.0230/M aritim/06/2019	18-Jun-2019	Deputi -> Seskab	ditandatangani	B.0216/Seskab/ Maritim/06/2019	18/06/2019	Gubernur Jateng dan Jatim	Outcome 1	Surat Seskab	Deputi -> Seskab
16	Briefing Sheet Audiensi Seskab dengan CEO General Electric Indonesia	M.0231/M aritim/06/2019	24-Jun-2019	Deputi -> Seskab/Presiden	(sdh digunakan)	-	-	-	Outcome 3	direspon Seskab	Deputi -> Seskab/Presiden
17	Briefing Sheet Rapat Intern Pelabuhan Patimban	M.0232/M aritim/06/2019	24-Jun-2019	Deputi -> Seskab/Presiden	Proses lbh lanjut	M-541	24/06/2019	Seskab -> Presiden	Outcome 3	Maju Presiden	Deputi -> Seskab/Presiden
18	Laporan Rapat Tindak Lanjut Ratas terkait Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Sektor Kemaritiman	M.0233/M aritim/06/2019	24-Jun-2019	Deputi -> Deputi	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputi Ekon sebagai laporan ke Seskab	Deputi -> Deputi
19	Penyampaian Usulan Talking Points Presiden tentang IUU Fishing dalam KTT G-20 di	M.0237/M aritim/06/2019	26-Jun-2019	Deputi -> Seskab/Presiden	Pertemuan sdh berlangsung	-	-	-	Outcome 3	direspon Seskab	Deputi -> Seskab/Presiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
20	Osaka Jepang tanggal 28-29 Juni 2019 Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Perpres tentang Pengesahan Konvensi Internasional Nairobi Tahun 2007 tentang Penyingkiran Kerangka Kapal	M.0238/M aritim/06/2 019	27-Jun-2019	Deputi -> Seskab	Monitor tindak lanjutnya	-	-	-	Outcome 2	direspons Seskab	Deputi -> Seskab
DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN PERIODE JULI TAHUN 2019											
1	Permohonan Audiensi President Director dan CEO PT Siemens Indonesia dengan Seskab	M.0240/M aritim/06/2 019	28-Jun-19	Sekretaris Kabinet	atur waktunya	-	-	-	Outcome 3	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
2	Partisipasi Indonesia dalam Pertemuan Sherpa High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy ke-4 di Lisbon, Portugal Tanggal 27-28 Mei 2019	M.0241/M aritim/06/2 019	28-Jun-19	Sekretaris Kabinet	Proses lebih lanjut	M.0566/Seskab/07/2019	02-Jul-19	Presiden	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
3	Penyampaian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2019	M.0242/M aritim/07/2 019	04-Jul-19	Deputi Polhukam	-	-	-	-	Outcome 3	Dimanfaatkan Deputi lain untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
4	Permohonan Audiensi Chairman and Ceo General Electric Company Kepada Presiden	M.0244/M aritim/07/2 019	04-Jul-19	Sekretaris Kabinet	(Arsip, digabung dg memo agenda 1575)	-	-	-	Outcome 3	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
5	Perkembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Bandara Kertajati)	M.0246/M aritim/07/2 019	04-Jul-19	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
6	Permohonan izin Prakarsa Perpres tentang Hak Keuangan bagi Anggota Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli Mahkamah Pelayaran	M.0248/M aritim/07/2 019	08-Jul-19	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 2	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
7	Bahan Rapat Terbatas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah	M.0249/M aritim/07/2 019	08-Jul-19	Sekretaris Kabinet	Rapat sdh berlangsung	M.0601/Seskab/ 07/2019	10-Jul-19	Presiden	Outcome 3	Respon Seskab dan Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SEKAB	NO TU SEKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
8	Penyampaian Tindak Lanjut Rencana Aksi Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat	M.0250/M aritim/07/2 019	09-Jul-19	Deputi Polhukam	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi lain untuk pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
9	Pokok-Pokok Diskusi yang akan disampaikan Chairman and Ceo General Electric Company Kepada Presiden	M.0251/M aritim/07/2 019	09-Jul-19	Sekretaris Kabinet	Noted - Arsip	-	-	-	Outcome 3	Respon Sekab	Deputi -> Sekab
10	Laporan Penyelenggaraan Lebaran Tahun 2019 (1440 H)	M.0252/M aritim/07/2 019	09-Jul-19	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0595/Sekab/ 07/2019	10-Jul-19	Presiden	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Sekab -> Presiden
11	Perkembangan Realignment Singapore Flight Information Region (FIR)	M.0254/M aritim/07/2 019	10-Jul-19	Deputi Polhukam	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi lain untuk pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
12	Laporan menghadiri Bonn Climate Change Conference (BCCC), Jerman, 17-27 Juni 2019	M.0255/M aritim/07/2 019	11-Jul-19	Deputi Perencanaan	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
13	Briefing Sheet Ratas membahas Perkembangan Pembangunan Listrik Tenaga Sampah di 12 Provinsi/Kota di Indonesia	M.0258/M aritim/07/2 019	12-Jul-19	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0624/Seskab/ 07/2019	16-Jul-2019	Presiden	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
14	Briefing Sheet Ratas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	M.0259/M aritim/07/2 019	15-Jul-19	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0621/Seskab/ 07/2019	15-Jul-19	Presiden	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
15	Briefing Sheet Pertemuan Presiden dengan Pimpinan Inpx Tokyo	M.0261/M aritim/07/2 019	16-Jul-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0627/Seskab/ 07/2019	16-Jul-2019	Presiden	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
16	Laporan Rapat Koordinasi Membahas Percepatan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik di 12 Kota	M.0269/M aritim/07/2 019	19-Jul-2019	Sekretaris Kabinet	Tindaklanjuti	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
17	Laporan Penyelesaian Permasalahan Tarif Angkutan Penumpang Udara	M.0270/M aritim/07/2 019	19-Jul-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0644/Seskab/ 07/2019	22-Jul-2019	Presiden	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
18	Laporan Rapat Klarifikasi usulan revisi terhadap perpres nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perpres nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Gianyar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita), Tanggal 21 Juni 2019 di Kantor Sekretariat Negara	M.0271/M aritim/07/2 019	24-Jul-2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjutnya	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
19	Laporan Rapat Pelaksanaan Pembangunan PLTsa di Kota Semarang	M.0272/M aritim/07/2 019	25-Jul-2019	Sekretaris Kabinet	tindaklanjuti	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
20	Pengusahaan Pentambangan Batubara	M.0273/M aritim/07/2 019	25-Jul-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0664/Seskab/07/2019	26-Jul-2019	Presiden	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab
21	Penyampaian Bahan Rapat Inter Subsidi Energi (Listrik, BBM dan LPG	M.0274/M aritim/07/2 019	29-Jul-2019	Sekretaris Kabinet	Pertemuan sdh berlangsung	M.0671/Seskab/07/2019	29-Jul-2019	Presiden	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab
22	Laporan Kesiapan Sail Nias 2019	M.0279/M aritim/07/2 019	31-Jul-2019	Sekretaris Kabinet	proses lbh lanjut	M.0678/Seskab/08/2019	01-Aug-2019	Presiden	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN PERIODE AGUSTUS TAHUN 2019

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
1	rancangan peraturan presiden tentang rencana aksi nasional pengelolaan terpadu taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional tahun 2018-2025	M.0280/M aritim/08/2019	01-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	proses lbh lanjut	M.0679/Seskab/08/2019	01-Aug-2019	Presiden (ditandatangani)	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab
2	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) Indonesia Tahun 2018	M.0281/M aritim/08/2019	02-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
3	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas Mitigasi Risiko dan Jaminan Penyediaan Listrik	M.0282/M aritim/08/2019	05-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 3	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab -> Presiden
4	Permohonan Audiensi Penyelenggaraan Sail Nias 2019	M.0285/M aritim/08/2019	05-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0699/Seskab/08/2019	06-Aug-2019	Presiden	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
5	Penyampaian Wiatraks Janji Presiden Kurun Waktu Oktober 2014 Sampai Dengan Juni 2019	M.0286/M aritim/08/2 019	06-Aug-2019	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi lain untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
6	Penyampaian Briefing Sheet Pertemuan Presiden dengan Direktur Utama PT ITDC (Persero)	M.0287/M aritim/08/2 019	06-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 3	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
7	Laporan Tindak Lanjut Aranan Presiden pada Sidang Kabinet (Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet Panipurna) Periode Oktober 2014 s.d. Juni 2019	M.0288/M aritim/08/2 019	06-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0702/Seskab/ 08/2019	06-Aug-2019	Presiden	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab
8	Laporan Perjalanan Dinas menghadiri Commissioning Test (Individual Test) Proyek Pengolah Sampah menjadi energi listrik (PLTsa) di TPA Sumur Batu Kota Bekasi	M.0290/M aritim/08/2 019	06-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SSKAB	NO TU SSKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
9	Laporan Rakor Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Tanggal 15 Juli 2019 terkait Pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (Tanggal 16 Juli 2019 di Sekretariat Kabinet)	M.0291/M aritim/08/2019	06-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	Respon SSKAB	Deputi -> SSKAB
10	Laporan Rapat Pelaksanaan Pembangunan PLTsa di Kota Surabaya dan Kota Palembang	M.0292/M aritim/08/2019	06-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> SSKAB
11	Bahan Rapat Intern Tentang Kendaraan Listrik Matriks Capaian Penugasan Kepada Sekretaris Kabinet Dalam Penyusunan Peraturan Presiden/Keputusan Presiden/Instruksi Presiden Periode Oktober 2014 – Juni 2019 di Bidang Kemaritiman	M.0293/M aritim/08/2019	06-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0706/Seskab/08/2019	07-Aug-2019	Presiden	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> SSKAB
12		M.0294/M aritim/08/2019	08-Aug-2019	Deputi Bidang PMK	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi lain untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> SSKAB

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
13	Permintaan Kunjungan Kehormatan Secretary of Ho Chi Minh City Party Committee, Vietnam	M.0295/M aritim/08/2019	08-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 3	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
14	1. Permohonan Audiensi Dewan Direksi Indonesia Petroleum Association Dengan Sekretaris Kabinet 2. Permohonan Presiden Untuk Membuka Indonesia Petroleum Association and Exhibition ke-43 Tahun 2019	M.0296/M aritim/08/2019	08-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0733/Seskab/08/2019	12-Aug-2019	Presiden	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab
15	Penyampaian Bahan Ratas membahas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori B20	M.0298/M aritim/08/2019	12-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0732/Seskab/08/2019	12-Aug-2019	Presiden	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
16	Permohonan menjadi Tuan Rumah penyelenggaraan the World Economic Forum on ASEAN 2020	M.0299/M aritim/08/2019	13-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0750/Seskab/08/2019	13-Aug-2019	Presiden	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
17	Pointers Keynote Speech Sekretaris Kabinet pada HUT BPPT ke-41	M.0301/M aritim/08/2019	15-Aug-2019	Deputi Bidang Perencanaan	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi lain untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
18	Permohonan Kehadiran Presiden dalam acara Penganangan Program Digitalisasi di Perbatasan	M.0304/M aritim/08/2019	20-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 3	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
19	Permohonan membuka dan menutup Festival Tabut 2019	M.0305/M aritim/08/2019	21-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 3	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
20	Laporan Rapat Pelaksanaan Pembangunan PLT Sa Legok Nangka Regional Provinsi Jawa Barat	M.0306/M aritim/08/2019	22-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
21	Laporan Rapat Koordinasi "Pembangunan Infrastruktur Transportasi Untuk Mendukung Konektivitas Destinasi Pariwisata Borobudur dan Destinasi Penyangga (Geopark Gunung Sewu) Guna Bangkitan Penumpang Yogyakarta International Airport	M.0307/M aritim/08/2019	22-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
22	Permohonan Kepada Presiden membuka The 6th Asia Pacific Geopark Network (APGN_ Symposium Tahun 2019 di Mataram, NTB	M.0308/M aritim/08/2019	23-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0781/Seskab/08/2019	26-Aug-2019	Presiden	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab
23	Permohonan Kelompok Pembudidaya Karang Hias Nusantara Kepada Presiden untuk Audiensi tentang Transpalasi	M.0309/M aritim/08/2019	26-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
24	Karang Hias Rencana Operasi Terbatas Landas Pacu Ketiga (Runway 3) Bandar Udara Soekarno-Hatta	M.0310/M aritim/08/2 019	26-Aug- 2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0794/Seskab/ 08/2019	28-Aug- 2019	Presiden	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab
25	Optimalisasi Pemanfaatan Energi Thorium Guna Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup dalam rangka Ketahanan Energi Nasional dan Permohonan Audiensi Thorcon International PTE. LTD	M.0311/M aritim/08/2 019	26-Aug- 2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
26	Laporan Menghadiri Site Visit dan Rapat Koordinasi Pengembangan DPN Solo- Sangiran	M.0313/M aritim/08/2 019	27-Aug- 2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
27	Laporan Perkembangan Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur, sampai denga kondisi 26 Agustus 2019	M.0315/M aritim/08/2 019	28-Aug- 2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0797/Seskab/ 08/2019	29-Aug- 2019	Presiden	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
28	Permohonan Memberikan Sambutan dan Membuka Seminar dan Pameran Ketengalistrikan Hari Listrik Nasional ke 74 Tahun 2019	M.0318/M aritim/08/2 019	29-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 3	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
29	Laporan Focus Group Discussion (FGD) Mekanisme Perizinan di Wilayah Perairan/Laut untuk PSN Pasca Penetapan PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang RTRL, tanggal 26-27 Juli 2019 di Yogyakarta	M.0320/M aritim/08/2 019	29-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
30	Laporan rapat percepatan penyelesaian dan pandingan kontrak perjanjian	M.0321/M aritim/08/2 019	29-Aug-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2019

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
1	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Ratas Tanggal 5 Juli 2019 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Pariwisata di Sulawesi Utara (Tanggal 24 Juli 2019 di Hotel Lumire, Jakarta)	M.0323/M aritim/09/2 019	03-Sep-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
2	laporan perkembangan penyelenggaraan sail nias 2019	M.0326/M aritim/09/2 019	04-Sep-2019	Sekretaris Kabinet	proses lbh lanjut	M.0816/Seskab/ 09/2019	04-Sep-2019	Presiden	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
3	Laporan Identifikasi Peraturan Perundang-undangan terkait Ruang Bebas Transmisi dan Jarak Bebas Minimum (ROW) pada jaringan transmisi listrik	M.0329/M aritim/09/2 019	04-Sep-2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SEKAB	NO TU SEKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
4	Laporan Identifikasi Peraturan Perundang-undangan terkait Ruang Bebas Transmisi dan Jarak Bebas Minimum (ROW) pada jaringan transmisi listrik	M.0330/M aritim/09/2019	09-Sep-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	Menko Kemanan, Men ATR, Mendagri MenBUM N, MenPUP R dan Menhan	Outcome 1	Surat Sekab	Deputi -> Sekab
5	Penyampaian Konsep Surat Pendelegasian Kehadiran Presiden pada Puncak Acara Sail Nias 2019	M.0333/M aritim/09/2019	12-Sep-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	Respon Sekab	Deputi -> Sekab
6	Penyampaian Bahan terkait High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy	M.0334/M aritim/09/2019	12-Sep-2019	Wakil Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Wakil Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> waseskab
7	Permohonan Kehadiran Presiden dalam acara Pembukaan Rakor Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal	M.0335/M aritim/09/2019	13-Sep-2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0853/Seskab/09/2019	13-Sep-2019	Presiden	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Sekab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKABI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
8	Laporan Progres Penyiapan Bahan Rapat Terbatas Mengenai Perbaikan Kemudahan Berusaha (Ekosistem Investasi) di Sektor Migas dan Ketenagalistrikan	M.0338/M aritim/09/2 019	16-Sep- 2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
9	Laporan Rapat Koordinasi Kompilasi, Validasi, dan Pemutakhiran Usulan Program/Kegiatan Prioritas Dalam Rangka Penyiapan Master Plan Percepatan Pembangunan Jawa Tengah	M.0339/M aritim/09/2 019	16-Sep- 2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjut nya	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
10	Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas guna Membahas Permasalahan pada Sektor Kelautan dan Perikanan	M.0340/M aritim/09/2 019	16-Sep- 2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0861/Seskab/ 09/2019	18-Sep- 2019	Presiden	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKABI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
11	Permohonan Kemudahan Impor Besi Tua dan Pemanfaatan Slag Baja dengan Kualitas SNI.	M.0341/M aritim/09/2019	17-Sep-2019	Deputi Bidang Perencanaan	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi lain untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
12	Penyampaian Paraf Persetujuan Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	M.0342/M aritim/09/2019	18-Sep-2019	Deputi Bidang Administrasi	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi lain untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
13	Permohonan Audiensi Gubernur Sulawesi Barat kepada Presiden	M.0343/M aritim/09/2019	20-Sep-2019	Sekretaris Kabinet	Dengan menteri terkait dahulu ---> untuk menggali informasi lbh lanjut	-	-	-	Outcome 3	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
14	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi PT Vale Indonesia dengan Presiden	M.0344/M aritim/09/2019	23-Sep-2019	Sekretaris Kabinet	Sudah diterima, Arsip	-	-	-	Outcome 3	Dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
15	Laporan Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan sail nias 2019	M.0347/M aritim/09/2019	25-Sep-2019	Wakil Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Wakil Sekretaris Kabinet dalam pertimbangan pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
16	Penyampaian Topik Capaian 5 Tahunan Kinerja Sekretaris Kabinet di Bidang Kemaritiman	M.0353/M aritim/09/2019	30-Sep-2019	Deputi Bidang Administrasi	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi lain untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN PERIODE OKTOBER TAHUN 2019											
1	Penerapan Skema Imbal Dagang Dalam Importasi Migas	M.0357/M aritim/10/2019	01/10/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B.0373/Seskab/ Maritim/10/2019	07/10/2019	KESDM	Outcome 1	Surat Seskab	Deputi -> Seskab
2	Permohonan Pengisian Perkembangan Kegiatan Tindak Lanjut Arahkan Presiden dalam SITAP Hasil Sidang Kabinet Paripurna/ Rapat Terbatas Bulan Juli – Oktober 2019	M.0360/M aritim/10/2019	08/10/2019	Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan ;Deputi Bidang Perencanaan;Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi lain sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SSKAB	NO TU SSKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
3	Permohonan Kehadiran Presiden dalam Pengoperasian Perdana Tunnel Boring Machine (TBM) pada Proyek Kereta Api Cepat Indonesia Jakarta-Bandung di Tunnel I Halim	M.0361/M aritim/10/2 019	11/10/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0942/Seskab/ 10/2019	11/10/2019	Presiden RI	Outcome 3	Memo ke Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
4	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang	M.0362/M aritim/10/2 019	11/10/2019	Deputi Bidang Perekonomian	-	-	-	-	Outcome 2	Dimanfaatkan Deputi lain sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
5	Laporan Tindak Lanjut Penyusunan Legal Opinion PLTsa Benowo, Kota Surabaya	M.0363/M aritim/10/2 019	11/10/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B.0382/Seskab/ Maritim/10/2019	14/10/2019	KESDM	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
6	Permohonan Persentasi Participating Interest (PI) Lebih Dari 10% Pada Wilayah Kerja (WK) Migas di Riau	M.0364/M aritim/10/2 019	11/10/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0951/Seskab/ 10/2019 dan B.0384/Seskab/ Maritim/10/2019	14/10/2019 10:17:27 dan 17/10/2019	Presiden RI dan MESDM, MenPPN, Mendagri	Outcome 1	Surat Seskab dan Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
7	Tanggapan Kelompok Pembudidaya Karang Hias Nusantara atas Rapat Koordinasi terkait Ekspor Karang Hias di Sekretariat Kabinet	M.0365/M aritim/10/2 019	11/10/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjut nya	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
8	Surat Direktur Chester View Limited	M.0366/M aritim/10/2 019	11/10/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B.0387/Seskab/ Maritim/10/2019	18/10/2019	Menhub	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
9	LAPORAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN PERIODE OKTOBER 2014 S.D. OKTOBER 2019	M.0367/M aritim/10/2 019	14/10/2019	Wakil Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Waseskab sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Waseskab
10	Permohonan Audiensi Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesian Tourism Development Corporation (PT	M.0370/M aritim/10/2 019	17/10/2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
11	ITDC) dengan Sekretaris Kabinet Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Insentif Fiskal Guna Meningkatkan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Sektor Migas	M.0371/M aritim/10/2 019	17/10/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
12	Permohonan kepada Presiden untuk Membuka Archipelagic and Island States (AIS) Startup and Business Summit pada tanggal 31 Oktober 2019 di Manado	M.0372/M aritim/10/2 019	22/10/2019	Sekretaris Kabinet	Noted Arsip	-	-	Outcome 3	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
13	Permohonan Presiden Untuk Membuka Pameran Indo EBTKE ConEx 2019 ke-8 Tahun 2019	M.0373/M aritim/10/2 019	23/10/2019	Sekretaris Kabinet	Noted Arsip	-	-	Outcome 3	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
14	Notulen Rapat Intern Wakil Presiden RI tentang Ketenagalistrikan	M.0374/M aritim/10/2 019	23/10/2019	Sekretaris Kabinet	Noted Arsip	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
15	pewnyampaian buku laporan tindak lanjut arahan presiden periode 2014-2019	M.0377/M aritim/10/2 019	24/10/2019	Wakil Sekretaris Kabinet; Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan ;Deputi Bidang Perekonomian;Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi lain sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Waseskab dan Para Deputi
16	Penyampaian Berkas Tindak Lanjut Hasil Kajian Dewan Ketahanan Nasional pada Kedepuitian Bidang Kemaritiman	M.0378/M aritim/10/2 019	28/10/2019	Deputi Bidang Administrasi	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi Admin sebagai tindak lanjut surat-surat Wantannas	Deputi -> Deputi
17	Permohonan Dukungan Terhadap Bandar Udara Kabupaten Pulau Morotai	M.0379/M aritim/10/2 019	28/10/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindak lanjutnya	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
18	Penghentian Kegiatan Reklamasi di Kawasan Pelabuhan Benoa Bali	M.0381/M aritim/10/2 019	29/10/2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
19	Permohonan Audiensi Head of Region Asia-Pacific Airbus Defence and Space dengan Sekretaris Kabinet	M.0385/M aritim/10/2 019	29/10/2019	Sekretaris Kabinet	Noted Arsip	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
20	Usulan Pengantar Presiden dan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Program dan Kegiatan di Bidang Kemanitman dan Investasi	M.0389/M aritim/10/2 019	30/10/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.0986/Seskab/ 10/2019	30/10/2019	Presiden RI	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab
21	Briefing Sheet Audiensi Sekretaris Kabinet dengan President Director and CEO PT. Siemens Indonesia dan Managing Board of Siemens AG	M.0389/M aritim/10/2 019	31/10/2019	Sekretaris Kabinet	(sdh digunakan)	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Seskad untuk audiensi	Deputi -> Seskab

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITMAN PERIODE NOVEMBER TAHUN 2019

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
1	Penyampaian saran pertimbangan kehadriran Presiden pada 7th World Ocean Summit di Tokyo tanggal 9 s.d. 10 Maret 2020	M.0390/M aritim/11/2 019	01/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1016/Seskab/ 11/2019 dan B.0461/Seskab/ Maritim/12/2019	06/11/2019	Presiden RI dan Menteri KKP (Dispo Presiden, Menteri KKP, hadir)	Outcome 3	Respon Presiden	Deputi -> Seskab
2	Penawaran Kerja Sama Pengembangan Agro Wisata (Desa Kelapa dan Taman Kelapa)	M.0391/M aritim/11/2 019	01/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung	M.0396/M aritim/11/2 019	05/11/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor Tindakanj utnya	-	-	-	Outcome 2	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
4	Laporan Kegiatan the 6th Our Ocean Conference di Oslo, Norwegia	M.0397/M aritim/11/2 019	05/11/2019	Sekretaris Kabinet	Noted Arsip	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
5	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi PT. ITDC dengan Seskab	M.0399/M aritim/11/2 019	07/11/2019	Sekretaris Kabinet	Arsip	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
6	Prediksi Iklim 2020	M.0405/M aritim/11/2 019	14/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1050/Seskab/ 11/2019 dan B.0427/Seskab/ Maritim/11/2019	15/11/2019	Presiden RI	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden

No	Pertihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
7	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Mitigasi Bencana di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta	M.0406/M aritim/1/2 019	19/11/2019	Sekretaris Kabinet	tindaklanjuti	B.1000/Maritim/12/2019	04/12/2019	Menko Ekon, Menkomar, dll.	Outcome 1	Surat Seskab	Deputi -> Seskab
8	Penyampaian Briefing Sheet Acara Indonesian Mining Association (IMA) Award 2019	M.0410/M aritim/1/2 019	20/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1063/Seskab/11/2019	20/11/2019	Presiden RI	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
9	Laporan Perkembangan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik di Kota Surabaya	M.0411/M aritim/1/2 019	20/11/2019	Sekretaris Kabinet	Tindaklanjuti	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
10	Penyampaian Bahan Ratas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Tanggal 21 November 2019	M.0414/M aritim/1/2 019	21/11/2019	Sekretaris Kabinet	Noted Arsip	-	-	-	Outcome 3	Respon Seskab	Deputi -> Seskab -> Presiden
11	Permohonan Legal Opinion Terhadap Penetapan WIJPK serta Penawaran Prioritas dan/atau	M.0415/M aritim/1/2 019	21/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
12	Lelang Terhadap Wilayah Hasil Penciutan PT Vale Indonesia Laporan Komisi Pengawas atas Kinerja SKK Migas Semester I Tahun 2019	M.0416/M aritim/1/1/2019	21/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1080/Seskab/11/2019	25/11/2019	Presiden RI	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
13	Pemantauan Janji-Janji Presiden Periode Tahun 2019-2024	M.0417/M aritim/1/1/2019	21/11/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor Tindaklanj utnya	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
14	Pemohonan Penyampaian Rencana Ratifikasi Protokol Pertama Perubahan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif ASEAN-Jepang (First Protocol to Amend ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership/ First Protocol)	M.0418/M aritim/1/1/2019	21/11/2019	Sekretaris Kabinet	Noted - Arsip	-	-	-	Outcome 2	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
15	Laporan Perjalanan Dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Amerika Serikat dan Jepang, tanggal 20-26	M.0419/M aritim/1/1/2019	21/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1081/Seskab/11/2019	25/11/2019	Presiden RI	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKABI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
16	September 2019 Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Sekretaris Kabinet dengan PT Vale	M.0420/M aritim/1/1/2 019	25/11/2019	Sekretaris Kabinet	(sdh digunakan)	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan Audiensi	Deputi -> Seskab
17	Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (PMK 89/2019)	M.0421/M aritim/1/1/2 019	25/11/2019	Sekretaris Kabinet	Noted Arsip	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
18	Kewaspadaan Pada Peningkatan Aktivitas Kegempaan di Wilayah Sami, Mamberamo, Provinsi Papua	M.0422/M aritim/1/1/2 019	26/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
19	Permohonan Audiensi Dewan Pimpinan Pusat dan Badan Pekerja Kongres	M.0423/M aritim/1/1/2 019	26/11/2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan dalam	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
20	XXI Kemaritiman Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)	M.0424/M aritim/1/2 019	26/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1085/Seskab/ 11/2019 dan B.0442/Seskab/ Maritim/11/2019	27/11/2019	Presiden RI dan Menhub	Outcome 1	pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab -> Presiden
21	Laporan Rapat Klarifikasi Dukungan Terhadap Peningkatan Kehandalan Penyediaan Listrik Jawa - Bali	M.0425/M aritim/1/2 019	26/11/2019	Sekretaris Kabinet	tindaklanjut	B.1016/Maritim/ 11/2019	28/11/2019	Menkomar, PLN	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
22	Laporan Evaluasi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Geofisika di Pulau Kalimantan	M.0427/M aritim/1/2 019	27/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
23	Laporan Penyelenggaraan Pertemuan Kedua Tingkat Menteri Forum Negara-Negara Kepulauan dan Negara Pulau (Archipelagic and Island States Forum), di Manado tanggal 31 Oktober s.d. 1 November 2019	M.0428/M aritim/1/2 019	28/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1097/Seskab/ 11/2019	28/11/2019	Presiden RI	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SSKAB	NO TU SSKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
24	Permohonan Audiensi Direktur Jenderal dan CEO International Air Transport Association (IATA)	M.0429/M aritim/11/2 019	28/11/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B.0450/Seskab/ Maritim/11/2019	28/11/2019	Menhub	Outcome 1	Surat Seskab	Deputi -> Seskab
DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN PERIODE DESEMBER TAHUN 2019											
1	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Presiden dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA)	M.0430/M aritim/12/2 019	03/12/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1120/Seskab/ 12/2019	04/12/2019	Presiden RI dan turun tanpa Disposisi	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
2	Penjajakan Kegiatan Presiden RI ke Korea Institute of Ocean Science and Technology/ Korea Maritime and Ocean University di Busan	M.0431/M aritim/12/2 019	04/12/2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
3	Permohonan Kehadiran Presiden pada Acara Hari Nusantara 2019 di Kota Panaman, Sumatera Barat	M.0432/M aritim/12/2 019	04/12/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1124/Seskab/ 12/2019 dan B.1052/Maritim/ 12/2019	05/12/2019	Presiden RI dan Setwapres	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
4	Bahan Rapat Internal Tentang	M.0436/M aritim/12/2	09/12/2019	Sekretaris Kabinet	ditandatangani	M.1141/Seskab/ 12/2019	10/12/2019	Presiden RI	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab ->

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	Energi	019			(Seskab A.I.)						Presiden
5	Hasil Dialog Publik "Menjawab Tantangan Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum"	M.0438/M aritim/12/2 019	09/12/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor tindaklanjut nya	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
6	Penyampaian Buku Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2018	M.0439/M aritim/12/2 019	09/12/2019	Sekretaris Kabinet	Noted Arsip	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
7	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur dan Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Perikanan	M.0440/M aritim/12/2 019	10/12/2019	Sekretaris Kabinet	ditandatangani (Seskab A.I.)	M.1142/Seskab/ 12/2019	11/12/2019	Presiden RI dan turun tanpa Disposisi	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
8	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020	M.0445/M aritim/12/2 019	13/12/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1157/Seskab/ 12/2019	13/12/2019	Presiden RI	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
9	Permohonan Pembangunan Kereta Api Banda	M.0446/M aritim/12/2 019	13/12/2019	Sekretaris Kabinet	Noted Arsip	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
10	Aceh - Besitang Penyampaian Naskah Surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan perihal Kehadiran Presiden pada 7th World Ocean Summit, di Tokyo tanggal 9 s.d. 10 Maret 2020	M.0448/M aritim/12/2 019	13/12/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
11	Laporan Kegiatan The 31 th Session of The IMO Assembly, London, 25 November 2019 ad. 4 Desember 2019	M.0449/M aritim/12/2 019	13/12/2019	Wakil Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Waseskab sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Waseskab
12	Pengembangan Inovasi Dalam Prediksi Cuaca	M.0451/M aritim/12/2 019	16/12/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1172/Seskab/ 12/2019	17/12/2019	Presiden RI	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab -> Presiden
13	Persetujuan dan Tanggapan Atas Penyesuaian Tata Kelola dan Operasional PT PLN (Persero)	M.0452/M aritim/12/2 019	16/12/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor Tindaklanj utnya	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
14	Laporan Kegiatan The 31 th Session of The IMO Assembly, London, 25 November 2019 ad. 4 Desember 2019	M.0453/M aritim/12/2 019	18/12/2019	Sekretaris Kabinet	Monitor Tindaklanj utnya	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SSKAB	NO TU SSKAB/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
15	Permohonan Peresmian PLTMH Ilaga Kabupaten Puncak Papua	M.0454/M aritim/12/2 019	19/12/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	M.1175/Seskab/12/2019	20/12/2019	Presiden RI	Outcome 3	Naik Presiden	Deputi -> Seskab
16	Permohonan John Leong Kepada Presiden Untuk Presentasi	M.0455/M aritim/12/2 019	20/12/2019	Sekretaris Kabinet	Noted Arsip	-	-	-	Outcome 1	Respon Seskab	Deputi -> Seskab
17	Peran Serta Kedepuitian Bidang Kemaritiman dalam United Nations Climate Change Conference (UNFCCC), Madrid, 30 November – 9 Desember 2019	M.0456/M aritim/12/2 019	20/12/2019	Deputi Bidang Perekonomian	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi Ekon sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Deputi
18	Permohonan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Polewali Mandar	M.0458/M aritim/12/2 019	23/12/2019	Sekretaris Kabinet	Proses lbh lanjut	B.0475/Seskab/ Maritim/12/2019	23/12/2019	Kemenhub	Outcome 1	Surat Seskab	Deputi -> Seskab
19	Laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menghadiri COP 3 Konvensi Minamata di Jenewa 24-29 November 2019	M.0462/M aritim/12/2 019	26/12/2019	Sekretaris Kabinet	ditandatangani	M.1199/Seskab/12/2019	27/12/2019	Presiden RI	Outcome 1	Naik Presiden	Deputi -> Seskab
20	Rencana Peresmian Kereta Api	M.0463/M aritim/12/2 019	27/12/2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan	Deputi -> Seskab

No	Perihal	NO TU DEPUTI	TANGGAL	KEPADA	DISPO SESKAB	NO TU SESKAB/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESSMENT CAPAIAN	Keterangan kenapa menjadi outcome	Tujuan
	Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo									pertimbangan dalam pengambilan keputusan	
21	Laporan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019)	M.0464/M aritim/12/2 019	30/12/2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab
22	Usulan Perubahan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengelolah sampah menjadi energi listrik berbasis listrik berbasis teknologi ramah lingkungan	M.0466/M aritim/12/2 019	31/12/2019	Sekretaris Kabinet	-	-	-	-	Outcome 2	Dimanfaatkan Seskab sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Deputi -> Seskab

3. Rincian Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman TA 2019

REALISASI ANGGARAN Per Pengelolaan Kegiatan Output SubOutput, Komponen SubKomponen Akun Periode s.d. 31 Desember 2019

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Saluran Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114-01-Q/AG/2019 Tgl. 12 Desember 2018

Berdasarkan Kultural
Halaman : 1 dari 5

	Uraian	Jumlah Realisasi	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
13	DEPUTI MARITIM		5.900.000.000	5.900.000.000	1.693.833.842	4.116.785.421	5.810.619.263	98,48	89.380.737
1301	ASPEK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		5.900.000.000	5.900.000.000	1.693.833.842	4.116.785.421	5.810.619.263	98,48	89.380.737
(6 5827	DUKUNGAN PENGELUARAN MAJAJEMEN KABINET DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		1.050.000.000	1.050.000.000	204.119.460	834.950.091	1.039.069.551	98,95	10.930.449
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBERHASILAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		1.050.000.000	1.050.000.000	204.119.460	834.950.091	1.039.069.551	98,95	10.930.449
001.006	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan		1.050.000.000	1.050.000.000	204.119.460	834.950.091	1.039.069.551	98,95	10.930.449
501	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemeliharaan di bidang Kelautan dan Perikanan		885.748.000	887.319.000	133.499.460	745.447.667	879.347.127	99,10	7.971.873
501.AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis		310.806.000	488.561.000	124.249.460	356.809.862	481.059.322	98,46	7.501.678
521211-RM	BELANJA BAHAN		35.880.000	42.228.000	39.474.000	0	39.474.000	93,47	2.754.000
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA		2.500.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA		15.800.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA		257.426.000	446.333.000	84.775.460	356.809.862	441.585.322	96,93	4.747.678
501.AB	Pengumpulan data		574.942.000	398.758.000	9.250.000	389.637.805	398.287.605	99,88	470.195
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA		129.381.000	72.285.000	0	72.284.900	72.284.900	99,99	100
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA		32.000.000	12.400.000	9.250.000	2.700.000	11.950.000	96,37	450.000
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI		413.561.000	314.073.000	0	314.052.905	314.052.905	99,99	20.095
502	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan		121.456.000	133.076.000	70.670.000	59.500.200	130.120.200	97,77	2.955.800
502.AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis		118.456.000	133.076.000	70.670.000	59.500.200	130.120.200	97,77	2.955.800
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI		29.800.000	44.600.000	41.800.000	0	41.800.000	93,72	2.800.000
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA		22.500.000	22.500.000	18.300.000	4.050.000	22.350.000	99,33	150.000
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA		66.156.000	65.976.000	10.570.000	55.450.200	65.970.200	99,99	5.000
502.AB	Pengumpulan Data		3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA		3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
503	Penyusunan rancangan rekomendasi menteri sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kelautan dan Perikanan		42.756.000	29.605.000	0	29.602.224	29.602.224	99,99	2.776
503.AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis		39.796.000	29.605.000	0	29.602.224	29.602.224	99,99	2.776
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA		3.000.000	0	0	0	0	0,00	0

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524119-RM	KOTA BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	36.796.000	29.605.000	0	29.602.224	29.602.224	99,99	2.776
503-AB	Pengumpulan Data	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
1302	ASPEK BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.750.000.000	2.750.000.000	747.906.651	1.952.872.751	2.700.779.402	98,21	49.220.598
06.5828	DIKUNCIAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.750.000.000	2.750.000.000	747.906.651	1.952.872.751	2.700.779.402	98,21	49.220.598
921	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.750.000.000	2.750.000.000	747.906.651	1.952.872.751	2.700.779.402	98,21	49.220.598
001-806	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	2.750.000.000	2.750.000.000	747.906.651	1.952.872.751	2.700.779.402	98,21	49.220.598
506	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1.672.755.000	1.406.883.000	291.647.120	1.112.843.664	1.404.490.784	99,83	2.392.216
506-AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	315.167.000	545.525.000	210.336.520	333.262.768	543.598.288	99,64	1.925.712
52121-RM	BELANJA BAHAN	19.500.000	24.150.000	23.809.500	0	23.809.500	98,99	340.500
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	44.700.000	11.100.000	11.100.000	0	11.100.000	100,00	0
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	81.250.000	160.982.000	122.755.000	37.100.000	159.855.000	99,29	1.127.000
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	164.717.000	349.293.000	52.672.020	296.162.768	348.834.788	99,66	458.212
506-AB	Pengumpulan Data	374.116.000	249.060.000	23.700.000	225.355.618	249.055.618	99,99	4.382
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	93.422.000	26.839.000	0	26.835.600	26.835.600	99,98	3.400
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	27.300.000	37.500.000	23.700.000	13.800.000	37.500.000	100,00	0
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	253.399.000	184.721.000	0	184.720.018	184.720.018	99,99	982
506-AC	Peaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Deputi Bidang Kearsifan	983.472.000	612.298.000	57.610.600	554.225.278	611.835.878	99,92	462.122
52121-RM	BELANJA BAHAN	53.820.000	48.300.000	26.468.000	21.500.000	47.968.000	99,31	332.000
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	99.600.000	24.900.000	24.800.000	0	24.800.000	99,99	100.000
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	23.512.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	570.091.000	360.093.000	6.342.600	353.720.453	360.063.053	99,99	29.947
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	236.449.000	179.005.000	0	179.004.825	179.004.825	99,99	175
507	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	212.373.000	80.104.000	0	80.103.600	80.103.600	99,99	400
507-AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	212.373.000	80.104.000	0	80.103.600	80.103.600	99,99	400
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	212.373.000	80.104.000	0	80.103.600	80.103.600	99,99	400
508	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	97.476.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	100,00	0
508-AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	18.476.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	100,00	0
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	4.500.000	0	0	0	0	0,00	0

		Urutan							
		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran	
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	13.976.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	100,00	0	
508-AB	PENGUMPULAN DATA	79.000.000	0	0	0	0	0,00	0	
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	79.000.000	0	0	0	0	0,00	0	
509	Pengkoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akumulabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedepuluan Bidang Kemitrahan	767.396.000	1.259.743.000	456.259.531	756.655.487	1.212.915.018	96,28	46.827.982	
509-AA	Rakor/Seminar/FGD/kegiatan Sejenis	731.870.000	1.245.479.000	456.259.531	742.631.652	1.198.891.183	96,25	46.587.817	
521211-RM	BELANJA BAHAN	39.350.000	129.400.000	124.532.500	0	124.532.500	96,23	4.867.500	
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	23.000.000	24.200.000	19.100.000	0	19.100.000	78,92	5.100.000	
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	94.000.000	511.601.000	168.405.000	290.290.000	478.695.000	93,56	32.906.000	
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	575.526.000	580.278.000	124.222.031	452.341.652	576.563.683	99,35	3.714.317	
509-AB	Pengumpulan Data	35.526.000	14.264.000	0	14.023.835	14.023.835	98,31	240.165	
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	35.526.000	14.264.000	0	14.023.835	14.023.835	98,31	240.165	
1303	ASDEP BIDANG PERHUBUNGAN	1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235	
06.5829	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PERHUBUNGAN	1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235	
001	RANCANGAN DAN PENGANTARAN RENCANA PERALIHAN WILAYAH	1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235	
001.006	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235	
511	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan	833.923.000	928.070.000	278.887.960	636.681.285	915.569.265	98,65	12.500.735	
511-AA	Pengumpulan data	392.744.000	263.207.000	141.205.000	112.822.000	254.027.000	96,51	9.180.000	
521211-RM	BELANJA BAHAN	50.000.000	55.890.000	46.805.000	0	46.805.000	83,74	9.085.000	
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	285.444.000	86.822.000	0	86.822.000	86.822.000	100,00	0	
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	57.300.000	120.495.000	94.400.000	26.000.000	120.400.000	99,92	95.000	
511-AB	Rapat Koordinasi/Seminar/fgd/kegiatan sejenisnya	441.179.000	664.863.000	137.682.980	523.859.285	661.542.265	99,50	3.320.735	
521211-RM	BELANJA SEWA	1.810.000	0	0	0	0	0,00	0	
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	214.001.000	664.863.000	137.682.980	523.859.285	661.542.265	99,50	3.320.735	
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	225.368.000	0	0	0	0	0,00	0	
512	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsidi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan	62.093.000	52.550.000	51.300.000	600.000	51.900.000	98,76	650.000	
512-AA	Pengumpulan data	62.093.000	52.550.000	51.300.000	600.000	51.900.000	98,76	650.000	
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0	
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	17.700.000	45.800.000	45.300.000	0	45.300.000	98,90	500.000	
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	20.393.000	0	0	0	0	0,00	0	
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	9.000.000	6.750.000	6.000.000	600.000	6.600.000	97,77	150.000	
513	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perhubungan	151.964.000	69.380.000	67.537.500	1.200.000	68.737.500	99,07	642.500	
513-AA	Pengumpulan Data	123.334.000	38.730.000	38.237.500	0	38.237.500	98,72	492.500	
521211-RM	BELANJA BAHAN	50.000.000	18.630.000	18.287.500	0	18.287.500	98,16	342.500	

		Uraian						
		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DIMAS BIASA	46.434.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DIMAS DALAM KOTA	7.500.000	7.500.000	7.380.000	0	7.380.000	98,00	150.000
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DIMAS PAKET MEETING DALAM KOTA	17.400.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	100,00	0
513-AB	Rapat koordinasi/seminar/FGD/kegiatan sejenisnya	30.650.000	30.650.000	29.300.000	1.200.000	30.500.000	99,51	150.000
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DIMAS PAKET MEETING DALAM KOTA	30.650.000	30.650.000	29.300.000	1.200.000	30.500.000	99,51	150.000
1304	ASDEP BIDANG KEPARAWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM	1.050.000.000	1.050.000.000	344.082.251	690.481.294	1.034.563.545	98,52	15.436.455
06.5830	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG KEPARAWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM	1.050.000.000	1.050.000.000	344.082.251	690.481.294	1.034.563.545	98,52	15.436.455
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEPARAWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM	1.050.000.000	1.050.000.000	344.082.251	690.481.294	1.034.563.545	98,52	15.436.455
001.006	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Keparawisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	1.050.000.000	1.050.000.000	344.082.251	690.481.294	1.034.563.545	98,52	15.436.455
516	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemertahan di bidang Keparawisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	838.716.000	976.208.000	333.482.251	628.522.785	962.095.036	98,54	14.202.964
516-AA	Rakor/Seminar/FGD/kegiatan sejenis	666.292.000	795.926.000	239.186.213	549.603.565	788.789.778	99,10	7.136.222
521211-RM	BELANJA BAHAN	51.680.000	66.240.000	64.840.000	0	64.840.000	97,88	1.400.000
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	10.000.000	0	0	0	0	0,00	0
522141-RM	BELANJA SEWA	14.277.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	36.400.000	18.000.000	15.000.000	0	15.000.000	83,33	3.000.000
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DIMAS PAKET MEETING DALAM KOTA	49.900.000	196.350.000	131.300.000	61.650.000	194.950.000	99,28	1.400.000
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DIMAS PAKET MEETING LUAR KOTA	380.254.000	515.336.000	28.046.213	485.953.565	513.999.778	99,74	1.336.222
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DIMAS LAINNYA - LUAR NEGERI	143.781.000	0	0	0	0	0,00	0
516-AB	Pengumpulan Data	152.424.000	180.282.000	94.296.038	78.919.220	173.215.258	96,08	7.066.742
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DIMAS BIASA	140.424.000	173.532.000	91.146.038	76.519.220	167.665.258	96,61	5.866.742
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DIMAS DALAM KOTA	12.000.000	6.750.000	3.150.000	2.400.000	5.550.000	82,22	1.200.000
517	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Keparawisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	157.724.000	51.892.000	5.550.000	45.158.509	50.708.509	97,71	1.183.491
517-AA	Rakor/Seminar/FGD/kegiatan sejenis	157.724.000	51.892.000	5.550.000	45.158.509	50.708.509	97,71	1.183.491
521211-RM	BELANJA BAHAN	31.050.000	2.070.000	1.950.000	0	1.950.000	94,20	120.000
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DIMAS PAKET MEETING DALAM KOTA	29.600.000	7.900.000	3.600.000	3.920.000	7.520.000	95,18	380.000
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DIMAS PAKET MEETING LUAR KOTA	97.074.000	41.922.000	0	41.238.509	41.238.509	96,36	683.491
518	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Keparawisataan, Riset dan Teknologi, dan L	53.560.000	21.900.000	5.050.000	16.800.000	21.850.000	99,77	50.000
518-AA	Rakor/Seminar/FGD/kegiatan sejenis	53.560.000	21.900.000	5.050.000	16.800.000	21.850.000	99,77	50.000
521211-RM	BELANJA BAHAN	16.560.000	0	0	0	0	0,00	0

	U t a i a n	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	37.000.000	21.500.000	5.050.000	16.800.000	21.850.000	99,77	50.000

4. Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja

4.1. Formulir checklist muatan substansi LKj sesuai Surat edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 tahun 2018

No	Pernyataan	Checklist	Halaman	
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√	-
		2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√	v
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√	16
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√	110-189
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	6
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	88
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggujawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√	-
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	110-189
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	-
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	16
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√	9
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√	8
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√	10
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√	10
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√	17-24

- 4.2. Formulir checklist muatan substansi LKj sesuai memorandum Deputi Bidang Administrasi Nomor: M.513/Adm/11/2019 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat kabinet, Eselon I, dan Eselon II Tahun 2019

No	Pernyataan	Checklist	Halaman
1	BAB I 1. Menambahkan <i>SWOT Analysis</i> pada bagian permasalahan strategis	√	6
	2. Menampilkan <i>Dashboard</i> SIKT (Menunjukkan Proses <i>Monitoring</i> atas Capaian Kinerja)	√	16
2	BAB III 1. Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-2019	√	17-24
	2. Analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi). Contoh LKj Sekretariat Kabinet a. Template grafik perbandingan realisasi anggaran b. Tabel capaian kinerja dan anggaran	√	88-90
3	Lampiran Checklist FO sesuai edaran Depmin	√	188
4	Lampiran Lembar Hasil Evaluasi SAKIP 2018	√	-

Mengetahui
Kepala Bidang Fasilitas Operasional



Sarnini

**LEMBAR KRITERIA EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2018
KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	KONDISI		CATATAN
			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)					
		42,86	81,61%	34,98	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)					
		14,29	79,08%	11,29	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)					
		2,86	100,00%	2,86	
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		A	1	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1	Hal 47
3	Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1	
4	Tujuan/Hasil Program telah disertai target keberhasilannya		A	1	
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1	Hal 48
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1	Hal 50
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1	Lampiran IB
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1	Hal 50
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1	
b. KUALITAS RENSTRA (5%)					
		7,14	78,13%	5,58	
10	Tujuan/Hasil program telah berorientasi hasil		A	1	
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil Program telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		B	0,75	
12	Sasaran telah berorientasi hasil		B	0,75	
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75	
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya		B	0,75	
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		B	0,75	
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)					
		4,29	66,67%	2,86	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan		B	0,75	
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		C	0,5	Target JM telah dimonitor namun tidak ada dokumen hasil monitoring serta tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0,75	
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)					
		28,57	82,89%	23,68	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)					
		6,71	100,00%	6,71	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1	
3	PK telah menyajikan IKU		A	1	
4	PK telah dipublikasikan		Y	1	
5	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1	
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)					
		14,29	77,78%	11,11	
6	Sasaran telah berorientasi hasil		B	0,75	
7	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	
9	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0,75	
10	Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran		B	0,75	
11	Dokumen PK telah selaras dengan Renstra		B	0,75	
12	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75	
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0,75	
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1	
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)					
		8,57	80,00%	6,86	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	KONDISI		CATATAN
			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		35,71	76,25%	27,23	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		7,14	87,50%	6,25	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		C	0,5	Belum memiliki SOP pengukuran kinerja yang memadai
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1	
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		17,86	77,50%	13,84	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		B	0,75	
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		B	0,75	
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0,5	Belum memiliki SOP pengukuran kinerja yang memadai, dan belum sepenuhnya memanfaatkan TI
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1	
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1	
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		10,71	66,67%	7,14	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,75	
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		C	0,5	Monitoring atas capaian target kinerja eselon III dan IV dilakukan tahunan
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		C	0,5	Pengukuran belum dikaitkan dengan reward & punishment
19	IKU telah direviu secara berkala		B	0,75	
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,75	
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		21,43	73,98%	15,85	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		4,29	100,00%	4,29	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1	
3	Laporan Kinerja telah dipublikasikan		Y	1	
4	Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP				
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1	
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		10,71	66,71%	7,15	
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75	
7	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75	
8	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75	
9	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75	
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,67	
11	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0,5	
12	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,5	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	KONDISI		CATATAN
			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	6,43	68,75%	4,42	
13	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1	
14	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0,75	
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		C	0,5	Belum ada dokumen evaluasi program dan kegiatan yang memanfaatkan informasi laporan kinerja
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		C	0,5	Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja, terutama pemberian reward and punishment.
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA		100,00		78,08	